



KEBIJAKAN



KEBIJAKAN - Vol. 1 No. 2. JUNI 2018



KEBIJAKAN	Vol. 1	No. 2	Hal. 91 - 153	Pematangsiantar, Juni 2018	ISSN 2599 - 1744
-----------	--------	-------	---------------	-------------------------------	---------------------



KEBIJAKAN

VOL. 1 NO. 2, Juni 2018

SUSUNAN:REDAKSI

Penanggung Jawab	Walikota Pematangsiantar
Pimpinan Redaksi	Robert Tua Siregar, Ph.D
Anggota Dewan Redaksi	Dr. Pinondang Nainggolan, SE, M.Si Dr. Marto Silalahi, M.Si Dr. Marisi Butarbutar, SE, MM Jonni Sitorus, ST, M.Pd Binsar Tison Gultom, S.Pd, M.Sc
Penyunting	Arolina Sidauruk, SH, M.Si (BAPPEDA Kota Pematangsiantar) Ivan D. Silitonga, SE (BAPPEDA Kota Pematangsiantar) Deswidya Sukrisna Hutauruk, S.Pd, M.Si (Universitas Efarina) Chintani Sihombing, S.Pd, M.Pd (Universitas Efarina)

Mitra Bebestari Vol. 1 No. 2
 Prof. Dr. Sanggam Siahaan, M.Hum (Universitas HKBP Nommensen)
 Dr. Chandra Situmeang, SE, MSM, M.Pd, Ak, CA (Universitas Negeri Medan)
 Ervina Sectioresti Sigalingging, S.Psi, M.Psi (Universitas Pelita Harapan)
 Dian Perayanti Sinaga, S.Si, M.Sc (Universitas Simalungun)
 Porman Juanda Marporami Mahulae, ST (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara)
 Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST (Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara)

Alamat Redaksi :
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar
 Jl. Merdeka No. 4 Pematangsiantar
 Tel/Fax . (0622) 27919
 Website : www.pematangsiantarkota.go.id
 Email : kebijakan.bappeda@gmail.com

Kebijakan adalah jurnal yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang berisikan karya tulis ilmiah dalam berbagai bidang untuk memberikan referensi/input dalam pengambilan kebijakan di Kota Pematangsiantar. Kebijakan terbit enam bulan sekali dalam satu tahun yakni bulan Juni dan Desember. Kebijakan pertama kali terbit Desember 2017 dengan Nomor ISSN 2599-1744 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Nasional ISSN No : 0005.25991744/JI.3.1/SK.ISSN/2017.12 tanggal 7 Desember 2017



KEBIJAKAN

VOL. 1 NO. 2, Juni 2018

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenanNya, Jurnal Kebijakan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Juni Tahun 2018 ini dapat diterbitkan. Jurnal Kebijakan ini memuat hasil penelitian dan pengkajian dari para akademisi perguruan tinggi, peneliti dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kota Pematangsiantar.

Dalam penerbitan Volume 1 (pertama), Nomor 2 (dua), Juni 2018 ini redaksi menyajikan 8 (delapan) karya tulis ilmiah yang membahas penguatan partisipasi rukun tetangga dan rukun warga dalam pembangunan daerah, kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar, gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga tidak memiliki BPJS mandiri di wilayah kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar, hubungan pengetahuan dan sikap ibu yang memiliki bayi 12-24 bulan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Kartini, pelatihan vokal dasar anak-anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar, sastra dan kota, pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Pemerintah Kota Pematangsiantar serta analisis kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar. Karya Tulis Ilmiah tersebut dianggap layak untuk diterbitkan setelah mendapatkan masukan dan proses review dari Mitra Bebestari dan disetujui oleh Dewan Redaksi.

Karya Tulis Ilmiah yang dituangkan dalam Jurnal Kebijakan edisi kali ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan baru bagi para pembuat keputusan di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Redaksi mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Jurnal Kebijakan ini dapat diterbitkan.

Semoga jurnal ini dapat memberikan tambahan informasi untuk peningkatan ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Terimakasih.

Salam Redaksi



KEBIJAKAN

VOL. 1 NO. 2, Juni 2018

ISSN : 2599 - 1744

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Marto Silalahi

Penguatan Partisipasi Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Pembangunan Daerah

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 91 - 100

Kehadiran partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan modal sosial (*social capital*) mendampingi sumber daya daerah lainnya. Sebagai objek dari produksi pemerintahan maka wajar bila masyarakat memberikan masukan, kritik dan pendapat terkait kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah. Keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) tersebut adalah wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat analisa konseptualitas keberadaan organisasi kemasyarakatan RT dan RW dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif berdasarkan pendapat para ahli yang kompeten. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan kegiatan RT dan RW dalam membantu pemerintahan desa/kelurahan.

Kata kunci : partisipasi, rukun tetangga dan warga, penguatan organisasi.

¹Chintani Sihombing, ²Jumadiyah Wardati dan ³Debora Saragih

Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar Tahun 2017

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 101 - 108

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka fungsi pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan pasien. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen (pasien) terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan rancangan *Cross sectional study* dengan jumlah populasi pasien

peserta BPJS sebanyak 1.687 dan sampel sebanyak 94 responden yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan analisis statistik dengan menggunakan *Uji Chi Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan Bukti Fisik (Tangibles) ($p\ value = 0,024$), kehandalan (Realibility) ($p\ value = 0,002$), Daya tanggap (Responsiveness) ($p\ value = 0,043$) terhadap dimensi Kualitas Pelayanan, dan tidak terdapat hubungan kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan jaminan (Assurance), empati (Empaty) dimana ($p\ value > \alpha 0,05$) terhadap dimensi kualitas pelayanan. Disarankan bagi pihak Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan lagi Kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar pasien puas dengan pelayanan yang diberikan.

Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan pasien BPJS

¹Eka Saudur Sihombing dan ²Juliana R. Damanik

Gambaran Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Tidak Memiliki BPJS Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 109 - 116

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi rendahnya cakupan kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan tentang SJSN dimana kepesertaannya bersifat wajib. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui Gambaran Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Tidak Memiliki BPJS Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang tidak menjadi peserta BPJS Mandiri sebanyak 1.065 KK dan sampel sebanyak 92 KK dengan menggunakan Rumus Slovin. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan, pengetahuan, penghasilan, jumlah anak terhadap ketidakpemilikan BPJS Mandiri, tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan lainnya terhadap ketidakpemilikan BPJS Mandiri. Diharapkan pihak Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dan BPJS meningkatkan Sosialisasi tentang BPJS kepada masyarakat.

Kata kunci : faktor-faktor yang mempengaruhi, ketidakpemilikan BPJS mandiri

¹Pinondang Hotria Siregar dan ²Eulis Susanti

Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Yang Memiliki Bayi 12-24 Bulan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini Tahun 2017

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 117 - 124

Program imunisasi merupakan satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu, terutama yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, seperti bayi dan anak usia sekolah. Ibu adalah orang yang berperan besar dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kelengkapan imunisasi anak. Cakupan tinggi rendahnya kelengkapan imunisasi di suatu daerah diduga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap ibunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Pengetahuan dan Sikap ibu yang memiliki bayi 12- 24 bulan dengan pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di wilayah kerja Puskesmas Kartini Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Waktu penelitian dilaksanakan Bulan Agustus 2017 Wilayah Kerja Puskesmas Kartini, yaitu Kelurahan Simarito dan Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kota Pematangsiantar. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi berusia 12-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini sebanyak 123 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan dianalisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap (nilai $p = 0,610$). Begitu juga tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap (nilai $p = 0,541$). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan sikap ibu bukan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelengkapan imunisasi. Ibu yang memiliki pengetahuan tinggi dan sikap positif tidak melengkapi imunisasi pada anaknya karena pengalaman yang kurang memuaskan, sikap dan perilaku petugas yang kurang memotivasi pemberian imunisasi, penyuluhan yang rendah dan kesulitan untuk membawa anaknya untuk diimunisasi.

Kata kunci : imunisasi, pengetahuan dan sikap ibu

¹Jubelando O Tambunan dan ²Deswidya Sukrisna Hutaauruk

Pelatihan Vokal Dasar Anak-Anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 125 - 130

Teknik vokal merupakan suatu cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Teknik vokal merupakan unsur pendukung utama dalam menyanyi dimana menyanyi merupakan kegiatan yang digemari kebanyakan orang, salah satunya digemari oleh anak-anak. Yang melatar belakangi kegiatan bahwa perlunya pendidikan seni khususnya bernyanyi bagi anak-anak dalam lingkungan panti asuhan untuk mengurangi tingkat stres dan depresi anak-anak yang berada dilingkungan panti asuhan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui

peningkatan pemahaman anak terhadap teknik vokal dasar dalam upaya peningkatan keterampilan bernyanyi pada saat sebelum pelatihan dengan sesudah dilakukan pelatihan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk suatu pelatihan berupa workshop bertempat di Rumah Doa Panti Asuhan Elim Pematangsiantar dengan metode ceramah, diskusi dan Praktik vokal dasar bernyanyi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya wawasan pengetahuan dan keceriaan anak-anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar mengenai vokal dasar bernyanyi sehingga mengurangi tingkat stress dan depresi anak-anak di lingkungan panti asuhan. Anak-anak di Panti Asuhan juga menunjukkan timbal balik yang sangat baik dan positif. Anak-anak panti asuhan yang mengikuti kegiatan pelatihan ini menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap materi pengabdian yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Kata kunci : pelatihan, vokal, panti asuhan

Intan Maulina, S.Pd, M.S

Sastra Dan Kota : Pandangan Kota Dalam Puisi

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 131 - 138

Sastra dan Kota memiliki hubungan yang sangat romantis, itulah sebabnya banyak karya sastra yang dilatarbelakangi dengan persoalan-persoalan pada masyarakat perkotaan. Tidak hanya masalah bahkan gambaran tentang kota itu sendiri. Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh arus urbanisasi dan modernism yang terjadi dan dialami masyarakat kota. Secara khusus, karya sastra yang dibahas dalam artikel ini adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh Isbedy Stiawan ZS. Ada 6 buah puisi yang dibahas keenamnya mewakili masalah-masalah yang muncul dari lingkungan paling dekat pengarang. Artikel ini juga membuktikan bahwa karya sastra berfungsi sebagai medium yang penting untuk mengkritik pembangunan dan perubahan dari kehidupan masyarakat perkotaan.

Kata kunci : sastra kota, sastra Indonesia, puisi, modernisasi

Arolina Sidauruk

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Pemerintah Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 139 - 144

Diterapkannya sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur. Namun demikian, keberhasilan tersebut terletak pada peran seorang pemimpin, terutama kepala daerah atau kepala wilayah. Gaya atau perilaku kepemimpinan seorang

kepala daerah atau kepala wilayah akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik mengingat di era reformasi sekarang ini, masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam melihat dan merespon serta menyikapi segala bentuk implementasi pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai contoh gaya yang otoriter kepada bawahan dalam organisasi publik maupun terhadap masyarakat jelas tidak akan cocok. Belum lagi perhatian yang ditujukan kepada motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai guna mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk memotret Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Kata kunci : gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja

¹Robert Tua Siregar, ²Benny Simatupang dan ³Dermawan Perangin-angin

Analisis Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, 2018, Vol. 1 No. 2. Halaman 145 - 153

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang tersedia saat ini di Kota Pematangsiantar serta mengetahui kebutuhan dan pengelolaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Dimana yang termasuk dalam jenis data kualitatif ini adalah, kondisi fisik lokasi studi, kebijakan pemerintah dalam mengelola RTH publik, Data kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka-angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai yang diinginkan dengan menggunakan metode perhitungan sederhana. Dalam studi ini yang termasuk jenis data kuantitatif yaitu, luasan RTH, jumlah penduduk dan perkembangan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik menjadi *entry point* dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah/daerah. Peranan Ruang Terbuka Hijau tidak terlepas dari berbagai fungsi yang melingkupinya, yaitu fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetis. Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik eksisting di Kota Pematangsiantar hanya seluas 2.621,93 Ha (32,78 %) dari keseluruhan luas Kota Pematangsiantar yang mencapai 79,971 Km²

Kata kunci : ruang terbuka hijau, fungsi peranan, penggunaan lahan kota.



KEBIJAKAN

VOL. 1 NO. 2, Juni 2018

ISSN : 2599 - 1744

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Marto Silalahi

Increasing Participation Of Neighborhood Associations And Citizens Association In Local Development

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Vol. 1. No. 2. Halaman 91 - 100

The participation of society in developing a local area is a social capital to other rural resources. As an object of governmental production, it is common if society participate and suggest good advice, critics and opinion relating to governmental activities, development and civilization, which is done by local government. The presence of Neighborhood Association (RT) and Administrative Unit (RW) as unit of collecting social participation in many governmental activities in district area. To strengthen the organization of neighborhood association (RT) and administrative unit (RW), it is important to conduct research aimed to improve analytical conceptual of social organization, such as RT/RW in governmental activities, development and civilization. The method used in this research is investigating and analyzing description method based on competent expert opinion. This research is expected to give advice to strengthen RT/RW in helping local government.

Keywords : participation, neighborhood association and administrative unit, empowering organization

¹Chintani Sihombing, ²Jumadiyah Wardati dan ³Debora Saragih

Satisfaction Of BPJS Patients To Community Health Center Bah Biak Services In Pematangsiantar Year 2017

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Vol. 1 No. 2. Halaman 101 - 108

The increasing public demand for the quality of health services, then the service function needs to be improved to provide patient satisfaction. Quality of service is a form of consumer assessment (patient) on the level of service received with the level of service expected. This study aims to determine the satisfaction of BPJS users of the quality of health care service Bah Biak Pematangsiantar. This study used cross sectional study design with total population of BPJS participants as many as 1.687 and a sample of 94 respondents determined by purposive sampling technique by conducting interviews using questionnaires. The research results are presented in the form of frequency distribution tables and statistical

analyzes using Chi Square Test. The results showed that there were patient satisfaction of BPJS user based on Physical Tangible (p value = 0,024), reliability (p value = 0,002), Responsiveness (p value = 0,043) to Service Quality dimension, and there is no relationship of patient satisfaction BPJS user based on Assurance, Empaty where (p value > α 0,05) to service quality dimension. It is suggested for the health center of Bah Biak Pematangsiantar to improve the quality of BPJS Health service so that the patient is satisfied with the services provided.

Keywords : service quality, patient satisfaction BPJS

¹Eka Saudur Sihombing dan ²Juliana R. Damanik

Description Of Factors Influencing Family To Not Having Independent Bpjs In Working Area Of Singosari Community Healt Center In Pematangsiantar Year 2017

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Vol. 1 No. 2. Halaman 109 - 116

One of the government policies in overcoming the low coverage of health insurance ownership in the community is the Regulation on SJSN where membership is mandatory. This research is descriptive, with the aim to know the description of factors influencing the family does not have BPJS Mandiri in working area of Singosari Public Health Center Pematangsiantar City Year 2017. Population in this research is family which not participant BPJS Mandiri of 1,065 families and samples are 92 households taken with Slovin formula. Methods of collecting data by interview and using questionnaires. The result of the research are known that there is influence between education, knowledge, income, number of children to non-ownership of BPJS Mandiri, there is no influence between the ownership of other health insurance against the non-ownership of BPJS Mandiri. It is expected that the City Health Office of Pematangsiantar and BPJS to improve the socialization of BPJS to the community.

Keywords : factors affecting, non-ownership of bpjs mandiri

¹Pinondang Hotria Siregar dan ²Eulis Susanti

The Relationship Of Mother's Knowledge And Behavior Those Having Baby 12-24 Months With Basic Complete Immunization Giving In Working Area Of Community Health Center Kartini Year 2017

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Vol. 1 No. 2. Halaman 117 - 124

Immunization program is an effort to protect the population against certain diseases, especially those considered vulnerable to infectious diseases, such as infants and school-age children. Mother is a person who plays a major role in decision-making to meet the completeness of childhood immunization. High coverage of the low completeness of immunization in an area may be influenced by the knowledge and attitude of the mother. The purpose of this study is to know the relationship Knowledge and Attitudes of mothers who have babies 12 to 24 months with the provision of Basic Immunization Complete (BIC) in the work area Puskesmas Kartini Year 2017. This research is quantitative research using cross sectional research design. The time of the research was conducted in August 2017 Working Area of Puskesmas Kartini, Simarito and Sipinggol-Pinggol Urban Village Pematangsiantar. The population is all mothers who have babies aged 12-24 months in the work area of Kartini health center as many as 123 people. Data were collected through questionnaire and analyzed using Chi Square test. The results showed that there was no correlation between mother knowledge with complete basic immunization (p value = 0,610). There is also no relationship between mother's attitude with complete basic immunization (p = 0,541). This shows the knowledge and attitude of the mother is not one of the factors that can affect the completeness of immunization. Mothers with high knowledge and positive attitudes do not complement immunization to their children due to unsatisfactory experiences, attitudes and behavior of officers who are less motivated to provide immunization, low counseling and difficulty in getting their children immunized.

Keywords : immunization, knowledge and attitude

¹Jubelando O Tambunan dan ²Deswidya Sukrisna Hutauruk

Children's Basic Vocal Training Of Elim Orphanage Pematangsiantar

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Vol. 1 No. 2. Halaman 125 – 130

Vocal technique is a method of producing a good and right voice, so that the voice that is produced sounds clear and beautiful. Vocal technique is a main supporting factor in singing in which singing is a favorable activity of many people, especially children. Decreasing stress and depression is a main background of educating arts, especially singing among children living in an orphanage. The aim of this voluntary program is to find the improvement of children's achievement on basic vocal technique in increasing singing skills before and after applying the method. This voluntary program is conducted as a training in the form of workshop in Rumah Doa Panti Asuhan Elim Pematang Siantar. The method used is speech, discussion, and singing basic Vocal practice. The result of this activity is the increasing of skill of singing and increasing of happiness on children in Elim Orphanage Pematang Siantar. Children in this orphanage also show positive feed-back. They show a very good interest to the speaker as long as the program.

Keywords: *training, vocal, orphanage*

Intan Maulina, S.Pd, M.S

Linguistics and city : City view in a poetry

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Vol. 1 No. 2. Halaman 131 - 138

Literature and the City have a very romantic relationship, which is why many literary works are motivated by the problems in urban society. They are not only about human problems, but also the description of the city itself. In general this paper aims to get a potrait of how social and cultural changes influenced by the urbanism within the people in a city. Specifically, the literary works which are discussed in this paper are poems written by Isbedy Stiawan ZS. There are six poems discussed six representing problems arising from the author's nearest environment. This paper also proofs that literary works function as an important medium to criticize the depeloment and change of the society life in urban setting.

Keywords : urban literature, Indonesian literature, poetry, modernism

Arolina Sidauruk

The Influence Of Leadership Style, Working Motivation, And Working Discipline To Employee Perfotmance In Pematangsiantar Government

KEBIJAKAN, Jurnal Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, Vol. 1 No. 2. Halaman 139 – 144

The adoption of a decentralized system provides substantial authority in the regions to develop the capacity of local governments in administering government affairs through capacity building of apparatus resources. Nevertheless, the success lies in the role of a leader, especially the head of the region or the head of the region. The style or behavior of the leadership of a regional head or regional head will greatly affect the service to improve the quality of public services considering in the current era of reform, the more intelligent and critical society in seeing and responding and mensikapi all forms of public service implementation that must be given by the government to the community. For example an authoritarian style to subordinates in public organizations as well as to society is obviously unsuitable. Not to mention the attention directed to Motivation and work discipline on the performance of employees in order to achieve the expected results. This study was conducted to photograph the Influence of Leadership Style, Work Motivation and Work Discipline on Employee Performance In Pematangsiantar City Government.

Keywords : style of leadership, motivation, discipline work

¹Robert Tua Siregar, ²Benny Simatupang dan ³Dermawan Perangin-angin

Analysis Of Green Open Space Development Policy In Pematangsiantar City

This study aims to determine the extent of Green Open Space (RTH) Public currently available in the City Pematangsiantar and know the needs and management of development of Green Open Space Green Open Space (RTH) Public in accordance with the demands of Law Number 26 Year 2007 in Pematangsiantar City. This research uses this type of research including qualitative and quantitative data. Where included in this type of qualitative data is, the physical condition of the study location, government policy in managing public green space, quantitative data, ie data that describes the condition of the research location with tabulation of numbers - numbers that can be calculated to determine the desired value by using a simple calculation method . In this study which includes the type of quantitative data that is, the extent of green open space, population and population development. The results showed that, the availability of Open Space Green Public became the entry point in assessing the success of development of a region / region. The role of Open Space Green is inseparable from the various functions that encompass it, namely ecological, social, economic, and aesthetic functions. Based on the findings of research on the availability of existing public green open space in Pematangsiantar City is only 2.621,93 Ha (32,78 %) of the total Pematangsiantar City reaching 79,971 Km²

Keywords : green open space, role function, and urban land use.



KEBIJAKAN

VOL. 1 NO. 2, Juni 2018

DAFTAR ISI

Penguatan Partisipasi Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Pembangunan Daerah <i>(Marto Silalahi)</i>	91 -100
Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Terhadap Kualitas Pelayanan Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar Tahun 2017 <i>(¹Chintani Sihombing, ²Jumadiyah Wardati dan ³Debora Saragih)</i>	101 - 108
Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Tidak Memiliki BPJS Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017 <i>(¹Eka Saudur Sihombing dan ²Juliana R. Damanik)</i>	109 - 116
Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Yang Memiliki Bayi 12-24 Bulan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini Tahun 2017 <i>(¹Pinondang Hotria Siregar dan ²Eulis Susanti)</i>	117 -124
Pelatihan Vokal Dasar Anak-Anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar <i>(¹Jubelando O Tambunan dan ²Deswidya Sukrisna Hutauruk)</i>	125 - 130
Sastra Dan Kota : Pandangan Kota Dalam Puisi <i>(Intan Maulina)</i>	131 - 138
Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Pemerintah Kota Pematangsiantar <i>(Arolina Sidauruk)</i>	139 - 144
Analisis Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pematangsiantar <i>(¹Robert Tua Siregar, ²Benny Simatupang, dan ³Dermawan Perangin-angin)</i>	145 - 153

PENGUATAN PARTISIPASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

(INCREASING PARTICIPATION OF NEIGHBORHOOD ASSOCIATIONS AND CITIZENS ASSOCIATION IN LOCAL DEVELOPMENT)

Marto Silalahi

Dosen Kopertis Wilayah Sumatera Utara dpk STIE Sultan Agung Pematangsiantar
Jl.Surabaya No. 19 Pematangsiantar
martolinsondan@yahoo.co.id

Diterima : 25 April 2018; Direvisi 4 Juni 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Kehadiran partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan modal sosial (*social capital*) mendampingi sumber daya daerah lainnya. Sebagai objek dari produksi pemerintahan maka wajar bila masyarakat memberikan masukan, kritik dan pendapat terkait kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah. Keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) tersebut adalah wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat analisa konseptualitas keberadaan organisasi kemasyarakatan RT dan RW dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif berdasarkan pendapat para ahli yang kompeten. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan kegiatan RT dan RW dalam membantu pemerintahan desa/kelurahan.

Kata kunci : partisipasi, rukun tetangga dan warga, penguatan organisasi

ABSTRACT

The participation of society in developing a local area is a social capital to other rural resources. As an object of governmental production, it is common if society participate and suggest good advice, critics and opinion relating to governmental activities, development and civilization, which is done by local government. The presence of Neighborhood Association (RT) and Administrative Unit (RW) as unit of collecting social participation in many governmental activities in district area. To strengthen the organization of neighborhood association (RT) and administrative unit (RW), it is important to conduct research aimed to improve analytical conceptual of social organization, such as RT/RW in governmental activities, development and civilization. The method used in this research is investigating and analyzing description method based on competent expert opinion. This research is expected to give advice to strengthen RT/RW in helping local government.

Keywords : *participation, neighborhood association and administrative unit, empowering organization*

PENDAHULUAN

Kehadiran kinerja maksimal pemerintahan merupakan operasionalisasi percepatan pencapaian kebutuhan pemangku kepentingan dengan maksimal. Komponen suprastruktur pemerintahan baik dari tingkatan rukun tetangga sampai dengan pemerintahan daerah (kabupaten/kota dan provinsi) memberikan kontribusi besar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penguatan komponen pemerintahan akan memberikan energi besar dalam keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah. Kuantitas dan kualitas kebutuhan pemangku kepentingan masyarakat merupakan grand desain produk pemerintahan baik barang/jasa maupun kegiatan civil administratif lainnya. Peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah meningkatkan kuantitas dan kualitas program dan kegiatan lainnya dengan mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas yang maksimal.

Partisipasi pemangku kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan sehingga optimalisasi pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tingkatan kelurahan, dikenal dengan organisasi kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga. Kehadiran organisasi kemasyarakatan itu dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga pencapaian program dan kegiatan pemerintah kelurahan efektif mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki kelurahan. Kehadiran rukun tetangga dan rukun warga adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat di suatu kelurahan untuk mempercepat pencapaian tujuan dari suatu kegiatan yang direncanakan pemerintahan kelurahan.

Untuk menganalisa penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW dapat diamati proses kelahirannya baik apakah RT/RW itu adalah seutuhnya dibidangi masyarakat untuk menunjukkan partisipasinya atau pemerintah membantu proses kelahirannya dengan melegitimasi melalui norma perundangan yang berlaku. Sebagai contohnya adalah pada Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga, bahwa pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga berdasarkan norma perundangan. Hal itu mengandung makna

bahwa kelahiran Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam keberhasilan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berada di wilayah Desa/Kelurahan.

Contoh berikutnya adalah pada Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain disebutkan bahwa Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. Sedangkan Rukun Warga disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan, oleh karena itu sangat di butuhkan pembinaan kepada instansi yang paling terdekat dengan masyarakat agar tujuan awal pembentukan yang bermaksud dan bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan bisa berjalan dengan baik.

Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan kelurahan, maka tugas dan fungsi rukun tetangga dan rukun warga disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Formalisasi organisasi kemasyarakatan (RT/RW) berdasarkan norma perundangan daerah (misalnya peraturan daerah) akan memberikan dampak besar karena RT/RW itu mendapatkan legalitas formal dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya untuk membantu dan memperkuat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.

Dilematika legalitas organisasi RT/RW akan memberikan dampak besar bagi kontribusi partisipasi organisasi RT/RW dalam kegiatan pemerintahan Kelurahan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang dilakukan. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan misalnya, apakah saran pendapat organisasi RT/RW menjadi suatu kebutuhan/keharusan dalam mengusulkan rencana kegiatan kelurahan. Akan muncul banyak pertanyaan bila legalitas formal organisasi RT/RW belum diperkuat dalam peraturan daerah. Sebagai contoh, dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, apakah organisasi RT/RW dilibatkan dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan setapak di lingkungan kerja RT/RW, dalam kegiatan pengawasan pembangunan, apakah saran pendapat perbaikan RT/RW menjadi salah satu bahan kajian perbaikan dari pemerintahan kelurahan atau kecamatan.

Pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal masyarakat. Sebagai tingkatan terendah organisasi yang berhadapan dengan masyarakat, maka wajar bila organisasi RT/RW dikelola dengan maksimal sehingga kontribusi partisipasinya mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berkaitan dengan perubahan yang dihadapi masyarakat, Sutomo (2010:51) mengatakan bahwa “Masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, tuntutan kebutuhan juga meningkat sejalan dengan tuntutan perubahan tersebut. Masalah sosial seringkali muncul dari kegagalan masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya dan juga dapat terjadi karena kegagalan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya (*social maladjustment*). Melalui usaha pengembangan maka masyarakat diharapkan akan mempunyai kemampuan antisipasi yang lebih baik terhadap proses perubahan tersebut.

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Peningkatan kewenangan organisasi RT/RW menjadi diskusi panjang bila ada keinginan menjadikannya suatu organisasi formal legalistik. Sebagai contoh, dalam norma perundangan (misalnya peraturan daerah) mencantumkan keharusan bahwa adanya persyaratan surat keterangan (atau nomenklatur lain) dari RT/RW bila masyarakat hendak mengurus suatu layanan administratif (misalnya surat keterangan miskin) kepada pemerintahan kelurahan/kecamatan. Penguatan atau pengembangan kewenangan RT/RW tersebut bukan dimaksudkan untuk memperpanjang alur mata rantai birokrasi pemerintahan, namun dimaksudkan untuk memperkuat dan memperjelas kelengkapan administrasi (*Strong Administration Behavioral*).

Berkaitan dengan kemandirian pengelolaan kewenangan daerah (Supriyono, 2010: 35) Kemandirian dalam pengelolaan

kewenangan dapat terwujud apabila memenuhi beberapa prinsip, yaitu :

- a. Stigler principle. Pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkatan terendah pemerintahan yang konsisten dengan tujuan efisiensi alokasi sumber daya.
- b. Principle of fiscal equivalency. Keselarasan batasan politik dengan kemanfaatan atau keuntungan yang diperoleh, untuk itu diperlukan kejelasan yurisdiksi untuk setiap layanan publik.
- c. Correspondence Principle. Kejelasan yurisdiksi yang berhubungan dengan kewenangan pusat dan daerah menyangkut penyediaan setiap barang publik untuk semua lapisan masyarakat secara memuaskan.
- d. Decentralization theorem. Setiap pelayanan publik harus disediakan dengan batasan terbatas, kelembagaan dan biaya layanan.
- e. Subsidiarity Principle. Belanja dan fungsi regulasi harus berada pada tingkatan pemerintahan daerah.

Kemandirian pengelolaan kewenangan organisasi RT/RW masih bergantung kepada pemerintah kelurahan dan kecamatan. Oleh karena itu adalah wajar bila penguatan partisipasi sinergis RT/RW membutuhkan perjuangan untuk ditingkatkan peranan dan fungsinya. Bagaimana penguatan pengelolaan kewenangan RT/RW masih membutuhkan dukungan politik (norma perundangan), dukungan sosiologis dan psikologis (kesediaan tingkatan pemerintahan kelurahan/desa menerima kenyataan) dan faktor lainnya. Keberadaan organisasi RT/RW berada langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga kebutuhan, tuntutan dan aspirasi masyarakat sangat diketahui pengurus RT/RW itu sendiri. Lingkungan organisasi RT/RW langsung membawahi keluarga secara langsung. Situasi dan kondisi setiap keluarga dari anggota masyarakat dapat diketahui dengan lengkap oleh pengurus organisasi RT/RW. Kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan misalnya, akan merekam dan mencatat kebutuhan, tuntutan dan aspirasi setiap keluarga. Untuk itu informasi kebutuhan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah kelurahan akan dapat secara langsung dilihat, diamati dan dirasakan juga pengurus organisasi RT/RW. Mendekatkan pelayanan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat (melalui keluarga) akan

terlihat dengan jelas dan lengkap pada anggota masyarakat atau keluarga. Sebagai contoh, pemberian beras miskin akan diketahui dengan lengkap dan benar oleh pengurus organisasi RT/RW.

Penguatan dan atau pengembangan organisasi RT/RW dirasakan sangat diperlukan sehubungan dengan perkembangan kebutuhan anggota masyarakat (keluarga). Untuk itu, akan muncul berbagai pendapat dan saran, misalnya apakah perlu diperkuat tugas, fungsi dan kewenangan organisasi RT/RW, apakah perlu dibuatkan norma perundangan (UU, PP, Perda atau yang lainnya) untuk memperkuat kedudukan dan kewenangannya, apakah perlu ditempatkan aparat daerah sebagai pengurus RT/RW, apakah perlu diberikan anggaran dan sarana lainnya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi RT/RW dan sebagai pertanyaan lainnya. Untuk memperkuat partisipasi organisasi RT/RW dalam pembangunan daerah perkotaan, maka optimalisasi tugas, fungsi dan kewenangannya menjadi indikator keberhasilan kegiatan organisasi RT/RW.

Berkaitan dengan indikator keberhasilan pemberdayaan organisasi dalam kegiatannya, Wrihatnoko dan Dwidjowijoto (2007:9) mengatakan bahwa "Pemberdayaan mempunyai indikator keberhasilan, yaitu : 1) Akses. Berarti target yang diberdayakan pada akhirnya untuk mengembangkan diri. 2) Partisipasi. Berarti target yang diberdayakan dapat berpartisipasi mendayagunakan resources yang diakses. 3) Kontrol. Target yang diberdayakan mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan resources yang diakses. 4) Kesetaraan. Pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, target mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah."

Bagaimana akses RT/RW menginformasikan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan kepada anggota masyarakat adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab bila hendak memberdayakan tugas dan kewenangan organisasi RT/RW. Apakah RT/RW diberikan kewenangan untuk memberikan informasi dan komunikasi sinergis, apakah RT/RW diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan pemerintahan, dan sebagainya adalah bentuk pertanyaan yang muncul dari indikator keberhasilan pemberdayaan RT/RW itu sendiri. Akses organisasi RT/RW sangat

dibutuhkan untuk memperkuat percepatan pencapaian visi dan misi daerah.

Harus diakui bahwa keberadaan RT/RW merupakan organisasi non formal sehingga program dan kegiatannya mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat. Namun harus diakui juga bahwa keberadaan RT/RW memiliki sumbangan besar kepada keberhasilan pemerintahan kelurahan/kecamatan mencapai kebutuhan anggota masyarakat baik barang dan jasa yang diproduksi pemerintahan. Memformalisasikan organisasi RT/RW menurut struktur organisasi pemerintahan akan mengalami kesulitan baik norma perundangan maupun sumber daya yang mendukungnya. Keanggotaan RT/RW berasal dari anggota masyarakat dalam suatu wilayah atau suatu lingkungan. Proses pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan lainnya merupakan daya kreasi masyarakat dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sosial kontrol merupakan sumber daya daerah dalam memperkuat pencapaian visi dan misi daerah. Keberdayaan organisasi RT/RW memberikan kecepatan, ketepatan, kelancaran dan kemudahan pelayanan pemerintahan kelurahan/kecamatan. Sebagai bagian dari masyarakat, keberadaan organisasi RT/RW merupakan sosial kapital dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk memperkuat dan mempercepat pencapaian program dan kegiatan pemerintahan (desa/kelurahan dan kecamatan), keberdayaan RT/RW sangat membutuhkan pendampingan dari pemerintahan (desa/kelurahan/kecamatan) dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, dengan demikian maka program dan kegiatan pemerintahan dapat mencapai sasaran yang maksimal.

Keberadaan organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki sumbangan besar dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan baik desa/kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Pada tingkatan pemerintahan desa/kelurahan, keberadaan RT dan RW menjadi sangat penting karena organisasi ini langsung berhadapan dengan kehidupan anggota masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan berada dalam wilayah/lingkungan yang sama.

Berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, Gillin dalam (Soekanto, 2007: 187) mengatakan bahwa terdapat beberapa tipe lembaga kemasyarakatan, yaitu :

- a. Crescive institutions merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan.
- b. Enacted institutions merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga perdagangan.
- c. Basic institutions merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.
- d. Unsanctioned institutions merupakan kelompok yang ditolak oleh masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemerias.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pencapaian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diprogram pemerintah desa/kelurahan atau kecamatan. Kehadiran organisasi kemasyarakatan menjadi modal sosial bagi tambahan modal daerah lainnya. Kehadiran pemangku kepentingan daerah sebagai sumber masukan informasi maka kelengkapan dan kejelasan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat akan semakin maksimal. Operasionalisasi kegiatan organisasi perangkat daerah akan bersinergisasi dengan kegiatan organisasi kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Mengadministrasikan kegiatan masyarakat baik pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, adalah bentuk kegiatan organisasi kemasyarakatan RT/RW, misalnya baik jumlah penduduk yang miskin, jumlah masyarakat yang menderita penyakit tertentu, jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat miskin dan sebagainya) dan kegiatan memberikan masukan dalam musrenbang desa/kelurahan.

METODE

Untuk mengetahui pendapat masyarakat atau organisasi kemasyarakatan RT dan RW yang berkaitan dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan yang berada di wilayah Desa/Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitik berdasarkan kepada pendapat ahli yang berkompeten. Metode teori dasar (Grounded Theory) digunakan untuk menemukan fenomena utama dari penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW itu atau memperkuat teori yang digunakan dalam menganalisa keberadaan organisasi kemasyarakatan RT/RW itu, kemudian dibuatkan kesimpulan yang menjadi dasar membentuk prinsip dasar dalam suatu teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah karena sumbangan atau kontribusi masyarakat akan memberikan kemudahan dan kecepatan pencapaian tujuan kehadiran pemerintahan baik mendekati pelayanan ataupun efektivitas pelayanan pemerintahan. Fenomena kehadiran partisipasi pemangku kepentingan daerah menjadi fenomena umum yang menarik dibahas sebagai bahan kajian dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pertumbuhan kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat karena itu produktivitas produk pemerintahan baik pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan. Produktivitas pemerintahan yang bersifat civil services yang monopolistik menjadi grand strategi aktualisasi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Sebagai contohnya adalah pembangunan jembatan, pembangunan puskesmas, pembangunan gedung sekolah, dan sebagainya adalah program dan kegiatan pemerintah dalam memenuhi tugas dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan norma perundangan baginya.

Kemampuan mengaktualisasi kebutuhan, tuntutan, aspirasi dan pendapat masyarakat membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan daerah. Kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memiliki keterbatasan sumber daya daerah. Karena itu adalah wajar bila partisipasi pemangku kepentingan menjadi modal besar dan penting dalam mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan kehadiran pemerintahan itu sendiri.

Berkaitan dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Lopulisa dan Alam (dalam Safi'i, 2009:53) mengatakan sebagai berikut :

Pilihan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak langsung ikut membangkitkan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan sumbangan yang diberikan oleh anggota yang tergabung dalam organisasi. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menguntungkan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sedangkan tujuan utama pembangunan daerah adalah penguatan kelembagaan lokal, yang berkelanjutan (sustainability) dari generasi ke generasi berikutnya.

Penguatan kelembagaan lokal menjadi modal besar daerah dalam mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Partisipasi kelembagaan lokal (RT/RW) adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat mensukseskan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sebagai organisasi kemasyarakatan, keberdayaan organisasi RT/RW akan terlihat dari berbagai kegiatan mengadministrasikan berbagai kebutuhan masyarakat. Kegiatan RT/RW dalam bidang pemerintahan dapat dilihat mengadministrasikan jumlah penduduk miskin, mengadministrasikan kebutuhan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, mengadministrasikan jumlah penduduk berdasarkan alamat dan sebagainya. Kegiatan RT/RW dalam bidang pembangunan dapat dilihat dari mengadministrasikan usulan pembangunan jalan setapak antar gang, mengadministrasikan usulan pembangunan dari anggota masyarakat, dan sebagainya. Kegiatan RT/RW dalam bidang kemasyarakatan dapat dilihat dari mengadministrasikan kegiatan seni budaya masyarakat yang ada, mengadministrasikan kegiatan menyambut hari kemerdekaan dan sebagainya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan RT/RW sudah dikenal sejak dahulu, misalnya RT/RW sudah dikenal pada jaman penjajahan Jepang. Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai, dan bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Mengorganisasi anggota masyarakat dengan suatu tujuan tertentu adalah hakekat kelahiran suatu organisasi. Begitu pula kelahirannya RT/RW sebagai organisasi

kemasyarakatan dibentuk untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Sjafrizal (2014:135) mengatakan sebagai berikut :

Untuk dapat meningkatkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan haruslah dilakukan secara partisipatif (participatory planning). Musyawarah perencanaan pembangunan perlu dilakukan sebaik mungkin dengan melibatkan para tokoh dan pemuka masyarakat. Melalui Musrenbang semua kritikan dan masukan para tokoh masyarakat harus diakomodasi sebaik mungkin pada waktu melakukan perbaikan rancangan dokumen perencanaan setelah dilakukan musrenbang tersebut.

Keberadaan partisipasi masyarakat merupakan modal besar bagi pencapaian visi dan misi daerah sehingga tujuan kehadiran pemerintahan dan mendekatkan pemerintahan akan tercapai dengan maksimal. Partisipasi masyarakat yang dilakukan anggota masyarakat yang duduk dalam kepengurusan RT/RW akan menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut memberikan sumbangan atau kontribusi besar dalam pembangunan daerah baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahapan pengawasan. Dari oleh untuk rakyat adalah fenomena menarik dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Penguatan fungsi dan kewenangan organisasi kemasyarakatan RT/RW akan memberikan sumbangan besar dan berarti dalam keberhasilan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan tingkatan partisipasi masyarakat, Wilcox (dalam Dwiyanto,dkk, 2006:189) mengatakan bahwa "Level partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu : (1) pemberian informasi; (2) Konsultasi; (3) Pembuatan keputusan bersama; (4) Melakukan tindakan bersama; (5) Mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat." Kehadiran partisipasi masyarakat akan meningkatkan daya saing dan daya dorong percepatan pencapaian visi dan misi daerah. Penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW merupakan sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pengurus dan keanggotaan RT/RW dapat memberikan

sumbangan atau kontribusinya mulai pemberian informasi kegiatan pembangunan apa saja yang dapat dilakukan, memberikan saran dan masukan bersifat dua arah atas kegiatan pembangunan tersebut melalui analisa SWOT, pengurus dan keanggotaan RT/RW menetapkan kegiatan pembangunan fisik apa yang dibutuhkan masyarakat, masyarakat berpartisipasi melakukan gotong-royong atau padat karya atas kegiatan fisik jembatan misalnya, dan masyarakat berpartisipasi bukan hanya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, tapi juga masyarakat turut menjaga pembangunan fisik yang telah terlaksana dengan maksimal.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan (misalnya RT/RW) adalah lembaga yang berada dan berkembang dalam masyarakat dan memiliki sumbangan besar dalam mensukseskan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berkaitan dengan pembangunan kelembagaan, Eaton (dalam Suharto, 2016:83) mengatakan bahwa “Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial. (b) menetapkan, mengembangkan dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungan tersebut.”

Pembangunan lembaga kemasyarakatan menjadi sangat penting karena sumbangannya akan terlihat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan lembaga RT/RW mengandung makna bahwa semua komponen organisasional dibangun dengan memperhatikan efektivitas pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Partisipasi masyarakat sebagai modal sosial daerah, maka penguatan atau pembangunan lembaga yang berada di daerah harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan daerah terkhususnya organisasi perangkat daerah.

Kebutuhan masyarakat pada tahun tertentu akan tergambar dari program dan kegiatan pemerintahan yang dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kegiatan organisasi kemasyarakatan membutuhkan sinergisasi dengan kegiatan

pemerintahan daerah. Dengan demikian koordinasi kegiatan pembangunan yang sinergis akan mendorong terciptanya hubungan pemerintahan yang serasi, selaras dan seimbang. Perubahan nilai juang kerja (visi dan misi organisasional lembaga) akan memberikan tambahan nilai (added value) dari percepatan pencapaian visi dan misi daerah sebagai amanat peraturan daerah.

Perubahan dalam arti pembangunan lembaga kemasyarakatan (misalnya RT/RW) akan menghasilkan energi kinetik yang besar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah secara komprehensif dan integralistik. Formalisasi lembaga kemasyarakatan adakalanya mendorong dan mempercepat kegiatan pemerintahan daerah namun adakalanya dikatakan sebagian orang memasung hak ulayat kemandirian organisasi kemasyarakatan. Fenomena formalisasi organisasi kemasyarakatan menjadi bahan diskusi menarik bagi berbagai kalangan akademisi atau pun kalangan praktisi. Penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW melalui legalisasi dalam norma perundangan (misalnya peraturan daerah, peraturan pemerintah dan sebagainya) telah dilakukan sejak lama. Bahkan keberadaan organisasi RT/RW berada dalam lingkungan desa/kelurahan.

Perubahan organisasi RT/RW diutamakan dalam perubahan pada pola sikap, perilaku dan tindakan nyata (kinerja berdasarkan profesionalitas, akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi) akan memberikan dampak besar bagi aktualisasi program dan kegiatan daerah. Keberdayaan organisasi RT/RW dapat dilihat dari keberdayaan dari lingkungan internal pengurus dan anggota RT/RW dan dukungan dari lingkungan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan organisasional RT/RW itu sendiri. Faktor fungsionalisasi, faktor normatif dan sumber daya lainnya merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam penguatan partisipasi organisasi kemasyarakatan RT/RW. Merencanakan, melaksanakan dan pengawasan dari setiap fungsi dan kewenangan RT/RW sesuai dengan prinsip organisasi modern seperti konsep weberian, akan memberikan sumbangan partisipasi sinergis bagi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Faktor legitimasi atau normatif adalah keberadaan landasaan yuridis formal sehingga organisasi kemasyarakatan

RT/RW memiliki legal standing dalam aktualisasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kehadiran organisasi kemasyarakatan RT/RW memiliki makna penting terkait dengan keberadaan lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal anggota masyarakat yang adalah juga pengurus organisasi RT/RW. Lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui situasi dan kondisi kehidupan masyarakat adalah unsur utama betapa pentingnya peranan dan kedudukan organisasi RT/RW itu sendiri. Lebih dekat dengan kehidupan masyarakat mengandung makna bahwa situasi kehidupan ekonomi, sosial budaya, pekerjaan dan sebagainya adalah pertemuan sehari-hari yang terjadi antara anggota masyarakat dengan organisasi RT/RW. Lebih tahu situasi dan kondisi masyarakat mengandung makna bahwa peristiwa atau kegiatan sekecil apapun organisasi RT/RW pasti mengetahui karena ruang hidup atau wilayah tempat tinggalnya adalah sama.

Mendekatkan pelayanan dan pelayanan maksimal adalah fenomena kehadiran era otonomi daerah. Pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi grand strategi program dan kegiatan daerah. Merencanakan kebutuhan masyarakat melalui menjangkau aspirasi masyarakat dengan media musrenbang adalah kegiatan pemerintahan yang perlu dimaksimalkan pencapaiannya. Perkembangan situasi dan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal masyarakat mendorong pemerintah mengeluarkan grand policy sehingga pemecahan masalah sosial kemasyarakatan dapat diselesaikan dengan komprehensif. Berkaitan dengan perubahan sosial, Sutomo (2010:24) mengatakan sebagai berikut :

Proses perubahan untuk memecahkan masalah sosial atau untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih diharapkan dapat dilakukan negara dan oleh masyarakat sendiri. Negara semestinya merupakan pihak yang responsif terhadap keberadaan masalah sosial, oleh karena perwujudan kesejahteraan setiap warganya adalah merupakan tanggungjawab dan peran penting negara. Di lain pihak, masyarakat sendiri juga akan merespons kondisi yang disebut masalah sosial. Oleh karena pada dasarnya setiap orang sebagai warga masyarakat mengharapkan kondisi kehidupannya berkembang semakin baik.

Perubahan sosial kemasyarakatan merupakan suatu keniscayaan karena lingkungan internal dan eksternal mengalami perkembangan. Perkembangan kebutuhan masyarakat juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, pertanian dan perkembangan lainnya. Perkembangan organisasi kemasyarakatan RT/RW juga mengalami perkembangan seturut perkembangan berbagai faktor di atas. Partisipasi masyarakat melalui organisasi RT/RW akan mengalami perkembangan sesuai dengan kepedulian dan kepercayaan serta era teknologi digitalisasi (transparansi). Perubahan organisasi RT/RW dapat diperkuat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan organisasi perangkat daerah. Penguatan atau pembangunan organisasi kemasyarakatan harus dimaknai bahwa efektivitas pencapaian kebutuhan dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi menjadi persyaratan utama. Sinergisasi hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat adalah subjek dan objek dari kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah daerah.

Memperkuat daya dukung dan nilai tambah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah proses berkelanjutan dari kinerja maksimal pemangku kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan penguatan masyarakat dalam pembangunan daerah, Sadyohutomo (2008:80) mengatakan sebagai berikut :

Adapun strategi pemberdayaan rakyat yang dapat dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) Penguatan rakyat sebagai individu (enabling) dalam aspek ekonomi, sosial dan politik ; (2) Penguatan tatanan kemasyarakatan (institusional strengthen) menuju masyarakat yang berbudaya (civil society) ; (3) Penguatan nilai-nilai budaya asli yang positif, seperti toleransi, gotong-royong, keterbukaan, kerja keras, dan hemat, dipadukan dengan budaya modern positif, seperti berpikir rasional, jangka panjang dan dinamis ; (4) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

Penguatan partisipasi pemangku kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan individu anggota masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi yang ada.

Penguatan kontribusi nyata organisasi RT/RW dapat menjadi salah satu pilihan meningkatkan nilai tambah dari modal sosial dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberdayaan institusional atau organisasi RT/RW tidak terlepas dari keberdayaan individu anggota masyarakat dan keberdayaan pemangku kesejahteraan lainnya. Konsep gotong-royong, kerja sama dan musyawarah serta kearifan lokalitas lainnya adalah modal sosial dalam penguatan organisasi kemasyarakatan. Nilai tambah dan daya saing adalah elemen utama dalam proses peningkatan kualitas partisipasi organisasi kemasyarakatan RT/RW. Kemampuan mengelolah sumber daya sosial terhadap penguatan organisasi RT/RW adalah strategi kekuatan daerah sehingga optimalisasi pencapaian visi dan misi tidak terhambat hanya keterbatasan sumber daya daerah.

KESIMPULAN

Memperkuat nilai tambah dan daya saing menjadi unsur penting yang harus terus menerus diperjuangkan baik kegiatan individu, kelompok maupun organisasional. Kegiatan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya daerah akan dapat mengaktualisasi pencapaian tujuan dari program dan kegiatan organisasi perangkat daerah. Perkembangan atau pertumbuhan kebutuhan manusia dan organisasi menjadi faktor penting bagi penguatan sumber daya daerah termasuk kinerja maksimal pemangku kepentingan daerah lainnya. Kebutuhan penguatan organisasi kemasyarakatan (misalnya RT/RW) merupakan salah satu strategi kebijakan daerah mengatasi keterbatasan sumber daya kewilayahan.

Efektivitas penguatan organisasi kemasyarakatan melaksanakan tugas dan kewenangannya dan efisiensi penggunaan sumber daya kewilayahan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam kebijakan penguatan atau pembangunan organisasi kemasyarakatan. Mendekatkan pelayanan dan memaksimalkan pelayanan adalah tema sentral yang dijadikan persyaratan utama dalam penguatan organisasi kemasyarakatan (termasuk RT/RW). Memahami penguatan atau pembangunan organisasi kemasyarakatan dapat diamati dari dimensi subjek dan objek penguatan itu, bagaimana penguatan atau pembangunan organisasi kemasyarakatan tersebut dapat efektif dan efisien, dan

bagaimana kemanfaatan dari kegiatan penguatan atau pembangunan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Dari ketiga aspek tersebut dapat disarikan bahwa kehadiran organisasi RT/RW yang berasal dari kearifan lokal akan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

SARAN

1. Penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan daerah, khususnya pemerintah daerah. Penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW dimaknai bahwa tugas dan fungsionalisasi pekerjaannya menjadi elemen utama dalam penguatan atau pembangunan organisasi RT/RW.
2. Penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW memperhatikan kearifan lokalitas sehingga kinerjanya tetap mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas.
3. Penguatan organisasi kemasyarakatan RT/RW membutuhkan modernisasi organisasional seperti dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus (editor), 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Jogjakarta : UGM Pres.
- Gibson, James L., John F. Ivanceich and James H. Donnelly, JR. 1996. *Organisasi, Perilaku, struktur dan Proses*. Terjemahan Nunuk Adriani. Jakarta : Bina Aksara.
- Istianto HP, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jogjakarta : UPP AMP YKPN
- Ratminto dan Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Jogjakarta : PT. Pustaka Pelajar
- Safi'i. H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Averroes Press.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah. Realita dan Tantangan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sjafrizal. 201. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi daerah : Jakarta : Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Radjagrafindo Persada.

Soetomo. 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suhartono, Didik. G. 2016. Membangun Kemandirian Desa. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.

Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Supriatna, Tjahja. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Bandung : Humaniora Press.

Supriyono, Bambang. 2010. “Pemerintahan Daerah berbasis masyarakat multikultural” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Malang : Universitas Brawijaya, 28 April 2010.

Usman, Husaini. 2009. Manajemen. Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.

Wrihatnolo, Randi R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

KEPUASAN PASIEN PENGGUNA BPJS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS BAH BIAK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017

(SATISFACTION OF BPJS PATIENTS TO COMMUNITY HEALTH CENTER BAH BIAK SERVICES IN PEMATANGSIANTAR YEAR 2017)

¹Chintani Sihombing, ²Jumadiah Wardati dan ³Debora Saragih

Staf Pengajar Universitas EFARINA Pematangsiantar Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar
cintani03@gmail.com

Diterima : 25 Mei 2018; Direvisi 16 Juni 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan, maka fungsi pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberi kepuasan pasien. Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen (pasien) terhadap tingkat pelayanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan rancangan *Cross sectional study* dengan jumlah populasi pasien peserta BPJS sebanyak 1.687 dan sampel sebanyak 94 responden yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan analisis statistik dengan menggunakan *Uji Chi Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan Bukti Fisik (Tangibles) (p value = 0,024), kehandalan (Reliability) (p value = 0,002), Daya tanggap (Responsiveness) (p value = 0,043) terhadap dimensi Kualitas Pelayanan, dan tidak terdapat hubungan kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan jaminan (Assurance), empati (Empaty) dimana (p value > α 0,05) terhadap dimensi kualitas pelayanan. Disarankan bagi pihak Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar untuk meningkatkan lagi Kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar pasien puas dengan pelayanan yang diberikan.

Kata kunci : kualitas pelayanan, kepuasan pasien BPJS

ABSTRACT

The increasing public demand for the quality of health services, then the service function needs to be improved to provide patient satisfaction. Quality of service is a form of consumer assessment (patient) on the level of service received with the level of service expected. This study aims to determine the satisfaction of BPJS users of the quality of health care service Bah Biak Pematangsiantar. This study used cross sectional study design with total population of BPJS participants as many as 1.687 and a sample of 94 respondents determined by purposive sampling technique by conducting interviews using questionnaires. The research results are presented in the form of frequency distribution tables and statistical analyzes using Chi Square Test. The results showed that there were patient satisfaction of BPJS user based on Physical Tangible (p value = 0,024), reliability (p value = 0,002), Responsiveness (p value = 0,043) to Service Quality dimension, and there is no relationship of patient satisfaction BPJS user based

on Assurance, Empaty where ($p \text{ value} > \alpha 0,05$) to service quality dimension. It is suggested for the health center of Bah Biak Pematangsiantar to improve the quality of BPJS Health service so that the patient is satisfied with the services provided.

Keywords : service quality, patient satisfaction BPJS

PENDAHULUAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu Negara salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Profil Kesehatan RI, 2015). Menurut penelitian yang dilakukan Devi Herlina dkk (2015) bahwa Kondisi kesehatan di Indonesia terbilang buruk, hal tersebut bisa dilihat dari *Life Expectationat birth* atau umur harapan hidup waktu lahir masyarakat Indonesia yang masih rendah. Penyebab buruknya aspek kesehatan di Indonesia adalah tidak meratanya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan dalam aspek kesehatan sangat sulit dicapai di Indonesia mengingat kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau yang membuat pembangunan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah tertentu masih sangat kurang. Mengatasi hal tersebut pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan tingkat kesempurnaan penampilan pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan (Azwar dalam Dinik Retnowati, 2008).

Pengguna jasa pelayanan kesehatan di puskesmas menuntut pelayanan yang berkualitas tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara fisik akan tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan kenyamanan (Khusnawati, 2010). Pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan kepuasan pada pasien. Pelayanan yang diberikan harus berkualitas dan memenuhi lima dimensi yaitu: *tangibles, reliability, resvonsiveness, assurance, dan emphaty* (Fahriadi, 2007).

Berdasarkan survey pendahuluan pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017 yang dilakukan di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar dengan mewawancarai beberapa pegawai Puskesmas dan pasien Rawat jalan, dimana petugas menyatakan bahwa jumlah kunjungan pasien yang relatif tidak stabil dan cenderung menurun perbulannya, sebagai pasien yang terdata melakukan kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut. Beberapa kendala atau keluhan yang dirasakan oleh mereka mengenai pelayanan BPJS pengguna kartu BPJS Kesehatan tersebut berkaitan dengan tidak sistematisnya waktu mengantri dalam pelayanan BPJS yang dilakukan, kurangnya sarana fisik yang membuat pelayanan BPJS kurang maksimal. Dari adanya program BPJS ini malah mengakibatkan kualitas pelayanan BPJS menurun karena banyaknya aturan baru yang membuat pelayanan tidak maksimal, seperti ada beberapa resep obat yang harus di beli di luar puskesmas. Terbatasnya fasilitas BPJS Kesehatan ini kurang menunjang pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar. Kemudian keluhan berkaitan dengan pemberian I SEP

(Surat Elegibilitas Peserta) kepada pasien. Sehingga pemeriksaan hanya bisa dilakukan di satu jenis pelayanan saja.

Berdasarkan penelitian Sondang Siagian (2012) bahwa aspek kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien rawat inap. Permasalahan yang membuat belum optimalnya pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas karena pelayanan kesehatan khususnya kepada pengguna BPJS Kesehatan seringkali mengandung keluhan seperti pelayanan medis, pelayanan obat-obatan, pelayanan administrasi dan pembuatan surat rujukan yang belum memuaskan (Lina, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap kualitas jaminan pelayanan di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar tahun 2017.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien pengguna BPJS yang datang ke Puskesmas Bah Biak sebanyak 1678 orang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan

sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiono , 2016). Besar sampel ditentukan sesuai dengan rumus Slovin yakni :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{1678}{1 + 1678(0,1^2)}$$

$$n = \frac{1678}{17.78}$$

$$n = 94$$

Instrumen penelitian atau alat ukur yang akan digunakan untuk pengumpulan data ini berupa kuesioner. Analisa Data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat persentase data yang terkumpul yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (Univariat) dan untuk melihat hubungan kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap kualitas Pelayanan menggunakan Uji *Chi Square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Berdasarkan Bukti Fisik (Tangibles) di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar

Kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap Bukti Fisik di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar dapat diketahui seperti pada tabel.1 berikut ini :

Tabel 1. Kepuasan Pasien Pengguna BPJS berdasarkan Tangibles di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar

<i>Tangibles</i>	Kepuasan Pasien				Total		<i>P value</i>
	Puas		Tidak Puas				
	N	%	N	%	N	%	
Baik	21	51.2	20	48.8	41	100.0	0,024
Tidak Baik	14	26.4	39	73.6	53	100.0	

Berdasarkan tabel.1 dapat dilihat nilai $p(0,024) < \alpha (0,05)$, yang artinya ada hubungan

kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan bukti fisik terhadap kualitas pelayanan

Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi bukti langsung yang diberikan Puskesmas ke pasien, maka akan semakin tinggi pula kepuasan pasiennya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa ada kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan bukti fisik di Puskesmas Gunung Pati Semarang dengan nilai p (0,003).

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (2005) mengemukakan Bukti Fisik (*Tangible*) merupakan suatu pelayanan yang tidak terlihat, dan tidak bisa diraba, maka aspek *tangible* menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan, pelanggan akan menggunakan indra penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Menurutnya,

tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi suatu instansi untuk mengetahui seberapa jauh aspek *tangible* yang paling tepat, yaitu memberikan pandangan yang positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Muninjaya, 2012).

Gambaran Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Berdasarkan Keandalan (*Reliability*) terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar.

Kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan keandalan (*Reability*) terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar dapat diketahui seperti pada tabel. 2 berikut ini :

Tabel 2. Kepuasan Pasien Pengguna BPJS berdasarkan Keandalan (*Reability*) di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar

<i>Reliability</i>	Kepuasan Pasien				Total		<i>P value</i>
	Puas		Tidak Puas				
	N	%	N	%	n	%	
Baik	34	45.9	40	54.1	74	100.0	0,002
Tidak Baik	1	5.0	19	95.0	20	100.0	

Berdasarkan tabel. 2 diperoleh nilai p (0,002) < α (0,05), hal ini berarti terdapat hubungan kepuasan pasien Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan keandalan terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa ada kepuasan pasien pengguna BPJS Puskesmas Gunung Pati Semarang berdasarkan keandalan dengan nilai p (0,020).

Peneliti mengasumsikan bahwa ini dikarenakan Keandalan (*Reliability*) atau kemampuan yang diberikan oleh SDM (sumber daya manusia) di Puskesmas untuk memberikan pelayanan tepat waktu dan akurat

sesuai dengan yang ditetapkan masih kurang, selain itu petugas kesehatan kadang tidak selalu siap pada saat diperlukan. Oleh karena itu, keandalan petugas Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien yang datang berkunjung.

Gambaran Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Berdasarkan Daya Tanggap (*Responsivness*) terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar.

Kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap Daya Tanggap (*Responsiveness*) di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar dapat diketahui seperti pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Kepuasan Pasien Pengguna BPJS berdasarkan Daya Tanggap (*Responsivness*) di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar

<i>Responsivness</i>	Kepuasan Pasien				Total		<i>P value</i>
	Puas		Tidak Puas		n	%	
	N	%	N	%			
Baik	26	46.4	30	53.6	56	100	0,043
Tidak Baik	9	23.7	29	76.3	38	100	

Berdasarkan tabel.3, diperoleh nilai p (0,043) < α (0,05), bahwa terdapat hubungan kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan daya tanggap (*Responsiveness*) di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa ada kepuasan pasien BPJS Puskesmas Gunung Pati Semarang berdasarkan daya tanggap dengan nilai p (0,033).

Kepuasan berdasarkan daya tanggap dirasakan pasien dimana pelayanan yang selalu dilakukan tepat waktu, tenaga medis yang cepat memberikan informasi dan selalu ada sesuai jadwal. Azwar (1996) menyatakan bahwa terselenggaranya pelayanan kesehatan yang sangat diharapkan juga petugas dapat bersedia memberi perhatian yang cukup kepada pasien tanpa ada perbedaan, mendengar semua keluhan pasien.

Daya tanggap (*Responsiveness*) merupakan kesediaan petugas medis maupun non medis untuk memberikan pelayanan yang cepat sesuai prosedur dan mampu memenuhi

harapan pasien. Daya tanggap apabila petugas selalu untuk memberikan bantuan kepada pasien dalam hal pemberian informasi dan sistem pelayanan yang tidak menyusahkan pasien (Supranto, 2002). Hal ini didukung oleh pernyataan Handi Irawan D (Budiarto 2015) ada sepuluh jenis Kepuasan pelanggan yang membahas tentang 5 dimensi Kualitas Pelayanan, dan *Responsiveness* merupakan kualitas pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu.

Gambaran Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Berdasarkan Jaminan (*Asurancness*) terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar.

Kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap Jaminan (*Asurancness*) di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar tahun 2017 dapat diketahui seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Kepuasan Pasien Pengguna BPJS berdasarkan Jaminan (*Asurancness*) di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar tahun 2017

<i>Asurancness</i>	Kepuasan Pasien				Total		<i>P value</i>
	Puas		Tidak Puas		n	%	
	N	%	n	%			
Baik	26	44.1	33	55.9	59	100	0,119
Tidak Baik	9	25.7	26	74.3	35	100	

Berdasarkan tabel. 4, diperoleh nilai nilai $p (0,119) > \alpha (0,05)$, hal ini berarti tidak terdapat tingkat kepuasan pasien pengguna BPJS berdasarkan Jaminan di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada kepuasan pasien pengguna BPJS Puskesmas Gunung Pati Semarang berdasarkan jaminan dengan nilai $p (0,164)$. Dalam hal ini petugas haruslah memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti keinginan pasien yang sangat mengharapkan perhatian yang lebih dan perlakuan yang ramah dari petugas. Kesopanan dalam memberikan pelayanan menjadi hal yang penting karena dengan demikian pasien dapat memberikan nilai yang baik kepada petugas. Dengan demikian maka pasien akan merasa nyaman atas pelayanan yang diterima (Muninjaya, 2014).

Peneliti berasumsi bahwa tingkat Jaminan atau rasa aman serta kenyamanan pasien tercipta karena adanya kepercayaan terhadap petugas yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan sehingga pasien memperoleh jaminan pelayanan yang aman dan nyaman. Oleh sebab itu semakin

tinggi tingkat rasa aman yang dirasakan oleh pasien ketika mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas maka tinggi juga tingkat kepuasan yang dirasakannya. Dimensi Jaminan (*Ansurance*) berada pada kategori persentase baik sehingga kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar dilihat dari dimensi Jaminan (*Ansurance*) dinilai sudah berkualitas, keseluruhan dimensi Jaminan (*Ansurance*) sudah baik dengan kata lain pelayanan sudah berkualitas. Kejujuran dalam hal pelayanan, pelayanan dilaksanakan secara tuntas dan menyeluruh, keramahan dan kesopanan dalam melayani, serta komunikasi yang efektif dan memberikan pengobatan yang tepat juga mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Gambaran Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Berdasarkan Empati (*Empathy*) terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar.

Kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap Empati (*Empathy*) di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar tahun 2017 dapat diketahui seperti pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Kepuasan Pasien pengguna BPJS berdasarkan Empati (*Empathy*) di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar.

<i>Empathy</i>	Kepuasan Pasien				Total	<i>P value</i>	
	Puas		Tidak Puas				
	N	%	n	%	n	%	
Baik	19	32.2	40	67.8	59	100	0,276
Tidak Baik	16	45.7	19	54.3	35	100	

Berdasarkan tabel.5, diperoleh nilai $p (0,276) > \alpha (0,05)$, hal ini berarti tidak ada kepuasan pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Empati di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar. Tingkat kepuasan pasien menyatakan kurang puas dalam hal memberikan kemudahan dalam pelayanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan Dewi (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada kepuasan pasien BPJS Puskesmas Gunung Pati Semarang berdasarkan empati dengan nilai $p (0,623)$.

Menurut Wiyono (2008) yang mengatakan untuk pasien dan masyarakat, kepuasan akan kualitas pelayanan berarti empati, respek, dan tanggap akan kebutuhan, pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan

mereka diberikan dengan cara yang ramah pada waktu mereka berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian sikap petugas kesehatan ramah dan sopan dalam menangani setiap keluhan pasien sesuai. Sikap petugas yang ramah dan baik dalam memberikan pelayanan dapat menjadi penentu dari kesembuhan seorang pasien, sebaliknya sikap petugas yang kasar dan tidak acuh dapat mengurangi kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterimanya.

Gambaran Kepuasan Pasien Pengguna BPJS terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar.

Kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap Kualitas Pelayanan di Puskesmas Bah Biak Kota Pematangsiantar tahun 2017 dapat diketahui seperti pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Kepuasan Pasien BPJS berdasarkan Kualitas Pelayanan BPJS di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar

Mutu Pelayanan	Kepuasan Pasien				Total		P value
	Puas		Tidak Puas		n	%	
	N	%	N	%			
Baik	24	47.1	27	52.9	51	100	0,033
Tidak Baik	11	25.6	32	74.4	43	100	

Berdasarkan tabel 6. Dapat dilihat bahwa dari 51 responden menyatakan kualitas pelayanan yang baik, 24 orang (47%) diantaranya menyatakan puas, dari 43 orang menyatakan pelayanan tidak baik, 32 (74.4%) orang diantaranya menyatakan tidak puas.

Dengan melakukan uji Chi Square diperoleh nilai $p=0.033$ ($p<0.05$), maka terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan pasien BPJS terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2015) yang menyatakan adanya hubungan kualitas pelayanan BPJS dengan kepuasan pasien di Puskesmas dengan nilai p (0,01).

Kepuasan pasien BPJS terhadap kualitas pelayanan Puskesmas secara keseluruhan menunjukkan belum dapat memenuhi harapan-harapan pasien akan pelayanan yang bermutu dan berkualitas baik dalam segala keperluan atau kebutuhan yang diperlukan oleh pasien selain itu petugas puskesmas harus lebih ramah dalam memberikan informasi yang akurat. Kualitas pelayanan merupakan tentang memuaskan (bila kenyataan yang diterima sama dengan pelayanan yang diharapkan pasien) dan tidak memuaskan (bila kenyataan

pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan) (Parasuraman, 2001)

KESIMPULAN

Kepuasan Pasien pengguna BPJS berdasarkan kusioner yang diberikan kepada responden terhadap pelayanan kesehatan secara umum pasien puas. Dilihat kepuasan berdasarkan bukti Fisik (*Tangible*) (p value= 0,024), Keandalan (*Reliability*) (p value= 0,002), Daya Tanggap (*responsiveness*) (p value= 0,043) bahwa terdapat kepuasan pasien pengguna BPJS terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar tahun 2017. Namun pada kepuasan berdasarkan Jaminan (*Insurance*) (p value= 0,119), Empati (*Empathy*) (p value= 0,276) tidak terdapat kepuasan pasien pengguna BPJS di Puskesmas Bah Biak Pematangsiantar.

SARAN

Dalam peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas hendaknya Dinas Kesehatan dalam hal ini Pimpinan Puskesmas dapat berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan dengan memberikan dukungan

kepada petugas pelayanan, meningkatkan fasilitas yang ada di puskesmas (peralatan dalam pemeriksaan, ruang tunggu, penampilan dan kondisi setiap ruangan), sehingga petugas kesehatan dapat meningkatkan kinerja (kehandalan, profesionalisme) pelayanan di Puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Azrul. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Binarupa Aksara; Jakarta

Dewi, 2015. *Analisis pengaruh tingkat kualitas Pelayanan jasa puskesmas terhadap Kepuasan pasien*. Semarang, Universitas Diponegoro.

Fahriadi, 2007. Upaya Peningkatan Mutu dan Pelayanan di Rs diantara tuntutan social dan industry bisnis.
<http://rsudraza.banjarkab.go.id/?pageid=11>.
Diakses 29 Juli 2017.

Herlina, Devi, dkk, 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Bpjs terhadap pelayanan Bpjs (studi kasus penggunaan Bpjs yang berkunjung ke Dokter keluarga/Apotek di Kabupaten Sleman tahun 2015)*. <http://digilib.unimus.ac.id> di akses 30 Juli 2017.

Khusnawati. 2010. *Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Dipuskesmas Aeng Towa Kabupaten Takalar*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Lina, P,R,M, 2015. kualitas pelayanan bpjs kesehatan (badan penyelenggara jaminan sosial) di puskesmas kota wilayah utara kota Kediri. Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* <http://www.jurnalkesmas.ac.id> di akses 5 november 2016.

Muninjaya,A,A, 2012. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. jakarta: EGC.

Parasuraman, dkk, 2005. SERVEQUAL: A Multiple Item Scule Electronic Service Quality. *Jurnal Of Service Research*.

Parasuraman, A. Valerie, 2001. (Diterjemahkan oleh Sutanto) *Delivering Quality Service*. The Free Press, New York.

Retnowati, Dinik. 2008. *Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bringin Kabupaten Semarang (Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat)*. Semarang: Universitas Diponegoro

Siagian, Sondang (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara: Jakarta

Sugiono, p. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supranto, 2001. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Rineka CiptaWijono. (2008). *Manajemen Mutu Rumah Sakit dan Kepuasan Pasien*. Surabaya: CV.Duta Prima Airlangga

GAMBARAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELUARGA TIDAK MEMILIKI BPJS MANDIRI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SINGOSARI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017

(DESCRIPTION OF FACTORS INFLUENCING FAMILY TO NOT HAVING INDEPENDENT BPJS IN WORKING AREA OF SINGOSARI COMMUNITY HEALTH CENTER IN PEMATANGSIANTAR YEAR 2017)

¹Eka Saudur Sihombing dan ²Juliana R. Damanik

Staf Pengajar Universitas EFARINA Pematangsiantar Jl. Sudirman No.8 Pematangsiantar
eka_sihombing@rocketmail.com

Diterima : 25 April 2018; Direvisi 30 Mei 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi rendahnya cakupan kepemilikan asuransi kesehatan pada masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan tentang SJSN dimana kepesertaannya bersifat wajib. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui Gambaran Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Tidak Memiliki BPJS Mandiri Di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang tidak menjadi peserta BPJS Mandiri sebanyak 1.065 KK dan sampel sebanyak 92 KK dengan menggunakan Rumus Slovin. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan, pengetahuan, penghasilan, jumlah anak terhadap ketidakpemilikan BPJS Mandiri, tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan lainnya terhadap ketidakpemilikan BPJS Mandiri. Diharapkan pihak Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dan BPJS meningkatkan Sosialisasi tentang BPJS kepada masyarakat.

Kata kunci : faktor-faktor yang mempengaruhi, ketidak pemilikan BPJS mandiri

ABSTRACT

One of the government policies in overcoming the low coverage of health insurance ownership in the community is the Regulation on SJSN where membership is mandatory. This research is descriptive, with the aim to know the description of factors influencing the family does not have BPJS Mandiri in working area of Singosari Public Health Center Pematangsiantar City Year 2017. Population in this research is family which not participant BPJS Mandiri of 1,065 families and samples are 92 households taken with Slovin formula. Methods of collecting data by interview and using questionnaires. The result of the research are known that there is influence between education, knowledge, income, number of children to non-ownership of BPJS Mandiri, there is no influence between the ownership of other health insurance against the non-ownership of BPJS Mandiri. It is expected that the City Health Office of Pematangsiantar and BPJS to improve the socialization of BPJS to the community.

Keywords : factors affecting, non-ownership of BPJS mandiri

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2013, disebutkan data kepemilikan jaminan kesehatan untuk Askes Sosial 6,0%, Jamsostek 4,4%, Askes Swasta 1,7%, Tunjangan perusahaan 1,7%, Jamkesmas 28,9%, Jamkesda 9,6 %, dan yang tidak memiliki jaminan kesehatan adalah 50,5 %. (Riskesdas, 2013) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, salah satu prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Tahapan kepesertaan menuju Kepesertaan Semesta sampai tahun 2019 ditargetkan semua penduduk Indonesia menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Dari data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Pusat bahwa untuk kepesertaan BPJS Kesehatan terhitung sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 adalah berjumlah 178.384.288 jiwa.

Data Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Pematangsiantar sampai Bulan Desember 2017 adalah 186.061 jiwa dari jumlah penduduk 249.505 jiwa dengan rincian Peserta Non PBI 72.958 jiwa, PBI 75.353 jiwa dan Mandiri 37.750 jiwa. Dan dari Puskesmas Singosari yang terdiri 16.334 jiwa penduduk yang menjadi anggota BPJS Kesehatan di daerah wilayah Puskesmas Singosari adalah 11.001 jiwa (2.593 KK) dengan rincian peserta Non PBI berjumlah 3.662 jiwa dan mandiri 2.530 jiwa dan PBI berjumlah 4.809 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa di wilayah Puskesmas Singosari persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan adalah 67,35%. Sehingga dapat dikatakan capaian kepemilikan jaminan kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari masih rendah.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan BPJS mandiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 orang yang tidak menjadi peserta BPJS Mandiri. Sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan Metode Accidental Sampling. Besar sampel ditentukan sesuai dengan rumus Slovin.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berupa kuesioner (daftar pertanyaan) tentang

pendidikan, pengetahuan, penghasilan, jumlah anak, kepemilikan jaminan kesehatan lainnya serta ketidakpemilikan BPJS Mandiri.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa univariat untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel.

HASIL

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang ada, yang memiliki persentase tertinggi adalah responden dengan pendidikan rendah (SD dan SMP) sebanyak 45 orang atau 48.9 %.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
Rendah (SD, SMP)	45	48.9
Menengah (SMA)	41	44.6
Tinggi (D3, S1)	6	6.5
Total	92	100,0

Distribusi Responden Menurut Pengetahuan

Dari tabel.2 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang ada yang memiliki persentase tertinggi adalah responden dengan pengetahuan cukup dengan jumlah sebanyak 68 orang atau 73,9 %.

Dikatakan bahwa responden memiliki pengetahuan baik jika dapat menjawab pertanyaan lebih dari 75%, cukup jika dapat menjawab pertanyaan 60-75 % dan rendah jika dapat menjawab pertanyaan di bawah 60 %.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Baik	6	6,5
Cukup	68	73,9

Kurang	18	19,6
Total	123	100,0

Distribusi Responden Berdasarkan Pernah Mendapat Informasi BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari tabel.3 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang ada pernah mendapat informasi tentang BPJS dengan jumlah sebanyak 92 orang atau 100 %.

Tabel 3. Hasil analisis distribusi responden menurut cakupan IDL

Pernah Mendapat Informasi BPJS	Frekuensi	Presentase (%)
Ya	92	100
Tidak	0	0
Total	92	100,0

Distribusi Responden Menurut Sumber Informasi di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari 3 sumber informasi yang didapat responden tentang BPJS maka persentase terbesar adalah sumber informasi teman/keluarga, dengan persentase 81,5, %. Sementara persentase terkecil adalah informasi dari Petugas Kesehatan dengan persentase 18,5% seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Gambaran Distribusi Responden Menurut Sumber Informasi di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Sumber Informasi	Ya		Tidak		Total	
	N	%	N	%	N	%
Petugas Kesehatan	17	18,5	75	81,5	92	100
Teman / Keluarga	75	81,5	17	18,5	92	100
Media (TV, Koran, Radio)	26	28,3	66	71,7	92	100

Distribusi Responden Menurut Pertanyaan Pengetahuan BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari 12 pertanyaan tentang pengetahuan maka persentase terbesar adalah pertanyaan tentang Tanggal batas akhir pembayaran premi perbulannya, dengan persentase 92,4 %. Sementara persentase terkecil adalah pertanyaan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional, dengan persentase 13 % pada tabel 5.

Tabel 5. Gambaran Distribusi Responden Menurut Pertanyaan Pengetahuan BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Pertanyaan	Benar		Salah		Total	
	N	%	N	%	N	%
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional	12	13	80	87	92	100
Manfaat asuransi kesehatan	84	91,3	8	8,7	92	100
Syarat pendaftaran peserta BPJS	76	82,6	16	17,4	92	100
Pembayaran premi bagi Peserta ditentukan oleh	54	58,7	38	41,3	92	100
Kepesertaan BPJS oleh Seluruh anggota keluarga	81	88	11	12	92	100
Masa aktif kartu BPJS dapat dinikmati peserta	20	21,7	72	78,3	92	100
Tanggal batas akhir pembayaran premi perbulannya	85	92,7	7	7,6	92	100
Hak pelayanan kesehatan yang diterima peserta	43	46,7	49	53,3	92	100
Peserta BPJS yang bisa menikmati peningkatan	62	67,4	30	32,6	92	100

kelas perawatan						
Fasilitas yang membedakan tingkatan kelas dalam BPJS	21	22,8	71	77,2	92	100
Pelayanan kacamata dan pemasangan gigi palsu merupakan pelayanan yang ditanggung BPJS	80	87	12	13	92	100
Peserta BPJS Membayar biaya persalinan kepada fasilitas kesehatan yang menolong persalinannya	74	80,4	18	19,6	92	100

Distribusi Penghasilan Responden

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang ada, maka yang memiliki persentase tertinggi adalah responden dengan penghasilan rendah yaitu sebanyak 63 orang atau 68,5 %.

Dimana jika penghasilan rendah dengan penghasilan di bawah UMR, sedangkan penghasilan tinggi di atas UMR.

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017.

Jumlah Penghasilan	Frekuensi	Persentase
Tinggi	29	31,5
Rendah	63	68,5
Total	92	100

Distribusi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Responden

Dari 4 alasan tidak menjadi peserta BPJS Mandiri yang didapat dari responden maka persentase terbesar adalah alasan syarat mendaftar yang rumit dengan persentase 62, %. Sementara persentase terkecil adalah pelayanan kesehatan yang belum memuaskan dengan persentase 19,6%.

Tabel 7. Gambaran Distribusi Responden Menurut Alasan Tidak Menjadi Peserta BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017.

Tidak Alasan Menjadi Peserta BPJS Mandiri	Ya		Tidak		Total	
	N	%	N	%	N	%
Biaya premi bulanan terlalu mahal	54	58,7	38	41,3	92	100
Syarat mendaftar yang rumit	57	62	35	38	92	100
Antrian pasien di puskesmas/RS terlalu panjang 30	30	32,6	62	67,4	92	100
Pelayanan Kesehatan yang belum memuaskan	18	19,6	74	80,4	92	100

Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Lainnya di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa dari 92 responden yang ada, yang memiliki persentase tertinggi adalah responden yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya yaitu sebesar 86 orang atau 93,5 %.

Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Lainnya di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017.

Kepemilikan Jamkes Lainnya	Frekuensi	Persentase
Ada	6	6,5
Tidak	86	93,5
Total	92	100

PEMBAHASAN

Gambaran Pengaruh Faktor Pendidikan dengan Ketidakepemilikan BPJS Mandiri Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Ketidakpemilikan BPJS Mandiri keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017, dari 92 responden 48,9% berpendidikan rendah.

Menurut Azwar (2009), Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap. Pendidikan dapat meningkatkan kematangan intelektual seseorang. Kematangan intelektual ini berpengaruh pada wawasan, cara berfikir, baik dalam cara pengambilan keputusan maupun dalam pembuatan kebijakan. Semakin tinggi pendidikan semakin baik pengetahuan tentang kesehatan.

Menurut Lofgren, dkk dalam Handayani (2013), pendidikan mempengaruhi persepsi risiko, derajat keengganan menerima risiko dan persepsi terhadap besarnya kerugian. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin bertambah pengetahuan dan kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan, yang selanjutnya meningkatkan keinginan untuk asuransi kesehatan.

Menurut Sakinah, dkk (2014) terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi kesehatan di Kelurahan Poris Gaga Tangerang. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga mampu menimbulkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam berasuransi kesehatan. Menurut data dari BPJS Kesehatan Surakarta sampai dengan bulan April 2014 bahwa dari beberapa desa di Surakarta, maka Desa Mojosongo Kecamatan Brebes merupakan desa dengan cakupan peserta BPJS tertinggi. Dan dari hasil analisa yang dilakukan bahwa distribusi tingkat pendidikan tinggi (SMA, Diploma I, Strata III) lebih besar dari pada tingkat pendidikan rendah (SMP dan tidak sekolah) di Desa Mojosongo. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan mempengaruhi keinginan untuk ikut BPJS. (Purwandari, dkk 2014).

Menurut Rohmawati (2014), terdapat hubungan pendidikan dengan pemilihan jenis iuran peserta JKN Mandiri.

Dalam penelitiannya dikatakan bahwa responden dengan pendidikan dasar cenderung memilih jenis iuran kelas III. Sementara responden dengan pendidikan tinggi cenderung memilih jenis iuran kelas I.

Dari hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari, dapat dilihat bahwa semakin rendah pendidikan, maka keinginan untuk menjadi peserta BPJS Mandiri semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin rendah pendidikan seseorang, maka kurang mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat asuransi, sehingga menimbulkan kesadaran yang rendah dalam berasuransi kesehatan. Pendidikan meningkatkan kematangan intelektual seseorang. Dengan kematangan intelektual seseorang mempengaruhi wawasan, cara berpikir dan cara pengambilan keputusan, khususnya dalam hal ini menjadi peserta BPJS Mandiri. Dari sebagian responden yang memiliki pendidikan tinggi ada yang tidak mau menjadi peserta BPJS mandiri. Hal ini disebabkan karena responden memiliki asuransi kesehatan swasta (komersil), sehingga enggan untuk menjadi peserta BPJS Mandiri.

Gambaran Faktor Pengetahuan dengan Ketidakpemilikan BPJS Mandiri Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari hasil analisis univariat bahwa ada pengaruh faktor pengetahuan dengan ketidakpemilikan BPJS Mandiri keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017, dari 92 responden 73,9% berpengetahuan cukup. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku jika didasari dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Sebaliknya apabila perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.

Menurut Tyas (2014), terdapat hubungan antara Pengetahuan dengan sikap kepala keluarga terhadap program JKN. Responden yang memiliki pengetahuan yang baik, cenderung untuk mendukung Program JKN. Sementara responden yang memiliki pengetahuan kurang dan cukup cenderung untuk tidak mendukung Program JKN. Menurut Noviansyah, dkk dalam Rohmawati (2014), bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan Kepemilikan BPJS Mandiri. Responden dengan pengetahuan yang baik cenderung memiliki BPJS Mandiri.

Dari hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari, dapat dilihat bahwa jika pengetahuan masyarakat kurang, maka keinginan untuk menjadi peserta BPJS Mandiri semakin kecil. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang diperoleh dari hasil pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan aspek pokok untuk menentukan perilaku seseorang untuk menyadari atau tidak mampu untuk mengatur perilakunya sendiri. Perilaku baru yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran, cenderung bersifat langgeng dibandingkan dengan perilaku baru yang tidak didasari pengetahuan dan kesadaran. Selain itu, keterpaparan dengan media komunikasi akan berhubungan dengan kadar pengetahuannya.

Berdasarkan sumber informasi yang diterima responden dapat disampaikan bahwa informasi dari teman atau keluarga mempunyai nilai paling tinggi yaitu 81,5 %, dari Media (TV, Koran, Radio) sebanyak 28,3 %, dan dari petugas kesehatan hanya 18,5 %. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tiaraningrum (2014) bahwa peran teman/keluarga memang masih kental dalam budaya Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam kepesertaan JKN di daerah Mojongso, Kota Surakarta terbukti meningkat oleh karena mendapat informasi keluarga (35,3%), dan karena ajakan orang lain (32%). Peneliti lain yang mendukung, bahwa peranan media massa terkait sosialisasi JKN oleh pemerintah dan pihak terkait cukup berhasil dalam meneruskan kebijakan pemerintah untuk mendorong perbaikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan (Jahang B. S., 2008).

Kenyataan yang peneliti dapatkan di lapangan pengetahuan masyarakat yang cukup ternyata tidak menjadi faktor yang mutlak, masih banyak faktor-faktor lain yang berhubungan seperti pemahaman, kepercayaan dan penilaian seseorang terhadap suatu objek yang dimiliki masyarakat tentang JKN, masyarakat yang berpenghasilan rendah berpendapat bahwa setiap jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dari Pemerintah selayaknya mereka dapatkan secara gratis untuk membantu dalam persoalan kesehatan masyarakat.

Dari sebagian responden ada yang memiliki pengetahuan tinggi, tetapi tidak berminat menjadi peserta BPJS Mandiri. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan mengenai kerugian yang diperoleh bila

menjadi peserta jaminan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan yang lambat/lama, pelayanan kesehatan yang kurang lengkap, dilayani dengan kurang ramah. Selain itu ada juga penyebabnya dikarenakan adanya kesulitan dalam mengurus administrasi untuk pendaftaran, pengobatan maupun pengklaiman. Adanya pengalaman yang kurang memuaskan dari orang lain tentang manfaat pelayanan BPJS juga merupakan salah satu penghambat seseorang menjadi peserta BPJS.

Hal ini juga didukung oleh penelitian tentang kesiapan pekerja sektor informal (sopir truk kontainer) dalam membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan sopir truk dengan keanggotaan BPJS. Sebagian besar subjek penelitian memiliki pengetahuan yang kurang tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga responden lebih memilih untuk membayar perobatan dari pada harus menggunakan jaminan kesehatan.

Gambaran Pengaruh Faktor Penghasilan dengan Ketidakpemilikan BPJS Mandiri Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari hasil analisis univariat bahwa ada pengaruh faktor penghasilan dengan keanggotaan BPJS Mandiri keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017, dari 92 responden 68,5% berpenghasilan rendah. Tingkat pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas masyarakat setiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat, diukur dengan pendapatan per kapita yang masih rendah, mungkin bisa dikatakan penyebab utama rendahnya masyarakat dalam berasuransi kesehatan.

Asuransi kesehatan adalah produk yang dibeli untuk mengantisipasi kerugian jika terjadi risiko. Karena pendapatan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah maka kebutuhan perlindungan asuransi tidak tergolong sebagai kebutuhan primer. Masyarakat yang membelinya masih terbatas pada masyarakat dengan pendapatan tinggi. Golongan ini adalah golongan usia muda yang profesional atau golongan masyarakat usia produktif.

Pada Penelitian Gunistiyo (2006) tentang tingkat kesadaran berasuransi masyarakat kota Tegal bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi. (Sakinah, 2014).

Dari hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari dapat dilihat bahwa jika penghasilan masyarakat rendah, maka keinginan untuk menjadi peserta BPJS Mandiri semakin kecil.

Penghasilan merupakan pendapatan yang diperoleh oleh seseorang dari hasil kerjanya setiap bulan. Jika penghasilan yang diperoleh oleh seseorang rendah, maka asuransi kesehatan bukanlah menjadi hal prioritas dalam kehidupannya. Karena menganggap bahwa asuransi kesehatan bukanlah merupakan kebutuhan pokok. Akan tetapi jika penghasilan seseorang semakin tinggi, maka keinginan untuk memiliki asuransi kesehatan semakin tinggi. Karena semakin tinggi penghasilan seseorang, merasa bahwa asuransi kesehatan merupakan suatu kebutuhan dalam memberi jaminan kesehatan baginya dan keluarganya. Dari sebagian responden terdapat yang memiliki penghasilan yang tinggi tapi tidak menjadi peserta BPJS. Hal ini disebabkan karena memiliki asuransi kesehatan swasta (komersil) yang preminya jauh lebih besar, sehingga merasakan manfaat pelayanan kesehatan lebih baik, sehingga tidak mau menjadi peserta BPJS.

Gambaran Pengaruh Faktor Jumlah Anak dengan Ketidakpemilikan BPJS Mandiri Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari hasil analisis univariat bahwa ada pengaruh faktor jumlah anak dengan ketidakpemilikan BPJS Mandiri keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017, dari 92 responden 57,6% mempunyai jumlah anak >2 orang (besar).

Dari hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari dapat dilihat bahwa jika semakin besar jumlah anak, maka keinginan untuk menjadi peserta BPJS Mandiri semakin kecil. Hal ini dikaitkan dengan Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatakan

bahwa peserta perorangan harus mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya kedalam program JKN. Dengan bertambah banyak jumlah anak, maka semakin besar iuran yang harus dibayarkan, sehingga mengurangi minat masyarakat menjadi peserta BPJS Mandiri.

Gambaran Pengaruh Faktor Kepemilikan Jaminan Kesehatan Lainnya dengan Ketidakpemilikan BPJS Mandiri Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017

Dari hasil analisis univariat bahwa tidak ada pengaruh faktor kepemilikan jaminan kesehatan lainnya dengan ketidakpemilikan BPJS Mandiri keluarga di Kota Pematangsiantar Tahun 2017, dari 92 responden 93,5% tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya.

Dari hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Singosari dapat dilihat bahwa masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya cenderung tidak mau mengikuti BPJS Mandiri. Sementara masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan swasta yang cenderung tidak mau mengikuti BPJS Mandiri, adalah sebagian besarnya merupakan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar iuran setiap bulan.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan seseorang tidak mau menjadi peserta BPJS Mandiri adalah karena adanya informasi dari pengalaman orang lain yang tidak memuaskan tentang manfaat pelayanan kesehatan dari asuransi BPJS itu sendiri. Dari sebagian responden yang memiliki asuransi kesehatan swasta tidak memiliki minat menjadi peserta BPJS. Hal ini disebabkan karena responden enggan menggunakan pelayanan kesehatan publik, yang dianggap kurang memuaskan dibanding pelayanan kesehatan swasta.

KESIMPULAN

1. Distribusi responden persentasi tertinggi pada pendidikan rendah (SD dan SMP) sebanyak 45 orang atau 48,9 %, umur kategori dewasa madya (40-60 tahun) sebanyak 55,4 %, pengetahuan cukup sebanyak 68 orang (73,9%), pernah mendapat informasi tentang BPJS sebanyak 92 orang (100%), sumber informasi Teman/Keluarga 81,5%, pertanyaan tentang Tanggal batas akhir pembayaran premi

perbulannya, dengan persentase 92,4 %, penghasilan rendah yaitu sebanyak 63 orang atau 68,5 %, jumlah anak besar (> 2) sebanyak 53 orang (57,6 %), alasan biaya premi bulanan yang terlalu mahal 57%, tidak memiliki jaminan kesehatan lainnya yaitu sebesar 86 orang (93,5 %).

2. Terdapat pengaruh faktor pendidikan, pengetahuan, penghasilan, jumlah anak terhadap keinginan keluarga terhadap ketidakepemilikan BPJS Mandiri keluarga di wilayah kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017.
3. Tidak terdapat pengaruh faktor kepemilikan jaminan kesehatan lainnya terhadap ketidakepemilikan BPJS Mandiri keluarga di wilayah kerja Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar Tahun 2017.

SARAN

1. Diharapkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar agar semakin meningkatkan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bekerjasama dengan instansi terkait, yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.
2. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar lebih memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai dari kepesertaan, pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) sampai kepada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit provider BPJS Kesehatan.
3. Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Dinas terkait mendorong Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar untuk menyediakan anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmito, Wiku. 2012. *Sistem Kesehatan. Edisi Pertama*. Jakarta : Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. 2017. *Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan Kota Pematangsiantar Tahun 2015*. [Online] Dari <https://siantarkota.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/66> [Diakses : 6 Juli 2017].

Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. 2016. *Grafik Peserta JKN Per 1 Juli 2017*. [Online] Dari <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/jumlahPeserta> [Diakses : 6 Juli 2017].

Handayani, dkk. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Masyarakat Membayar Iuran Jaminan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Online]. Dari http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2013/05/pustakaunpad_faktor_faktor_yang_mempengaruhi_kemauan_masyarakat.pdf [Diakses: 10 Mei 2017].

Hermanto, 2014. Kesiapan Pekerja Sektor Informal (Sopir Trukcontainer) Dalam Membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Semarang [Online] dari http://eprints.dinus.ac.id/6658/1/jurnal_13741.pdf [Diakses : 13 Juni 2017].

Rohmawati, 2014. Hubungan Pengetahuan Sikap Dan Sosial Ekonomi Dengan Pemilihan Jenis Iuran Keikutsertaan JKN Mandiri Pada Wilayah Cakupan JKN Tertinggi Di Surakarta. [Online] dari <http://eprints.ums.ac.id/32416/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> [Diakses : 14 September 2017].

Tyas, 2014. Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Kepala Keluarga Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. (Online) dari http://perpusnu.web.id/karyailmiah/documents/3624/Ika_Ayuning_Tyas (Diakses : 14 September 2017).

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU YANG MEMILIKI BAYI 12-24 BULAN DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARTINI TAHUN 2017

(THE RELATIONSHIP OF MOTHER'S KNOWLEDGE AND BEHAVIOR THOSE HAVING BABY 12-24 MONTHS WITH BASIC COMPLETE IMMUNIZATION GIVING IN WORKING AREA OF COMMUNITY HEALTH CENTER KARTINI YEAR 2017)

¹Pinondang Hotria Siregar dan ²Eulis Susanti

Staf Pengajar Universitas EFARINA Pematangsiantar Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar
Pinondang_aja@yahoo.co.id

Diterima : 25 April 2018; Direvisi 7 Juni 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Program imunisasi merupakan satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu, terutama yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, seperti bayi dan anak usia sekolah. Ibu adalah orang yang berperan besar dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kelengkapan imunisasi anak. Cakupan tinggi rendahnya kelengkapan imunisasi di suatu daerah diduga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap ibunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Pengetahuan dan Sikap ibu yang memiliki bayi 12- 24 bulan dengan pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di wilayah kerja Puskesmas Kartini Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Waktu penelitian dilaksanakan Bulan Agustus 2017 Wilayah Kerja Puskesmas Kartini, yaitu Kelurahan Simarito dan Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kota Pematangsiantar. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi berusia 12-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini sebanyak 123 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan dianalisis menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap (nilai $p = 0,610$). Begitu juga tidak ada hubungan antara sikap ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap (nilai $p = 0,541$). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan sikap ibu bukan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelengkapan imunisasi. Ibu yang memiliki pengetahuan tinggi dan sikap positif tidak melengkapi imunisasi pada anaknya karena pengalaman yang kurang memuaskan, sikap dan perilaku petugas yang kurang memotivasi pemberian imunisasi, penyuluhan yang rendah dan kesulitan untuk membawa anaknya untuk diimunisasi.

Kata kunci : imunisasi, pengetahuan dan sikap ibu

ABSTRACT

Immunization program is an effort to protect the population against certain diseases, especially those considered vulnerable to infectious diseases, such as infants and school-age children. Mother is a person who plays a major role in decision-making to meet the completeness of childhood immunization. High coverage of the low completeness of immunization in an area may be influenced by the knowledge and attitude of the mother. The purpose of this study is to know the relationship Knowledge and Attitudes of mothers who have babies 12 to 24 months with the provision of Basic Immunization Complete (BIC) in the work area Puskesmas Kartini Year 2017. This research is quantitative research using cross sectional research design. The time of the research was conducted in August 2017 Working Area of Puskesmas Kartini, Simarito and Sipinggol-Pinggol Urban Village Pematangsiantar. The population is all mothers

who have babies aged 12-24 months in the work area of Kartini health center as many as 123 people. Data were collected through questionnaire and analyzed using Chi Square test. The results showed that there was no correlation between mother knowledge with complete basic immunization (p value = 0,610). There is also no relationship between mother's attitude with complete basic immunization (p = 0,541). This shows the knowledge and attitude of the mother is not one of the factors that can affect the completeness of immunization. Mothers with high knowledge and positive attitudes do not complement immunization to their children due to unsatisfactory experiences, attitudes and behavior of officers who are less motivated to provide immunization, low counseling and difficulty in getting their children immunized.

Keywords : immunization, knowledge and attitude

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu tujuan untuk kebijaksanaan umum dari tujuan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan maka dibentuk Sistem Kesehatan Nasional (Budioro, 2001).

Menurut Ranuh *et al*, (2008), pada pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), imunisasi merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita.

Di Negara Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menyusun program sebagai usaha yang dilakukan untuk menekan penyakit PD3I pada anak, Seperti Program Pengembangan Imunisasi (PPI) pada anak sejak tahun 1956. Keberhasilan bayi dalam mendapatkan lima jenis imunisasi dasar (BCG, DPT-Hepatitis, Polio, dan Campak) diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Pada Tahun 2007 cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia rata-rata 41,6 %, meningkat pada tahun 2010 dengan rata-rata cakupan 53,8 % dan Tahun 2013 kembali meningkat mencapai 59,2 % (Kementerian Kesehatan, 2013).

Imunisasi sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyakit. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013. Peraturan tersebut menyatakan tentang penyelenggaraan imunisasi bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif (Kementerian Kesehatan, 2013). Namun cakupan imunisasi saat ini di Dunia, Asia Tenggara dan di Indonesia masih tergolong rendah yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat disebabkan oleh

faktor usia, pendidikan, penghasilan, ketersediaan waktu ibu (Reza, 2006). Menurut Ranuh (2008), faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi adalah pengetahuan dan kesadaran ibu.

Menurut Ningrum (2008) rendahnya cakupan imunisasi disebabkan oleh faktor pengambilan keputusan. Ibu yang berusia ≥ 30 tahun cenderung untuk tidak melakukan imunisasi lengkap dibanding ibu yang berusia < 30 tahun, pendidikan tinggi keterkaitan erat dengan pemberian imunisasi anak. Semakin banyak jumlah anak terutama ibu yang masih mempunyai bayi yang merupakan anak ketiga atau lebih akan membutuhkan banyak waktu untuk mengurus anak-anaknya tersebut sehingga semakin sedikit ketersediaan waktu bagi ibu untuk mendatangi tempat pelayanan imunisasi (Reza, 2006). Pengetahuan ibu yang kurang tentang imunisasi dan rendahnya kesadaran ibu membawa anaknya ke Posyandu atau Puskesmas juga menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi. Untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap karena takut anaknya sakit, dan ada pula yang merasa bahwa imunisasi tidak diperlukan untuk bayinya, kurang informasi atau penjelasan dari petugas kesehatan tentang manfaat imunisasi, serta hambatan lainnya (Ranuh dkk, 2008).

Puskesmas Kartini adalah salah satu puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat khususnya Kesehatan Ibu dan Anak berada di Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat. Puskesmas Kartini memiliki wilayah kerja yang mencakup Kelurahan Simarito dan Sippinggol-pinggol. Survey awal peneliti lakukan dengan melihat dan membaca data laporan cakupan Imunisasi mulai tahun 2015 s/d tahun 2016 mengalami penurunan. Cakupan imunisasi di Puskesmas Kartini pada Tahun 2015 mencapai 90,5% dan tahun 2016% sebesar 57,3%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ibu yang memberikan

imunisasi dasar lengkap pada bayinya semakin berkurang.

Berdasarkan laporan data di atas, dengan penurunan angka yang signifikan, kemudian peneliti melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi dari ibu balita tentang kelengkapan Imunisasi Dasar. Peneliti menanyakan mengapa ibu tidak membawa anaknya imunisasi, ibu mengatakan bahwa tidak memahami kalau imunisasi itu penting kepada anaknya dengan alasan pengalaman yang lalu bahwa anaknya pertama sehat saja walaupun tidak di imunisasi dan juga ibu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak membawa anaknya untuk imunisasi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini, di 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Simarito dan Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kota Pematangsiantar. Waktu penelitian dilaksanakan Bulan Agustus 2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi berusia 12-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini sebanyak 123 orang. Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kategorik yang merupakan hasil data dari penggolongan dan pengklasifikasian. Data atau variabel kategorik pada umumnya berisi variabel yang berskala nominal dan ordinal.

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data yaitu daftar pertanyaan atau kuesioner yang disiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden dan daftar tilik atau daftar checklist untuk mengetahui status imunisasi dasar bayi.

Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran pada masing-masing variabel *independent* maupun variabel *dependent*. Data akan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi.

Analisa Bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel *independent* dan *dependent*. Analisis dilakukan dengan uji *Chi-Square* dengan tingkat kepercayaan 95% (= 0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pengetahuan Ibu

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 123 responden diperoleh tingkat pengetahuan responden seperti pada :

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Responden

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase (%)
Kurang	27	22,0
Cukup	51	41,5
Baik	45	36,6
Total	123	100,0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 123 responden yang memiliki persentase tertinggi adalah responden dengan kategori pengetahuan cukup sebanyak 51 orang atau sebesar 41,5% sedangkan yang paling kecil adalah ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang. Banyaknya informasi, melalui berbagai media tentang imunisasi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ibu-ibu memiliki pengetahuan yang tinggi di wilayah Kerja Puskesmas Kartini.

Distribusi Responden Menurut Sikap Ibu Berdasarkan hasil penelitian terhadap 123 responden diperoleh tingkat sikap responden seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil analisis distribusi responden menurut tingkat sikap ibu.

Sikap Ibu	Frekuensi	Presentase (%)
Negatif	3	2,4
Positif	120	97,6
Total	123	100,0

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 123 responden yang memiliki persentase tertinggi adalah responden dengan kategori sikap positif sebanyak 120 orang atau sebesar 97,6 % sedangkan yang memiliki sikap negatif 2,4%. Banyaknya ibu-ibu yang memiliki sikap positif tentang imunisasi dasar lengkap dimungkinkan karena mendapat penyuluhan dengan baik tentang imunisasi dasar lengkap dari para petugas di lapangan.

Distribusi Responden Menurut Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 123 responden diperoleh cakupan imunisasi dasar lengkap responden seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis distribusi responden menurut cakupan IDL

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Frekuensi	Presentase (%)
Tidak Lengkap	24	19,5
Lengkap	99	80,5
Total	123	100,0

Hubungan antara Pengetahuan dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 123 responden diperoleh hubungan antara pengetahuan dengan cakupan pemberian imunisasi dasar lengkap seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil analisis distribusi responden menurut hubungan pengetahuan dengan cakupan IDL

Pengetahuan	Imunisasi Dasar Lengkap		Total	P- value
	Tidak Lengkap	Lengkap		
Kurang	5	22	27	0,610
Cukup	12	39	51	
Baik	7	38	45	
Total	24	99	123	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 27 orang ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang, 5 orang memiliki imunisasi dasar tidak lengkap dan 22 orang memiliki imunisasi dasar lengkap. Dari 51 orang yang memiliki pengetahuan cukup, 12 orang memiliki imunisasi dasar tidak lengkap dan 39 orang yang memiliki imunisasi dasar lengkap. Dari 45 orang yang memiliki pengetahuan baik, yang memiliki imunisasi dasar tidak lengkap sebesar 7 orang dan yang memiliki imunisasi dasar lengkap sebesar 38 orang.

Dari hasil uji Chi Square diperoleh P-value = 0,610 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan ibu dengan cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Kartini Tahun 2017.

Hubungan antara Sikap dengan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 123 responden diperoleh hubungan antara sikap dengan cakupan imunisasi dasar lengkap seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil analisis distribusi responden menurut hubungan sikap dengan cakupan IDL.

Sikap	Imunisasi Dasar Lengkap		Total	P-value
	Tidak Lengkap	Lengkap		
Negatif	1	2	3	0,541
Positif	23	97	120	
Total	24	99	123	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 3 orang ibu yang memiliki sikap negatif, 1 orang memiliki imunisasi dasar tidak lengkap dan 2 orang memiliki imunisasi dasar lengkap. Dari 120 orang yang memiliki sikap positif, 23 orang memiliki imunisasi dasar tidak lengkap dan 97 orang yang memiliki imunisasi dasar lengkap.

Dari hasil uji Chi Square diperoleh P-value = 0,541 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh antara sikap ibu dengan cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Kartini Tahun 2016.

Hubungan Pengetahuan Ibu Yang Memiliki Bayi 12-24 Bulan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Fitriani (2011) menyatakan juga bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ibu-ibu yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap imunisasi memiliki persentase yang paling besar. Banyaknya ibu-ibu yang memiliki pengetahuan tinggi dapat disebabkan oleh adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang imunisasi dasar.

Hasil wawancara dengan responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi menyatakan bahwa mereka mendapatkan

pentingnya imunisasi dengan cara menggali informasi dari petugas pada saat pelaksanaan imunisasi, mendengarkan berita/iklan di televisi atau informasi langsung dari mulut ke mulut, maupun melihat informasi dengan membaca buku, majalah, tabloid, dan brosur-brosur tentang imunisasi. Dari pengumpulan data yang telah dilakukan diketahui bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas ketika pelaksanaan imunisasi, maka responden dapat mengetahui tentang tujuan imunisasi yang diberikan, manfaat imunisasi, jenis-jenis imunisasi dan cara pemberian imunisasi dasar lengkap (Gustin, 2012).

Dari hasil analisis bivariat dengan uji chi square ditemukan $p\text{-value} = 0,610$ (hipotesis ditolak, $p > 0,05$). Berarti tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Kartini. Hasil penelitian ini serupa dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti menurut Gustin (2012) yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sikap ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Malalak Kabupaten Agam tahun 2012 dan Hasil penelitian Syahputra (2015) yang menyatakan bahwa variabel yang tidak berpengaruh terhadap tindakan ibu dalam pemberian imunisasi dasar lengkap di Wilayah kerja Puskesmas Kuta Baro Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar adalah variabel pengetahuan. Hal ini juga senada dengan penelitian Josiman (2012) yang menyebutkan bahwa pengetahuan ibu mempunyai tingkat keeratan dengan kelengkapan imunisasi yang tergolong rendah atau dengan kata lain bahwa pengetahuan ibu tidak berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Penerimaan perilaku baru jika didasari dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Sebaliknya apabila perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran, maka tidak akan berlangsung lama. Menurut Prayogo (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa ibu yang mengimunisasikan anaknya secara lengkap namun pengetahuannya rendah. Sehingga menurut Prayogo tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan keikutsertaan program Imunisasi Dasar Lengkap.

Hasil penelitian Mulyanti (2010) menyebutkan juga bahwa ibu-ibu banyak yang tidak memberikan imunisasi dasar lengkap walau tingkat pengetahuannya tinggi. Pengalaman yang sering mengakibatkan bahwa bayi yang diimunisasi akan selalu demam atau sakit menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tidak memberikan imunisasi pada bayinya dan kekurangpuasan terhadap pelayanan petugas di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan saat penelitian di wilayah kerja Puskesmas Kartini, banyak responden yang tidak memberikan imunisasi lengkap, sebanyak 19,5% pada bayinya disebabkan juga karena anak kurang sehat pada saat jadwal pemberian imunisasi. Selain itu, pada saat imunisasi sedang berada di lokasi kerja atau di luar kota sehingga lupa memberikan imunisasi pada anaknya dan sampai di Pematangsiantar sudah lewat usia bayinya. Begitu juga dengan masih adanya kepercayaan masyarakat bahwa tidak boleh membawa anak keluar rumah sebelum berusia 40 hari, sehingga mereka tidak membawa anak untuk mendapatkan pelayanan imunisasi sebelum usia 40 hari seperti pemberian imunisasi HB-0.

Hasil penelitian Astrianzah (2011) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu yang memiliki balita usia 1-2 tahun di wilayah kerja Puskesmas Manyaran dengan status pemberian Imunisasi dasar lengkap pada balita. Menurut Astrianzah, bahwa pengetahuan bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi seseorang, jika pengetahuan ibu tinggi, tapi tidak didukung faktor lain seperti keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan dan dukungan tenaga kesehatan, maka cakupan imunisasi dasar lengkap tidak terpenuhi.

Menurut Vidia (2013) pada penelitiannya tentang faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Tahun 2013 diperoleh informasi juga bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan cakupan imunisasi dasar lengkap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Afriani tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada anak dan pengelolaan vaksin di puskesmas dan posyandu di Kecamatan Beji Kota Depok yang menunjukkan bahwa tidak

didapatkan hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu mengenai imunisasi dengan kelengkapan imunisasi.

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian melalui pengisian kuisioner dan wawancara bahwa ada ibu yang berpengetahuan tinggi dan tidak patuh dalam membawa bayinya untuk di imunisasi. Alasannya di karenakan kurang pedulinya ibu terhadap jaminan kesehatan bayinya dan juga berdasarkan pengalaman anak-anak mereka sebelumnya yang tetap sehat walaupun tidak diberikan imunisasi secara lengkap. Selanjutnya ada ibu yang berpengetahuan kurang baik dan patuh membawa bayinya untuk di imunisasi sesuai jadwal karena ibu memiliki keinginan untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit dengan memberikan imunisasi pada bayinya. Selanjutnya ada ibu yang berpengetahuan kurang dan tidak patuh membawa anak di imunisasi hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, informasi maupun pengalaman mereka, terutama pada ibu muda yang baru memiliki anak yang pertama.

Hubungan Sikap Ibu Yang Memiliki Bayi 12-24 Bulan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini

Berdasarkan distribusi responden diperoleh informasi bahwa sikap ibu di wilayah kerja Puskesmas Kartini sangat didominasi oleh ibu-ibu yang memiliki sikap positif, sebanyak 97,6%. Menurut Notoatmodjo (2010), sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi (tertutup). Hal ini menggambarkan bahwa walaupun memiliki sikap positif terhadap imunisasi akan tetapi tidak menjamin ibu-ibu akan memberikan imunisasi lengkap kepada bayinya.

Dari hasil analisis bivariat dengan uji *chi square* ditemukan p-value = 0,541 (hipotesis ditolak). Hal ini tidak ada hubungan antara sikap dengan cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Kartini Tahun 2016. Hasil penelitian ini sejalan dengan Gustin (2012) yang mendapatkan informasi bahwa setelah dilakukan uji statistik chi-square diperoleh nilai $p = 0,231$ ($p > 0,05$) sehingga disimpulkan

bahwa tidak ada hubungan sikap ibu dengan pemberian imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Malalak Kabupaten Agam tahun 2012 (hipotesa ditolak). Tidak adanya hubungan sikap dengan pemberian imunisasi karena cukup banyak responden yang memiliki sikap positif namun tidak memberikan imunisasi dasar lengkap pada anaknya.

Sesuai dengan pendapat Orion (2012) bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi perwujudan sikap terhadap tindakan dan perbuatan. Begitu juga, tidak ada hubungan antara sikap dengan pemberian imunisasi di area kerja Puskesmas Kartini juga karena dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti faktor ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang sulit dan sikap perilaku petugas yang kurang dapat memotivasi ibu untuk memberikan imunisasi dasar lengkap. Beberapa responden masih menganggap bahwa imunisasi yang diberikan pada bayi sampai usia 6 bulan sudah mencukupi atau karena faktor lupa (kesibukan di rumah) untuk membawa anak ke fasilitas sehingga berdampak pada tidak lengkapnya imunisasi dasar yang diperoleh balita yang bersangkutan. Selain itu, faktor keluarga (orang tua atau suami) yang melarang anaknya untuk diimunisasi dapat mengakibatkan juga rendahnya ibu-ibu membawa anaknya untuk diimunisasi secara lengkap di Puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 97,6% yang memiliki sifat positif ternyata hanya 78,9% responden yang memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayinya. Justru dari responden yang memiliki sikap negatif tetapi selalu membawa anaknya diimunisasi ke Puskesmas. Hasil ini sesuai dengan penelitian Febriana (2009) yang menunjukkan juga bahwa sikap tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kelengkapan imunisasi dasar. Sekitar 81,58% orangtua memberikan sikap positif, namun sikap tersebut tidak diikuti dengan tingginya angka kelengkapan imunisasi yang hanya mencapai 46,78%.

KESIMPULAN

1. Tingkat pengetahuan ibu yang tergolong tinggi/baik terhadap imunisasi dasar lengkap sebesar 36,6% akan tetapi hanya 30,9% yang memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayinya. Tidak ada hubungan antara Pengetahuan Ibu yang Memiliki Bayi 12-24 bulan dengan Pemberian Imunisasi

Dasar Lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini dengan nilai p-value sebesar 0,610 (lebih besar dari $p=0,05$, hipotesis ditolak).

2. Sebanyak 97,6% responden memiliki sikap positif namun hanya 78,9% responden yang memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayinya. Tidak ada hubungan antara Sikap Ibu yang Memiliki Bayi 12-24 bulan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Kartini dengan nilai p-value sebesar 0,541 (lebih besar dari $p=0,05$, hipotesis ditolak).

SARAN

Diharapkan kepada pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar khususnya Dinas Kesehatan bersama dengan pihak Puskesmas untuk memberikan informasi kesehatan berupa promosi kesehatan dan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam pemberian Imunisasi pada bayi dan balita.

DAFTAR PUSTAKA

Astrianza, D. (2011). *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu, Tingkat Sosial Ekonomi dengan Status Imunisasi Dasar Lengkap Pada Balita*. Skripsi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro. Semarang.

Budioro B, (2001). *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Semarang : Badan Penerbit Undip.

Febriana S. (2009). *Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Balita dan Faktor-Faktor yang Berhubungan di Poliklinik Anak Rumah Sakit Daerah Tarakan Maret 2008*. Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta.

Gerungan, W.A. (2009). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Gustin, R.K. (2012). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Imunisasi Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Malalak Kabupaten Agam Tahun 2012. *Jurnal Kesehatan STIKes Prima Nusantara Bukittinggi*, Vol.3 No 2 Juli 2012. Padang.

Josiman A. (2012). *Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi dengan Status Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi*

di Wilayah Kerja Puskesmas Depok 1 Yogyakarta. Skripsi Universitas Respati Yogyakarta. Yogyakarta.:

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Buku Saku Faq (Frequently Asked Questions)*. BPJS Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ningrum, E.P. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi di Puskesmas Banyudono Kabupaten Boyolali. *Berita Ilmu Keperawatan*, 1,1, 7-12.

Notoatmodjo, S.(2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. S

Orion M. (2012). *Can Social Network Inform Treatment Use for persons with Co-Occuring Substance Use and Mental Health Problems?*, Diakses dari : <http://dx.doi.org>. Pada tanggal 16 Juni 2014.

Prayogo, A.(2009). Kelengkapan Imunisasi Dasar Anak Usia 1.5 Tahun. *Sari Pediatri 11,1*. Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM.

Ranuh, I.G.N. (2008). *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Jakarta : Ikatan Dokter Anak Indonesia.

Reza. (2006). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status Imunisasi Dasar pada Anak di Puskesmas Pauh Kota Padang Tahun 2006*.

Depok : Tesis FKM UI.
<http://www.digilib.ui.ac.id>.

Syahputra, A. (2015). *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar*. Skripsi Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh

PELATIHAN VOKAL DASAR ANAK-ANAK PANTI ASUHAN ELIM PEMATANGSIANTAR

(CHILDREN'S BASIC VOCAL TRAINING OF ELIM ORPHANAGE PEMATANGSIANTAR)

¹Jubelando O Tambunan dan ²Deswidya Sukrisna Hutauruk

Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
EFARINA Pematangsiantar Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar
sukrisna.hutauruk@gmail.com

Diterima : 26 April 2018; Direvisi 29 Mei 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Teknik vokal merupakan suatu cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Teknik vokal merupakan unsur pendukung utama dalam menyanyi dimana menyanyi merupakan kegiatan yang digemari kebanyakan orang, salah satunya digemari oleh anak-anak. Yang melatarbelakangi kegiatan bahwa perlunya pendidikan seni khususnya bernyanyi bagi anak-anak dalam lingkungan panti asuhan untuk mengurangi tingkat stres dan depresi anak-anak yang berada dilingkungan panti asuhan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman anak terhadap teknik vokal dasar dalam upaya peningkatan keterampilan bernyanyi pada saat sebelum pelatihan dengan sesudah dilakukan pelatihan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk suatu pelatihan berupa workshop bertempat di Rumah Doa Panti Asuhan Elim Pematangsiantar dengan metode ceramah, diskusi dan Praktik vokal dasar bernyanyi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya wawasan pengetahuan dan keceriaan anak-anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar mengenai vokal dasar bernyanyi sehingga mengurangi tingkat stress dan depresi anak-anak di lingkungan panti asuhan. Anak-anak di Panti Asuhan juga menunjukkan timbal balik yang sangat baik dan positif. Anak-anak panti asuhan yang mengikuti kegiatan pelatihan ini menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap materi pengabdian yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Kata kunci : pelatihan, vokal, panti asuhan

ABSTRACT

Vocal technique is a method of producing a good and right voice, so that the voice that is produced sounds clear and beautiful. Vocal technique is a main supporting factor in singing in which singing is a favorable activity of many people, especially children. Decreasing stress and depression is a main background of educating arts, especially singing among children living in an orphanage. The aim of this voluntary program is to find the improvement of children's achievement on basic vocal technique in increasing singing skills before and after applying the method. This voluntary program is conducted as a training in the form of workshop in Rumah Doa Panti Asuhan Elim Pematang Siantar. The method used is speech, discussion, and singing basic Vocal practice. The result of this activity is the increasing of skill of singing and increasing of happiness on children in Elim Orphanage Pematang Siantar. Children in this orphanage also show positive feed-back. They show a very good interest to the speaker as long as the program.

Keywords : training, vocal, orphanage

PENDAHULUAN

Panti asuhan merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menampung anak-anak yatim dan piatu (kehilangan satu atau kedua orangtuanya). Anak yang berada di lingkungan keluarga, panti asuhan dan terlantar menunjukkan tumbuh kembang yang berbeda baik secara biologis, fisiologis terutama psikis. Kebanyakan anak yang tumbuh diluar lingkungan keluarga terutama mengalami gangguan dalam pertumbuhan psikisnya. Anak-anak dan remaja merupakan populasi yang rentan terhadap depresi terutama bertempat tinggal di panti asuhan. Banyak faktor dapat mempengaruhi perkembangan mental remaja. Institusi seperti panti asuhan, remaja yang dirawat di rumah sakit, dan remaja dengan penyakit yang kronis dimana terjadi perubahan-perubahan secara fisik maupun psikis di temukan angka kejadian depresi yang tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan anak dapat terganggu jika terjadi perpisahan dengan keluarga, orangtua meninggal atau dicampakkan orang tua, serta perilaku kekerasan oleh orang tua baik secara verbal maupun fisik. Kerusakan lingkungan ini sangat berdampak pada anak sehingga mampu mengakibatkan depresi.

Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual, dan minat serta, kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan (Davison et al, 2010:372). Salah satu metode untuk mengatasi stres atau depresi seperti : pendekatan farmakologis, perilaku, kognitif, meditasi, hypnosis, dan musik (Hardjana, 1994). Metode musik merupakan salah satu cara untuk membantu mengatasi stres. Secara keseluruhan musik dapat berpengaruh secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis, musik dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks, mengurangi stres, menimbulkan rasa aman dan sejahtera, melepaskan rasa gembira dan sedih, dan membantu serta melepaskan rasa sakit. Implementasi musik salah satunya adalah bernyanyi. Bernyanyi merupakan salah satu media yang sering digunakan untuk mengurangi tingkat depresi.

Dalam Sihombing Basani, 2013 dipaparkan pendidikan seni melalui kegiatan bernyanyi sebagai aspek pengembangan pendidikan karakter pada anak usia dini,

dimana seluruh aspek pengembangan masuk di dalamnya, antara lain :

- a. Ekspresi dan emosi anak, peran bernyanyi bagi anak-anak adalah sebagai media ekspresi tentang apa yang dirasakan, dipikirkan, diimpikan secara pribadi;
- b. Mengembangkan kecakapan hidup, melalui kegiatan bernyanyi anak akan lebih mudah memaknai pesan moral yang ingin disampaikan;
- c. Kemampuan berbahasa;
- d. Hubungan sosial, kegiatan bernyanyi tidak bisa lepas dari hubungan sosial, baik dengan lingkungan, masyarakat, teman maupun keluarga.

Maka dari itu anak-anak di Panti Asuhan Elim Pematangsiantar perlu metode untuk mengekspresikan emosi dan tingkat stress mereka agar tidak mengarah pada perilaku buruk salah satunya dengan bernyanyi.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah ceramah, diskusi, dan Praktik langsung vokal dasar bernyanyi dengan teknik workshop dengan menggunakan alat bantu multimedia berupa laptop, LCD, piano dan teks/not koor.

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat praktik vokal dasar seperti:

- a. Pemanasan
- b. Belajar vokal dengan teknik pernafasan
- c. Pengucapan kata yang baik dan benar (artikulasi)
- d. Melatih kekuatan suara

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk suatu pelatihan selama dua minggu mulai dari tanggal 12 Februari 2018 hingga 25 Maret 2018 dengan anggota sebanyak 38 orang anak dan dilaksanakan di Panti Asuhan Elim Pematangsiantar. Hari pertama dilaksanakan dengan Penyampaian materi tentang penjabaran vokal dasar dan teknik yang berkaitan dengan vokal dasar kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab/diskusi tentang teknik vokal dasar tersebut. Hari kedua dan selanjutnya dilaksanakan dengan melakukan praktek langsung teknik vokal dasar dalam bernyanyi.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tim pengabdian melakukan sosialisasi awal pelatihan, agar terjadi komunikasi timbal balik tentang bagaimana cara yang efektif untuk mengajak anak lebih senang

mengikuti proses pembelajaran teknik vokal dasar menyanyi ini untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan mengenai teknik vokal dasar dalam bernyanyi.

- b. Tim pengabdian membahas tentang teknik vokal dasar secara teoritis dengan memberikan arahan dan ceramah serta diskusi/tanya jawab kepada anak-anak Panti Asuhan Elim yang akan mengikuti pelatihan.
- c. Tim pengabdian memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak untuk mempraktekkan atau melakukan simulasi teknik vokal dasar bernyanyi. Para peserta dibagi kedalam 4 kelompok berdasarkan nada suara seperti Sopran, Alto, Tenor dan Bass.

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Persiapan.

- 1) Mengurus surat izin dan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Menghubungi pimpinan Panti Asuhan Elim Pematangsiantar untuk menetapkan jumlah peserta dan jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pelaksanaan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama dua minggu mulai dari tanggal 12 Februari 2018 hingga 25 Maret 2018 dengan anggota sebanyak 38 orang anak dan dilaksanakan di Rumah Doa Panti Asuhan Elim Pematangsiantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini memberikan pengaruh yang sangat baik dan positif terutama kepada anak-anak di Panti Asuhan Elim Pematangsiantar.



Gambar 1. Anak-anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar

Para peserta menunjukkan reaksi yang positif terhadap teknik vokal dasar yang akan dipraktekkan dengan menunjukkan mimik wajah yang ceria.

Narayana, 2016 menjelaskan semakin lama remaja tinggal di panti (cut off point > 4 tahun) maka resiko untuk menjadi depresi ringan 8,6 kali lebih besar daripada remaja yang tinggal kurang dari atau sama dengan 4 tahun dan semakin kecil usia remaja masuk ke panti (cut off point 13 tahun) maka resiko terkena depresi berat 7,96 kali lebih tinggi daripada remaja yang berusia 13 tahun atau lebih. Sehingga perlu di perhatikan usia panti yang masih kecil yang masuk ke panti untuk di berikan perhatian khusus untuk mengurangi potensi berkembang menjadi depresi berat. Sehingga kegiatan pelatihan vokal dasar untuk bernyanyi ini sangat mendukung dalam mengurangi tingkat depresi anak.



Gambar 2. Melakukan Praktik Vokal Dasar

Sebelum melakukan pelatihan praktik dasar bernyanyi dilakukan pemanasan sebelumnya agar pita suara tidak mengalami kerusakan yang dapat mempengaruhi kualitas bernyanyi.



Gambar 3. Praktik Melatih kekuatan suara

Anak-anak panti asuhan yang mengikuti kegiatan pelatihan ini menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap materi pengabdian yang disampaikan oleh tim pengabdian. Para peserta juga aktif bertanya dan mengungkapkan masalah-masalah yang dialaminya selama mengikuti latihan vokal suara.



Gambar 4. Mengulang Vokal Suara

Para peserta terlihat kompak saat melatih dan mengulang berkali-kali vokal suara mereka bersama tim lainnya baik tim sopran, alto, tenor maupun bass.

Workshop pelatihan vokal dasar dalam upaya peningkatan keterampilan bernyanyi dilaksanakan untuk Anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar. Semua kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal acara yang telah disusun sebelumnya.

Tabel 1. Jumlah Peserta Pelatihan

Jumlah Peserta	Yang Telah Paham	Yang Kurang Paham
38 orang	16 Orang	22 orang

Dari 38 orang peserta pelatihan, 16 orang yang sudah paham mengenai teknik vokal dasar bernyanyi dan telah mampu mempraktekannya dalam bernyanyi dengan cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Hal ini didukung dalam kegiatan bernyanyi tujuannya dapat membuat siswa menjadi segar (Yonathan, 2013).

Yang lainnya masih sedikit memahami mengenai metode tersebut dan belum mampu

menerapkan secara langsung sehingga harus dilatih lagi berulang-ulang.

Namun secara keseluruhan antusias anak dalam kegiatan pelatihan ini sangat tinggi dan positif. Mereka tertarik dalam mengikuti pelajaran dan pelatihan yang diberikan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi suara:

- Tempo / speed / kecepatan
- Power / kekuatan
- Volume (adjustable)
- Tone / tinggi-rendah suara
- Timbre / karakteristik / warna suara
- Olah nafas, ideal dengan nafas perut
- Kondisi Fisik dan Emosi/Psikologis

Pengetahuan dan keterampilan anak sebelum dilaksanakan pelatihan masih kurang, namun setelah diberikan arahan dan pelatihan, nampak peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka secara signifikan. Terlihat bahwa mereka telah mampu mempraktekkan teknik vokal dasar dalam bernyanyi. Mereka mampu mengatur tempo, volume, tone, power, olah nafas dan timbre.

Setelah adanya pelatihan ini, diharapkan peserta pelatihan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan ini untuk mengoptimalkan, mengimplementasikan teknik vokal dasar dalam bernyanyi serta dapat menjadi bahan serta persiapan yang baik pada saat mengikuti paduan suara baik lokal, nasional bahkan internasional terkhusus di Panti Asuhan Elim Pematangsiantar.

Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat ini tidaklah menemukan kendala yang cukup berarti, dalam artian bahwa pelaksanaan kegiatan ini cukup lancar. Hanya saja karena keterbatasan dana untuk pelaksanaan pengabdian ini, maka menyebabkan keterbatasan bentuk, jenis, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan ini mampu meningkatkan apresiasi anak Panti Asuhan Elim Pematangsiantar melalui pelatihan vokal dasar. Kemampuan anak mengenai teknik vokal dasar bernyanyi secara umum sudah meningkat setelah dilaksanakannya pelatihan yang terbentuk melalui penerapan/praktek teknik vokal dasar secara langsung dengan respon anak yang cukup baik. Dimana 16 orang anak dari 38 orang telah paham mengenai teknik vokal

dasar bernyanyi dan telah mampu mempraktekannya dalam bernyanyi dengan cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Anak-anak yang mengikuti pelatihan secara keseluruhan menunjukkan antusias yang tinggi dan positif terhadap kegiatan ini. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini menjadi stimulan agar anak-anak dilingkungan Panti Asuhan khususnya Panti Asuhan Elim Pematangsiantar tidak mengalami stres dan depresi serta dapat menjadi bahan persiapan mengikuti paduan suara hingga tingkat Internasional.

Perlu adanya program pelatihan lanjutan yang masih berhubungan dengan teknik vokal dasar yaitu pelatihan *choral* untuk semakin menambah pengetahuan dan peningkatan keterampilan anak dalam bernyanyi.

SARAN

Melihat kegiatan pelatihan vokal dasar merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk mengurangi tingkat stres dan depresi bagi anak-anak yang berada dilingkungan panti asuhan, maka diharapkan adanya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan vokal terhadap Pantai Asuhan yang ada di daerah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan keceriaan anak-anak yang mengalami stres dan depresi karena kehilangan orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Anita, A. U. L. 2013. Upaya Meningkatkan Teknik Vokal Pada Paduan Suara Inovatif Dengan Menggunakan Metode Imitasi Dan Drill. Yogyakarta : Fakultas Bahasa dan Seni.

Fithrah R., Toruan J., Maestro E. 2012. Peningkatan Kemampuan Bernyanyi Melalui Solfegio Dalam Pembelajaran Vokal di Man Lubukalung. Padang : Fakultas Bahasa dan Seni.

Kurnianingsih W. 2013. Pembelajaran Vokal di Purwacaraka Musik Studio Semarang. Semarang : Fakultas Bahasa dan Seni.

Rahmawati I, Haroen H, Juniarti N. 2008. Perbedaan Tingkat Stres Sebelum Dan Sesudah Terapi Musik Pada Kelompok Remaja Di Panti Asuhan Yayasan Bening Nurani

Kabupaten Sumedang. Padjajaran : Fakultas Ilmu Keperawatan.

Rosmaniah S M., Myliartini R., Sukmayadi Y. 2013. Studi Tentang Kontrol Nada Dalam Pembelajaran Vokal Tingkat Dasar Di Purwa Caraka Music Studio Cimahi. Jurnal : Vol 1, No.3, Desember 2013.

Silaen HT. 2006. Praktek Instrumen Mayor I-Vokal. Yogyakarta : Fakultas Bahasa dan Seni

Sukma C A P. 2016. Pembelajaran tehnik vokal dalam bernyanyi Pada anak usia 8-10 tahun di sriwijaya musik yogyakarta. Yogyakarta : Fakultas Seni Pertunjukan

Weddia D. 2015. Teknik Vokal Dan Teknik Berbicara Dan Aplikasinya Pada Dunia Pendidikan. Pemerhati pendidikan, sarjana perencanaan pendidikan

This page is intentionally left blank

SASTRA DAN KOTA : PANDANGAN KOTA DALAM PUISI

(LINGUISTICS AND CITY : CITY VIEW IN A POETRY)

Intan Maulina, S.Pd, M.S

Staf Pengajar Universitas EFARINA Pematangsiantar Jl. Sudirman No.8 Pematangsiantar
intanmaulina1509@gmail.com

Diterima : 28 April 2018; Direvisi 29 Mei 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Sastra dan Kota memiliki hubungan yang sangat romantis, itulah sebabnya banyak karya sastra yang dilatarbelakangi dengan persoalan-persoalan pada masyarakat perkotaan. Tidak hanya masalah bahkan gambaran tentang kota itu sendiri. Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh arus urbanisasi dan modernism yang terjadi dan dialami masyarakat kota. Secara khusus, karya sastra yang dibahas dalam artikel ini adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh Isbedy Stiawan ZS. Ada 6 buah puisi yang dibahas keenamnya mewakili masalah-masalah yang muncul dari lingkungan paling dekat pengarang. Artikel ini juga membuktikan bahwa karya sastra berfungsi sebagai medium yang penting untuk mengkritik pembangunan dan perubahan dari kehidupan masyarakat perkotaan.

Kata kunci : sastra kota, sastra Indonesia, puisi, modernisasi

ABSTRACT

Literature and the City have a very romantic relationship, which is why many literary works are motivated by the problems in urban society. They are not only about human problems, but also the description of the city itself. In general this paper aims to get a potrait of how social and cultural changes influenced by the urbanism within the people in a city. Specifically, the literary works which are discussed inthis paper are poems written by Isbedy Stiawan ZS. There are six poems discussed six representing problems arising from the author's nearest environment. This paper also proofs that literary works function as an important medium to criticize the depolment and change of the society life in urban setting.

Keywords : urban literature, Indonesian literature, poetry, modernism

PENDAHULUAN

Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sehingga sastra memiliki unsur-unsur berupa pikiran, pengalaman, ide, perasaan, semangat, kepercayaan (keyakinan), ekspresi atau ungkapan, bentuk dan bahasa Sumardjo & Saini (1997: 3-4)

Selain itu, sastra juga merupakan salah satu hasil karya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia yang hidup di dunia ini memerlukan banyak kebutuhan, seperti makanan, pakaian agar tidak kedinginan, rumah agar tidak kehujanan dan kepanasan, manusia juga perlu ilmu kedokteran agar tidak jatuh sakit dan manusia perlu hiburan agar mendapat kesenangan. Manusia perlu berpikir dan mencipta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu. Maka munculah karya sastra. Ada kebutuhan manusia yang berupa

kebendaan, ada pula kebutuhan manusia yang bersifat kerohanian seperti aturan-aturan hidup dalam hidup bersama, kesenian untuk hiburan. Semua hasil kerja manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu disebut kebudayaan.

Karya sastra adalah suatu fenomena sosial. Karya sastra terkait dengan pembaca dan segi kehidupan manusia yang diungkapkan di dalamnya. Karya sastra sebagai fenomena sosial tidak hanya terletak pada segi penciptaannya tetapi pada hakikat karya itu sendiri sebagai reaksi sosial seorang penulis terhadap fenomena sosial yang dihadapi mendorong ia menulis karya sastra. Oleh sebab itu, mempelajari karya sastra berarti mempelajari suatu kehidupan sosial, mengkaji manusia, kehidupan, budaya, ideologi, perwatakan, bahkan menyangkut masalah-masalah lain yang lebih luas yang terkait dengan kehidupan manusia (Semi, 1990: 53).

Sastra juga merupakan bagian bentuk budaya yang universal. Sastra merupakan produk karya seni kreatif dan yang menjadi objek adalah manusia dengan segala permasalahan dan disampaikan atau diwadahi oleh bahasa yang khas dan mengandung nilai estetis. Sastra tidak pernah sama antara satu tempat di dunia ini dengan tempat lain, tidak pernah sama antara waktu dengan waktu yang lain. Selain itu, karya sastra merupakan suatu tiruan alam, mimesis, tetapi juga merupakan suatu produk imajinasi dan produk kreativitas (Semi, 1990: 53).

Ahmadi (2003:228) juga menjelaskan bahwa masyarakat perkotaan sering disebut juga urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Perhatian khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan, dan perumahan, tetapi mempunyai perhatian lebih luas lagi. Orang-orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, artinya tidak hanya secukupnya atau apa adanya. Hal itu disebabkan oleh karena pandangan warga kota sekitarnya. Hartomo dan Aziz (1999:237-248) menjelaskan ciri sosial masyarakat kota adalah memiliki lapisan sosial ekonomi yang berbeda, individualisme, toleransi yang lemah, terdapat jarak sosial, dan penilaian sosial yang juga berbeda.

Masyarakat perkotaan yang lelah dengan banyak pekerjaan yang dihadapi pada keseharian ingin mencari pelarian dari

penatnya kesibukan, maka mereka senang duduk di kafe-kafe. Belakangan kafe tempat meminum kopi mulai menjamur di perkotaan, tidak terkecuali Kota Pematangsiantar. Bahkan kafe tidak hanya dijadikan tempat berkumpulnya para anak muda namun juga menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat perkotaan. Banyak juga dijumpai rapat tidak lagi diadakan di ruangan kantor namun di restoran atau pun kafe. Fenomena ini juga lah yang menjadikan kafe menjamur di perkotaan.

Sastra dan kota memiliki hubungan yang sangat erat, di mana biasanya di kota lah dilakukan produksi sastra, seperti percetakan, pendidikan, distribusi dan perekonomian. Kota juga banyak dijadikan latar dalam cerita di sebuah karya sastra, seperti penokohan, juga konflik kehidupan masyarakatnya. Artikel ini akan membahas tentang gambaran sebuah kota dalam buku puisi yang di tulis oleh Izbedy Stiawan ZS yang berjudul Kota, Kita dan Malam. Buku puisi ini terdiri dari 47 judul puisi. Isbedy Stiawan ZS adalah salah seorang sastrawan senior yang lahir di Tanjungkarang, Lampung. Beliau tidak hanya menulis puisi namun juga cerpen, esai dan karya jurnalistik di sejumlah media massa terbitan Jakarta dan daerah.

Penelitian dan karya ilmiah tentang hubungan karya sastra dengan fenomena masyarakat kota memang belum terlalu banyak dilakukan, namun sudah sering menjadi pembahasan oleh para kritikus sastra dan peneliti. Sebagai contoh peneliti sebelum saya yaitu Sudarmoko (2012), pernah membuat penelitian tentang *Sastra, Kota, dan Sumatera Barat : Perubahan Masyarakat Perkotaan dalam Karya Sastra*. Dalam tulisannya Sudarmoko meneliti tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat kota di Sumatera Barat, tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh arus urbanisasi dan modernisme yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Sumatera Barat. Secara khusus, karya sastra yang dibahas dalam artikel adalah prosa yang ditulis oleh para pengarang dari Sumatera Barat.

Yopi Ahmais Sakinah (2017) dalam artikelnya juga pernah menuliskan tentang *Potret Sosial Masyarakat Desa Dan Masyarakat Kota Dalam Novel Bekisar Merah Karya Ahmad Tohari*. Artikel ini memuat tentang permasalahan kehidupan sosial masyarakat desa dan masyarakat kota dalam

novel *Bekisar Merah* karya Ahmad Tohari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan potret sosial masyarakat desa dan kota dalam novel dan kaitannya dengan realitas yang ada di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat desa memiliki sikap homogenitas sosial, hubungan primer akrab, kontrol sosial erat, gotong royong baik, ikatan sosial ketat, magis religius, dan pola kehidupan sama. Pada masyarakat kota ditemukan pelapisan sosial ekonomi berbeda, individualisme, toleransi sosial yang kurang, jarak sosial, dan penilaian sosial berbeda. Potret sosial masyarakat desa dan kota dalam novel memiliki kaitan yang erat dan nyata dengan realitas masyarakat sebenarnya.

METODE

Metode merupakan cara kerja dalam memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian. Peneliti dapat memilih salah satu dari berbagai metode yang ada sesuai dengan tujuan, sifat, obyek sifat ilmu atau teori yang mendukungnya. Dalam penelitian, objeklah yang menentukan metode yang akan digunakan (Koentjaraningrat, 1977-8).

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Menurut Ratna (2007:39), metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti yang menjadi pusat perhatian penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian berlangsung (Sudjana dan Ibrahim, 1989: 64). Penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi interpretasi dari data tersebut (Surakhmad, 1994:139). Sedangkan menurut Sukmadinata (2009:72), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau pun rekayasa manusia.

Dengan kata lain, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti dengan menguraikan hal-hal yang menjadi pusat perhatian dan mendukung objek penelitian tersebut. Penelitian deskriptif tidak

memberikan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Metode deskriptif ini disertai dengan kegiatan analisis agar diperoleh pemahaman dan pembahasan yang mendalam mengenai statistika dan nilai budaya yang terdapat dalam puisi dan kemungkinan untuk digunakan sebagai bahan riset di dalam dunia kesusastraan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah karya sastra dalam bentuk puisi yaitu buku karya Isbedy Stiawan ZS yang berjudul *Kota, Kita dan Malam* yang terdiri dari 47 judul puisi. Peneliti memilih puisi ini sebagai sumber data dalam penelitian ini karena pertimbangan penulis terhadap buku puisi ini yang memiliki pesan tersendiri dan tepat untuk dijadikan jurnal tentang pengaruh puisi dan kota. Dalam menentukan sampel penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik penyampelan *purposive* atau *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan apabila peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam menetapkan sampel sesuai dengan tujuan penelitiannya. Sampel ditentukan sesuai karakter puisi untuk dijadikan sebagai bahan analisis.

Untuk mendapatkan data yang memadai penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data utama adalah berupa kumpulan puisi *Kota, Kita, Malam* karya Isbedy Stiawan ZS. Adapun tambahan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Memilih puisi-puisi yang dijadikan bahan utama objek penelitian.
- Menentukan puisi-puisi untuk dijadikan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu studi pustaka. Teknik ini dilakukan untuk menggali teori yang relevan dengan hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini yaitu menemukan data yang berhubungan dengan potret sosial masyarakat kota yang terdapat dalam puisi *Kota, Kita, Malam*, karya Isbedy Stiawan ZS, kemudian menganalisis dan menunjukkan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 47 jumlah puisi dalam buku Isbedy Stiawan ZS ini ada 15 puisi yang menceritakan tentang kota secara puitis, lalu diambil sebagai

contoh yang paling mudah dipahami dan mendeskripsikan kota dengan lebih estetik ada 6 judul puisi, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menemukan data yang berhubungan dengan potret sosial masyarakat kota yang terdapat dalam puisi Kota, Kita, Malam karya Isbedy Stiawan ZS,
- b. Menganalisis data
- c. Pembahasan data
- d. Menyimpulkan hasil temuan, dan
- e. Menulis laporan penelitian

Berikut adalah keenam puisi yang ditemukan dan berhubungan dengan potret sosial masyarakat kota atau urban community yang terdapat dalam buku Isbedy Stiawan ZS, yaitu:

1. Kota Asing, mengungkap sisi tersembunyi masyarakat perkotaan.

“Selamat malam, kota yang kurindu
Kini dalam pelukku,” katamu

Lalu jalan, lelampu, simpang tiga dan
Taman di tengah kota bagai lembar
Buku terbuka minta ditulis. Mungkin
Kisah perjalananmu atau cemas
Dan kesal

Sebagai malam aku melihatmu. Terbenam
Di ini kota. Mandi lelampu, basah oleh
jalan yang tak sahabat. Kau memanggil
kerabat, tapi tak juga ada tangan
yang ingin menyalamimu

kota ini amat asing
sesepi saat tanpa kawan

/21 September 2016

Dalam puisi yang berjudul Kota Asing ini pada bait pertama Isbedy Stiawan ZS sudah menyuguhkan cerita tentang kota yang dirindukan oleh tokoh utama, “Selamat malam, kota yang kurindu kini dalam pelukku,” bagaimana kota yang biasanya dipenuhi dengan kerumitan ternyata saat ditinggalkan juga bisa membuah rindu. Isbedy menceritakan tentang sosok yang telah lama pergi dan akhirnya bisa kembali ke kotanya, namun kota itu tak lagi sama seperti dulu.

Pada bait kedua yang berisi, “Lalu jalan, lelampu, simpang tiga dan taman di tengah kota bagai lembar buku terbuka minta ditulis. Mungkin kisah perjalananmu atau cemas dan kesal,” dari potongan puisi ini pembaca dapat

merasakan bagaimana kehidupan masyarakat di perkotaan. Bagaimana pengarang mencoba menggambarkan sebuah kota melalui jalan, lelampuan, persimpangan juga taman yang berada di tengah kota. Diceritakan jalanan yang sepi begitu tidak bersahabat dengan masyarakat, juga para saudara yang digambarkan melalui kerabat ternyata sudah tak lagi saling peduli. Sebuah kota yang sesungguhnya begitu ramai seharusnya digambarkan dalam sebuah tulisan ini namun ternyata bagi sebagian orang justru kota membawa kesepian yang asing bagi mereka. Saling tidak peduli, tidak lagi ingin kenal mana saudara atau tetangga, semua saling tidak peduli.

Hartomo dan Aziz (1999:237) menjelaskan bahwa masyarakat kota merupakan masyarakat yang memiliki toleransi yang lemah. Segala persoalan yang terjadi pada anggota masyarakat lain, tidak terlalu mengundang simpati. Hal ini dikarenakan masyarakat kota memiliki kesibukan sendiri-sendiri dan mengurangi perhatian terhadap sesamanya.

2. Hanya Menunggu, menunjukkan kehidupan perkotaan melalui kemajuan transportasi.

Kita hanya menunggu
sedang halte dan jalan
terus menjauh
tanpa bus berkunjung

Jalanlah yang bergerak
sedang kita hanya menanti
sampai bus datang
lalu mengangkut ke entah

Kita hanya menunggu
ya, hingga kau datang
sekedar berdendang

/18.9.2016

Dalam puisi Hanya Menunggu ini pada bait pertama dan kedua Isbedy menceritakan tentang halte dan bus, di mana biasanya ini menunjukkan bahwa sebuah kota telah ditata sedemikian rapi bahkan tempat untuk menunggu bus pun sudah ditetapkan dan kedua hal ini tentu hanya bisa ditemui di perkotaan. Disini Isbedy sengaja menulis kata bus tidak dengan angkutan kota sebab pasti di beberapa

kota besar akan lebih banyak menggunakan bus dan tidak lagi angkutan kota karena angkutan kota dinilai akan lebih sering mengundang kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Dan bus jika dipadupadankan dalam sebuah puisi lebih bernilai estetik untuk di baca.

Hartomo dan Aziz (1999:237) menyatakan bahwa perbedaan status, kepentingan, dan situasi kondisi kehidupan kota mempunyai pengaruh terhadap sistem penilaian yang berbeda mengenai gejala-gejala yang timbul di kota. Perbedaan kondisi kehidupan memberikan penilaian yang berbeda di dalam masyarakat tersebut. Inilah yang terjadi dalam puisi yang berjudul Hanya Menunggu ini.

3. Mula Kucium Tanah, menggambarkan kota tempat kelahiran yang telah berubah bahkan juga masyarakatnya.

Sebab di sini mula kucium tanah
maka tak kutingalkan kota ini
dan biarlah jalan dan segala tanda
melengkapi namaku, akhir kelak

Meski ini kota sudah angkuh
hampir melupakan ciuman pertama
di keningku, adzan dan takbir
ditelingaku

Sebagai ikatan kasih

Kini kota yang dulu kurasa ramah
pelan-pelan jadi pongah
jalan-jalan kehilangan rambu,
nama-nama jalan kian asing.

Aku berputar-putar
meghabiskan umur
sebelum sampai padamu

/Kemiling 10 Agustus 2016

Dalam potongan puisi Mula Kucium Tanah ini menceritakan bagaimana kota tempat kelahiran sudah tak lagi sama, seperti yang dituliskan dalam paragraf awal dan ke dua. Ditandai dengan awal lahir ia mencium aroma tanah juga suara adzan dan takbir yang biasa dikumandangkan di telinga seorang anak yang baru saja lahir ke dunia. Ada sisi religius dalam bait ini disisipkan oleh Isbedy, artinya masa lalu di mana kemajuan belum seperti saat

ini masyarakat perkotaan juga masih merupakan masyarakat yang religius.

Keramahan yang dulunya masih sangat menjalari setiap warga tak lagi terlihat dalam puisi ini. Rambu jalanan yang dulunya menjadi tanda pengenal di sudut-sudut kota tak lagi tampak sama bahkan banyak bermunculan nama-nama jalan yang baru akibat perkembangan kota yang begitu pesat.

Hartomo dan Aziz (1999:237) menyatakan bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang individualis. Sikap individualisme ini timbul karena perbedaan antara pendidikan dan status sosial. Sifat gotong-royong sudah jarang ditemui di kota. Masyarakat kota lebih rentan menyelesaikan masalah sendiri tanpa harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota masyarakat lainnya. Tingkat pendidikan warga kota yang tinggi menyebabkan warga kota mampu menyelesaikan masalah dengan perorangan.

4. Jangan Jadikan Aku Batu di Kota Ini, menceritakan tentang modernitas, bencana alam juga kepentingan elit.

Jangan jadikan aku batu
di kota ini--- sebongkah
yang kelak kau ukir
sebagai patung di taman

Sewaktu-waktu hanya
menunggu tamu
datang dan pergi. tanpa
senyuman,

Apalagi siuman--- tepi jelmakan
aku sebagai air, hujan yang
menyejukkan. bukan banjir
hingga kotaku ini tak bertanda

Bukit-bukit diruntuhkan, pantai
ditimbun demi kota baru—ah,
untuk kematian kami. sebuah
kematian tak perlu kuburan;
ombak akan mengubur---

Maka sekali lagi, jangan
jadikan aku batu. sebongkah
yang kelak kau ukir sebagai
patung menemani
Walikota pada jam-jam
Kunjungan ke jalan-jalan

/10 Agustus 2016.

Ketika sebuah kota dibangun tentu akan banyak daerah yang dikeruk tanahnya, apakah itu berupa bukit atau pepohonan yang juga menjadi korban dari pembangunan kota. Seperti yang dituliskan Isbedy pada bait ke empat, pengarang ingin menceritakan keresahannya terhadap hal tersebut, sebab jika semua tempat sudah dijadikan pembangunan dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat, lalu demi pembangunan kota maka pemerintah dan pemodal tak segan untuk menggerus habis pepohonan, meratakan bukit-bukit jika sudah demikian maka bencana juga tak segan untuk datang. Semisal banjir yang disebabkan tidak ada lagi pepohonan, selokan yang tersumbat atau yang disebabkan oleh sampah yang menggantung.

5. Di Sebuah Kota: Seulas Bibir, Aroma Kopi, kemajuan kota yang ditandai dengan banyaknya kafe dan tempat hiburan.

Lalu malam: dan kota ini yang pertama kali kumasuki menebarkan parfum serta aroma kopi. “kaukah yang menyeduh dan kau sajikan untukku di meja perjumpaan ini?” aku masih ragu. mungkin tamu lain lebih dulu datang lalu memesan dua cangkir kopi dan seulas bibir yang dijumpai di jalan sebelum sampai di sini

Dan serasa akulah yang datang lebih dulu. menikmati seulas bibir dan secangkir kopi --- dipetik dari kebun sendiri ---

Sebuah kota yang ku kujungi saat malam menghampiri dan aku kian menepi. di sudut detak jam di hamparan hampir yang kau tunggu

Jika kuinginkan secangkir, tak mesti kau sajikan seulas bibir --- aku masih lama di kota ini ingin kuselipkan malam-malamku : kutitipkan kisahku agar suatu Kelak kau membacanya ---

Dengan mata-hatimu bukan caci-benci sebab pernah terluka

/8 Oktober 2016

Dalam puisi Di Sebuah Kota: Seulas Bibir, Aroma Kopi ini cerita lebih berpusat pada tempat hiburan di mana sebuah kota maju juga bisa ditandai dengan banyaknya kafe-kafe atau warung kopi, tempat masyarakat biasanya bersosialisasi dengan teman sejawat atau pun sekedar teman mengobrol. Dalam potongan puisi pada bait pertama ini, “Lalu malam: dan kota ini yang pertama kali kumasuki menebarkan parfum serta aroma kopi. “kaukah yang menyeduh dan kau sajikan untukku di meja perjumpaan ini?” Isbedy menggambarkan hal yang begitu sering kita jumpai di perkotaan. Masyarakat kota yang sering berkumpul di tempat hiburan, lebih bersikap modern, biasanya masyarakat kota ini akan berkunjung ke tempat hiburan hanya sekedar ingin mencicipi kuliner atau sekedar minum kopi dan mengobrol dengan teman, atau bisa juga ingin mencari kekasih.

Tempat umum dan tempat hiburan seperti ini akan lebih berpeluang untuk menemukan seseorang yang dianggap spesial, bisa dengan kesamaan latar belakang atau pun karena memiliki hobi yang sama.

Di Pematangsiantar yang merupakan kota yang sedang berkembang pesat ini juga banyak bisa dijumpai tempat hiburan atau kafe-kafe tempat masyarakat kota biasa berkumpul. Di sekitar kampus, perkantoran atau pusat kota akan banyak ditemui tempat-tempat semacam ini.

6. Di Tiang Lampu Kau Bersandar, bentuk modernitas, masyarakat sosial dan kemajuan pembangunan.

Di sebuah tiang lampu tengah kota kau bersandar. Ingin merengkuh seluruh keriuhan ke dalam senyummu hingga tak ada lagi lekuk

Dari tubuh kota yang sebelumnya cuma kau singgahi dari mimpi; kota kembar--- orang-orang menyebut--- tak bertepi, juga bebukitan dan berlurah

Di kota yang hanya memiliki dua jalan utama dan ribuan jebakan, kau akan jadi tikus

Bersandar di sebuah tiang lampu jalan

hanya menanti giliran kematian
sebelum siang atau selepas malam

/Lamban Sastra, 5 Oktober 2016

Dalam puisi *Di Tiang Lampu Kau Bersandar* ini pengarang coba menceritakan di setiap baitnya bagaimana tiang-tiang pada tengah kota menjadi saksi dan puncak lampu-lampu jalanan yang indah bisa menjadi begitu puitis. Di kota juga selalu dijumpai jalan utama yang panjang dan lebar dengan sebuah nama yang mudah dicari, namun ketika harus memasuki jalanan kecil maka tentu akan mulai dibingungkan dengan nama-nama jalanan apa lagi bagi orang asing. Digambarkan di sini bahwa siapa saja bisa tersesat jika memasukinya.

Kaitan Antara Sastra Dan Kota

Masyarakat kota memiliki lapisan kehidupan yang berbeda, sehingga menyebabkan penilaian yang berbeda pula, penggambaran mengenai wilayah perkotaan sebagai latar dan sumber masalah yang banyak diolah dalam karya sastra merupakan hal yang lumrah bagi para penyair, secara umum yang menjadi pilihan bagi penyair itu sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Dapat ia rasakan, kemudian dapat menciptakan karakter dari apa yang ia bayangkan dengan latar belakang budaya, visualisasi dan deskripsi baik melalui karya sastra, bahasa dan penyelesaian konflik yang terjadi di dalam tulisan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan karya sastra yang dibahas dalam artikel ini, kemajuan yang telah diperoleh dalam modernitas, terutama dalam masyarakat perkotaan, diikuti oleh berbagai perubahan dan masalah yang harus disadari oleh masyarakat. Sifat dinamis dan kompleks yang tergambar dalam masyarakat perkotaan, dibandingkan dengan masyarakat pedesaan atau rural, memberikan ruang yang lebar bagi sastrawan untuk ikut serta mengingatkan dalam karya-karya mereka. Kehidupan di perkotaan tentu memiliki kompleksitas yang berbeda.

KESIMPULAN

Sastra tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, sebagaimana majunya suatu bangsa justru masyarakatnya akan lebih mencintai kemajuan peradaban termasuk

melalui sastra. Masyarakat di kota dituntut lebih paham tentang sastra. Dari banyaknya karya sastra tentu ada juga yang menceritakan latar belakang kisahnya yaitu berupa suasana di perkotaan. Termasuk kumpulan puisi karya Isbedy Stiawan ZS ini dengan judul *Kota, Kita, Malam*. Buku ini dibagi menjadi tiga tema yaitu Kota dibagian awal, kemudian Kita dibagian kedua, lalu Malam pada bagian akhir.

Di bagian pertama inilah terdapat 15 puisi bertemakan kota namun peneliti mengambil 6 puisi yang paling berkesan dan begitu indah. Dari ke 6 puisi ini bisa dideskripsikan bagaimana sebenarnya kehidupan di kota, tentang masyarakatnya, tentang lampu-lampu jalanan, tentang padatnya bangunan yang terlalu cepat tumbuh menjadikan tokoh dalam cerita tersebut menjadi asing pada kota kelahirannya sendiri.

Banyaknya persoalan masyarakat kota, seperti dampak modernisme, gaya hidup, pekerjaan, norma, produk kebudayaan populer, hingga kemajuan teknologi, telah membawa perubahan penting dalam masyarakat. Selain sisi baik dari perubahan-perubahan tersebut, terdapat banyak sisi kelam dan akibat buruk yang ditimbulkan. Kehadiran karya sastra yang mengangkat isu dan tema urban atau perkotaan merupakan pengingat, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memikirkan ulang situasi yang telah dan sedang terjadi. Pembaca dapat membandingkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat di kota-kota besar dengan kota-kota menengah dan kecil juga di pedesaan. Karya sastra yang dianalisis dalam tulisan ini sebagian besar mengungkap fenomena urbanisme dalam kota.

SARAN

Dalam ke 6 puisi ini kita bisa melihat pertumbuhan sebuah kota, karena inilah persoalan-persoalan yang dihadirkan dalam puisi-puisi di buku ini tidak asing bagi pembaca. Sebab itu, kita, pembaca, dapat mengapresiasi dan mengaitkan persoalan yang ada dengan karya sastra tersebut, serta mencari benang merah, lalu menumbuhkan kesadaran terhadap situasi yang ada.

Sebagaimana kota tempat kita yaitu Pematangsiantar yang sedang bertumbuh kembang, mulai dari banyaknya bangunan yang kian marak dibangun, juga tempat hiburan dan kafe-kafe yang menunjukkan salah satu tolak ukur kota tersebut sedang berkembang. Kafe-kafe menjadi tempat favorit

masyarakat kota untuk bersosialisasi dan melakukan rapat-rapat membicarakan proyek baru atau pun untuk mencari hiburan semata.

Persoalan masyarakat kota yang kompleks dan mulai tidak peduli sesama bisa perlahan dihindari atau dikurangi dengan mengadakan kegiatan sosial bersama, baik tentang kebudayaan, atau juga dapat disentuh lewat apresiasi sastra. Kegiatan ini bisa dilakukan di tempat-tempat umum, semisal pembacaan puisi atau menampilkan pementasan drama di kafe-kafe.

Seiring berkembangnya jaman, minat baca masyarakat kota juga tentu akan meningkat, dalam beberapa hal Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat turut bersama membangun peradaban sastra dalam kota melalui:

1. Turut aktif mendukung masyarakat dalam mengekspos diri di bidang sastra.
2. Memfasilitasi berbagai tempat umum yang dapat dijadikan tempat bangkitnya minat masyarakat di bidang sastra semisal tempat pertunjukan seni, drama, teater atau pembacaan puisi.
3. Sastra dapat menjadi solusi positif bagi masyarakat kota, tempat berkumpul dan bersosial dan berekspresi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar Mata Kuliah Dasar Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Antar Semi. 1990. *Menulis efektif*. Padang ; CV Ankasa Raya

Hartomo dan Aziz. 1999. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara

Hartomo dan Aziz, Arnicun. 2001. *MKDU: Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.

Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : P.T Gramedia

Naaman, Mara. 2011. *Urban Space in Contemporary Egyptian Literature: Portraits of Cairo*.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
New York : Palgrave Macmillan.

Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Denpasar: Pustaka Pelajar.

Semi, M. Atar. 2012. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung : Angkasa

Rotella, Carlo. 1998. *October Cities: The Redevelopment of Urban Literature*. California:

Stiawan, Isbedy ZS. 2016. *Kota, Kita, Malam*. Yogyakarta : BASABASI

Sudarmoko. 2012. *Sastra, Kota, dan Sumatera Barat : Perubahan Masyarakat Perkotaan dalam Karya Sastra*, Leiden University Institute for Area Studies, Leiden, The Netherlands

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru.

Sumardjo, Jacob & Saini K.M. 1997. *Apresiasi Kesusastraan*. Jakarta : Gramedia.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

(THE INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLE, WORKING MOTIVATION, AND WORKING DISCIPLINE TO EMPLOYEE PERFORMTANCE IN PEMATANGSIANTAR GOVERNMENT)

Arolina Sidauruk

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar
Jalan Merdeka No. 4 Pematangsiantar
arolina.sidauruk@gmail.com

Diterima : 3 Mei 2018; Direvisi 5 Juni 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Diterapkannya sistem desentralisasi memberikan kewenangan yang besar pada daerah untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur. Namun demikian, keberhasilan tersebut terletak pada peran seorang pemimpin, terutama kepala daerah atau kepala wilayah. Gaya atau perilaku kepemimpinan seorang kepala daerah atau kepala wilayah akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik mengingat di era reformasi sekarang ini, masyarakat semakin cerdas dan kritis dalam melihat dan merespon serta menyikapi segala bentuk implementasi pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai contoh gaya yang otoriter kepada bawahan dalam organisasi publik maupun terhadap masyarakat jelas tidak akan cocok. Belum lagi perhatian yang ditujukan kepada motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai guna mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk memotret Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Kata kunci : gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja

ABSTRACT

The adoption of a decentralized system provides substantial authority in the regions to develop the capacity of local governments in administering government affairs through capacity building of apparatus resources. Nevertheless, the success lies in the role of a leader, especially the head of the region or the head of the region. The style or behavior of the leadership of a regional head or regional head will greatly affect the service to improve the quality of public services considering in the current era of reform, the more intelligent and critical society in seeing and responding and mensikapi all forms of public service implementation that must be given by the government to the community. For example an authoritarian style to subordinates in public organizations as well as to society is obviously unsuitable. Not to mention the attention directed to Motivation and work discipline on the performance of employees in order to achieve the expected results. This study was conducted to photograph the Influence of Leadership Style, Work Motivation and Work Discipline on Employee Performance In Pematangsiantar City Government.

Keywords : *style of leadership, motivation, discipline work*

PENDAHULUAN

Pada sebuah organisasi pemerintahan, sumber daya manusia yang ada didalamnya terdiri dari pemimpin dan pegawai. Setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan suatu organisasi pemerintah yang memiliki personil/pegawai. Untuk mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah, yaitu dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat. Peranan seorang pemimpin penting untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan demikian juga halnya dengan organisasi pemerintahan di Kota Pematangsiantar, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Kerlinger dan Padhazur (2002) faktor kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pegawai dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan seorang pemimpin dalam pelayanan publik. Dengan demikian, gaya kepemimpinan menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan kinerja pegawai yang dipimpinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diteliti: **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Pemerintah Kota Pematangsiantar”**.

Dari uraian pendahuluan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, sikap serta lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar?
- Bagaimana motivasi dan disiplin kerja PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar?
- Bagaimana kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri dapat mempengaruhi kinerja SDM pada Pemerintahan Kota Pematangsiantar?

- Bagaimana pengaruh jarak tempat tinggal PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan beberapa PNS dikalangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar. Selain itu ada data sekunder berupa dokumen resmi data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan, yaitu melakukan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Objek penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Pematangsiantar secara keseluruhan dan khususnya di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar kondisi tahun 2017/2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah pegawai di Pemerintah Kota Pematangsiantar kondisi Tahun 2016 tercatat 5.050 orang. Sebanyak 24,09 % diantaranya merupakan golongan IV, 52,43 % merupakan golongan III, 17,78 % golongan II dan 1,70 % sisanya merupakan golongan I seperti tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah PNS Kota Pematangsiantar Menurut Golongan Tahun 2010-2016

Tahun	Golongan				Total
	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	86	898	2.648	1.217	5.050
2015	100	1.306	3.176	1.951	6.533
2014	100	1.306	3.176	1.951	6.533
2013	97	1.136	2.885	1.952	6.070
2012	68	1.291	2.789	1.973	6.121
2011	78	1.472	2.443	2.441	6.471
2010	70	1.650	2.509	2.395	6.567

Meskipun jumlah Pegawai dari tahun ketahun tidak tetap, seiring dengan berjalannya waktu bahwa keberadaan PNS dari berbagai pangkat dan golongan sangatlah menentukan perkembangan kualitas pelayanan publik untuk

keberhasilan pembangunan di Kota Pematangsiantar. Hal ini dapat terlihat dari kehadiran para PNS tersebut di setiap hari. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar dalam menegakkan disiplin dikalangan PNS, khusus di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar. Misal jumlah PNS terdata sebanyak kurang lebih 490 orang, tetapi yang apel setiap hari hanya separuh dari jumlah pegawai yang terdaftar. Hingga saat ini belum ada kepastian apa yang menjadi alasan PNS yang tidak pernah mengikuti apel tersebut untuk tidak hadir. Sebab kehadiran PNS di kantor selalu diawali dengan apel pagi. Tidak ada pengecualian kehadiran, baik golongan atau pangkat tertentu. Tapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak PNS yang tidak pernah apel baik pagi maupun sore hari secara terus menerus, sehingga kesannya para PNS yang hadir adalah orang yang sama setiap hari. Padahal mereka telah menerima berbagai fasilitas dari Pemerintah seperti : pemakaian kendaraan roda empat serta roda dua bagi yang menduduki jabatan/eselon dan pemberian insentif serta lauk pauk. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan bagi PNS yang rajin mengikuti apel dan disiplin. Padahal kita tidak menyadari bahwa masyarakat sebenarnya selalu mengamati dan menilai faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dikalangan PNS dan sangat mempengaruhi kinerja, motivasi dan disiplin Pegawai di Kota Pematangsiantar. Untuk itu perlu diadakan penelitian dan menjawab pertanyaan *Bagaimana sebenarnya Pengaruh Gaya Kepemimpinan, sikap serta lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar?*

Berikut ini tipe dan gaya kepemimpinan :

a. Gaya pemimpin otokratik

Dilihat dan persepsinya seorang pemimpin yang otokratik adalah seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya. antara lain dalam bentuk:

- 1) Kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi seperti mesin dan dengan demikian kurang menghargai harkat martabat mereka.
- 2) Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa

mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.

- 3) Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain:

- Menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya.
- Dalam menegakkan disiplin menunjukkan keangkuhannya.
- Bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi.

Dari uraian di atas pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai sangat jelas kelihatan, sebab bisa saja gaya pemimpin yang otokratik kurang cocok dizaman sekarang, apalagi sang pemimpin kurang memperhatikan kesejahteraan bawahannya.

b. Gaya pemimpin yang demokratis

Menurut GR. Terry pemimpin yang demokratis mampu menimbulkan partisipasi aktif dari bawahannya menuju pada tujuan yang ingin dicapainya oleh organisasi/lembaga yang bersangkutan. Tipe kepemimpinan yang demokratis sangat jarang dijumpai pada era globalisasi sekarang ini, sebab masih ada pemimpin yang kurang memanfaatkan bawahannya pada setiap kegiatan. Contohnya banyak pemimpin hanya mengenal beberapa orang saja dan sering melanggar tupoksi masing-masing bawahan. Sehingga PNS yang lain menjadi apatis dalam setiap kegiatan, padahal tanggung jawabnya di kegiatan tersebut sangatlah besar. Akibat dari perlakuan pemimpin seperti ini, bawahan menjadi tidak nyaman, saling sikut dan ada yang merasa dekat kepada sang pemimpin.

c. Gaya kepemimpinan bebas (Laissez faire)

Gaya kepemimpinan bebas (Laissez faire) adalah cara seorang pimpinan dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan. Pada gaya kepemimpinan bebas ini pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada bawahannya, sedangkan pemimpin sendiri hanya memainkan peranan kecil, pemimpin memfungsikan dirinya sebagai penasehat yang dilakukan dengan memberi kesempatan berkompromi atau bertanya bagi anggota kelompok yang memerlukan. Bawahan memiliki kebebasan penuh untuk proses

pengambilan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang menurut karyawan paling sesuai dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Pemimpin tidak pernah melakukan pengawasan terhadap sikap, tingkah laku perbuatan dan kegiatan bawahan karena pemimpin telah percaya dan menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada bawahan sehingga pemimpin tidak mengambil andil dalam proses kepemimpinannya.

Gaya kepemimpinan ini dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam pengambilan keputusan yang tepat serta kreativitas untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan adanya kepemimpinan yang bebas ini para karyawan dapat menunjukkan persoalan yang dianggap penting di dalam organisasi dan tidak selalu bergantung pada atasan. Gaya kepemimpinan ini juga memiliki sisi negatif yaitu, jika karyawan terlalu bebas tanpa ada pengawasan yang kuat dari atasan, ada kemungkinan penyimpangan dari peraturan dan prosedur yang ada dapat terjadi. Pengambilan keputusan yang dapat memakan banyak waktu bila karyawan kurang berpengalaman dan dapat terjadi salah tindak.

Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana motivasi dan disiplin kerja PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi menurut *Malayu*. Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. (*Malayu, 2005:143*)

Menurut *Uno*, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat; dorongan dan kebutuhan; harapan dan cita-cita; penghargaan dan penghormatan. (*Uno, 2007*).

Menurut pengamatan dilapangan bahwa sebenarnya PNS di Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat mengharapkan adanya faktor pendorong atau motivasi untuk peningkatan SDM, terkadang dengan alasan dana yang tidak tersedia, PNS menjadi malas bekerja, insentif yang belum memadai kalah dengan kebutuhan di rumah tangga dan

kebutuhan sekolah anak-anak, hal inilah yang memicu merosotnya kinerja dan disiplin para PNS. Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Pematangsiantar terhadap PNS yang telah mampu menunjukkan prestasinya, seharusnya diberikan suatu penghargaan. Tujuan pemberian penghargaan adalah untuk memotivasi gairah dan loyalitas PNS serta mendorong pegawai lain untuk lebih giat dan mampu menggali potensi yang ada pada dirinya.

Bagi PNS di Pemerintah Kota Pematangsiantar bentuk penghargaan yang diberikan adalah pemberian insentif (TPP) yang jumlah besarnya bervariasi sesuai jabatan, pangkat dan golongan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi PNS untuk lebih rajin, disiplin, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sedangkan di unit perencanaan ada bentuk penghargaan berupa pendidikan jenjang S2 dan S3 yang diharapkan akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain dalam hal Sumber Daya Manusia. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi bila usaha kita sudah menyentuh level internasional. Akan ada banyak sorotan dan kritikan yang kita terima untuk membuat sebuah lembaga yang sehat dengan tingkat manajemen yang baik, sehingga dibutuhkan cara memotivasi PNS yang benar.

Permasalahan berikutnya adalah Bagaimana kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan kerja, kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri dapat mempengaruhi kinerja SDM pada Pemerintahan Kota Pematangsiantar?

Menurut *Abraham Maslow* kebutuhan fisiologi sangat mendasar, paling kuat dan paling jelas dari antara sekian kebutuhan adalah untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Yaitu kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal, seks tidur dan oksigen. Manusia akan menekan kebutuhannya sedemikian rupa agar kebutuhan fisiologis (dasar) nya tercukupi.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa hampir seluruh PNS mempunyai pinjaman ke Bank Pemerintah, hal ini akibat banyaknya kebutuhan yang harus ditutupi, antara lain; biaya sekolah/kuliah anak, biaya hidup sehari-hari, dan biaya-biaya untuk mengikuti adat (kebutuhan sosial). Tentu hal ini sangatlah mempengaruhi kinerja PNS. Demikian juga halnya dengan Kebutuhan Aktualisasi Diri,

kebutuhan ini mencakup pemenuhan diri (*self-fulfillment*), realisasi seluruh potensi, dan kebutuhan untuk menjadi kreatif. Mereka yang telah mencapai level aktualisasi diri menjadi lebih manusiawi, lebih asli dalam mengekspresikan diri, tidak terpengaruh oleh budaya. Agak berbeda dengan perkembangan kebutuhan lain, bila kebutuhan penghargaan ini terpenuhi, tidak secara otomatis kebutuhan meningkat ke aktualisasi diri. Maslow menemukan bahwa mereka yang lepas dari kebutuhan penghargaan dan mencapai kebutuhan aktualisasi diri adalah yang memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kebenaran, keindahan, keadilan, dan nilai-nilai sejenis yang oleh Maslow disebut sebagai B-values (*Being-values* kebutuhan akan pertumbuhan).

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan penghargaan terhadap diri, keyakinan, kompetensi, dan pengetahuan bahwa orang lain mendukung dengan penghargaan yang tinggi. Menurut Maslow, kebutuhan akan penghargaan ini terdiri dari dua tingkatan, yaitu : reputasi dan harga diri (*self-esteem*).

Apa pentingnya memberikan penghargaan pada PNS?

Dengan memberikan penghargaan pada bawahan yang berprestasi menunjukkan bahwa sebagai pimpinan, sudah peduli dan wajib memberikan penghargaan kepada bawahan atas apa yang telah mereka dedikasikan untuk lembaga. Jadi bila ada satu bawahan yang mendapat reward cukup menarik dari sang pemimpin, maka PNS yang lain pun akan turut termotivasi untuk mendapatkan hal yang sama.

Oleh karena itu pemimpin harus bisa mengajak mereka untuk bekerja sama dengan baik, buatlah suatu perjanjian bahwa setiap prestasi akan mendapatkan penghargaan di akhir tahun. Hal ini jauh akan lebih berkesan dan membuat mereka merasa senang, karena merasa bahwa kinerja mereka selama ini tidak sia-sia. Sampai saat ini jarang sekali pemimpin yang mau berusaha memberikan penghargaan pada bawahannya, padahal bawahan tersebutlah yang membantunya untuk mendapat penilaian dan pengakuan yang lebih baik dari pihak atasan. Dengan menghargai jasa mereka, itu sudah lebih dari cukup dan bisa membuat sang pemimpin lebih dihargai serta disegani sebagai atasan.

Dengan adanya pemberian penghargaan sebagai salah satu cara motivasi kerja diharapkan pemimpin bisa mendapatkan

kinerja bawahan yang cukup baik dan lebih baik dari sebelumnya.

Oleh karena kurangnya disiplin pegawai dalam kehadiran sehari-hari tentu menimbulkan pertanyaan “*Bagaimana pengaruh jarak tempat tinggal kinerja PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar*”

Pengertian Jarak tempat tinggal :

Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud jarak adalah ruang sela yang menunjukkan panjang luasnya antara satu titik ketitik yang lain. Berdasarkan defenisi tersebut kurang lebih artinya adalah jauh dekatnya ruang sela yang harus ditempuh oleh PNS. Tempat tinggal adalah keberadaan PNS bernaung atau tinggal disebuah rumah, tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal bersama orang tua, keluarga, endekost atau menumpang pada rumah orang lain.

Jadi tempat tinggal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah rumah yang ditempati PNS sehari-hari.

Dari keterangan di atas bahwa sesungguhnya jarak menunjukkan keberadaan seseorang untuk beraktifitas, seiring dengan waktu. Demikian juga halnya dengan jarak tempuh para PNS yang bekerja di Pemerintah Kota Pematangsiantar, belum dapat dikategorikan dengan kata “Jauh”, sebab letak/lokasi perkantoran disetiap Organisasi Perangkat Daerah dengan domisili PNS bisa ditempuh dengan hitungan menit. Contohnya letak Kantor Walikota Pematangsiantar sangat strategis, terletak di pusat Kota. Kendaraan berbagai jenis lalu lalang, bahkan PNS 70% mempunyai roda 2 (dua) dan 30% mempunyai roda 4 (empat). Akses ke segala penjuru sangat memungkinkan untuk beraktivitas lebih baik. Hal ini tergambar dari rutinitas para PNS yang sangat menonjol antara lain, dapat meluangkan waktunya untuk mengantar jemput anak ke sekolah, dapat mengikuti adat/pesta, mengerjakan pekerjaan sampingan untuk membantu ekonomi keluargadan sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gaya kepemimpinan yang efektif dibutuhkan seorang pemimpin untuk dapat meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai tujuan organisasi sebagai instansi pelayanan publik. Gaya

- kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang baik dalam peningkatan kinerja pegawai.
2. Motivasi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik motivasi yang diberikan maka kepuasan kerja pegawai akan semakin meningkat. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil.
 3. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. Juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja pegawai maka kinerja pegawai akan semakin dapat di perhitungkan.
 4. Jarak menunjukkan keberadaan seseorang untuk beraktivitas, seiring dengan waktu. Diharapkan seorang PNS harus mampu mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja, pelayanan publik dan tanggung jawab terhadap keluarga.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat disarankan kepada pihak Pemerintah dan Pimpinan OPD agar dapat lebih memperhatikan tingkat kebutuhan pegawai terutama kebutuhan akan penghargaan, berupa fasilitas, insentif dan peningkatan SDM melalui pendidikan. Dengan adanya pengakuan atas hasil kerja, serta penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai di dalam bekerja. Sistem pengawasan yang telah ada saat ini sebaiknya ditinjau kembali agar kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara adil, sehingga disiplin, kinerja dapat lebih ditingkatkan.

Dengan adanya penegakan aturan dan perlakuan yang adil dari Pimpinan kepada bawahan akan dapat memberikan kepuasan terhadap pegawai dalam bekerja dan meraih prestasi. Selain itu, kuantitas serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh para pegawai hendaknya lebih ditingkatkan, maka kinerja serta target organisasi diseluruh OPD akan dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Malayu S.P. Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.

Kharul, 2008, Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja.

Sugiyono, 2009, Metodologi Penelitian, Kualitatif dan R&D cetakan ke- 6 Februari 2009.

Hasibuan. S. P Malayu, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, (Ed. Rev). Jakarta : Bumi Aksara.

Mangkuprawira, Sjafri. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Masrukhin dan Waridin. 2004. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. EKOBIS. Vol 7, No 2. Hal : 197-209.

Mangkuprawira, Sjafri. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Masrukhin dan Waridin. 2004. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai.

EKOBIS. Vol 7, No 2. Hal: 197-209.
Teori motivasi Abraham maslow (Robins, 2006)

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANGSIANTAR

(ANALYSIS OF GREEN OPEN SPACE DEVELOPMENT POLICY IN PEMATANGSIANTAR CITY)

¹Robert Tua Siregar, ²Benny Simatupang, dan ³Dermawan Perangin-angin

Staf Pengajar Pascasarjana, Universitas Simalungun Jl. Sisingamangaraja, No. 9 Pematangsiantar
tuasirobert@usi.ac.id

Diterima : 16 Mei 2018; Direvisi 7 Juni 2018; Disetujui 26 Juni 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang tersedia saat ini di Kota Pematangsiantar serta mengetahui kebutuhan dan pengelolaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Dimana yang termasuk dalam jenis data kualitatif ini adalah, kondisi fisik lokasi studi, kebijakan pemerintah dalam mengelola RTH publik, Data kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka-angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai yang diinginkan dengan menggunakan metode perhitungan sederhana. Dalam studi ini yang termasuk jenis data kuantitatif yaitu, luasan RTH, jumlah penduduk dan perkembangan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik menjadi *entry point* dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah/daerah. Peranan Ruang Terbuka Hijau tidak terlepas dari berbagai fungsi yang melingkupinya, yaitu fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetis. Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik eksisting di Kota Pematangsiantar hanya seluas 2.621,93 Ha (32,78 %) dari keseluruhan luas Kota Pematangsiantar yang mencapai 79,971 Km²

Kata kunci : ruang terbuka hijau, fungsi peranan, penggunaan lahan kota.

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of Green Open Space (RTH) Public currently available in the City Pematangsiantar and know the needs and management of development of Green Open Space Green Open Space (RTH) Public in accordance with the demands of Law Number 26 Year 2007 in Pematangsiantar City. This research uses this type of research including qualitative and quantitative data. Where included in this type of qualitative data is, the physical condition of the study location, government policy in managing public green space, quantitative data, ie data that describes the condition of the research location with tabulation of numbers - numbers that can be calculated to determine the desired value by using a simple calculation method . In this study which includes the type of quantitative data that is, the extent of green open space, population and population development. The results showed that, the availability of Open Space Green Public became the entry point in assessing the success of development of a region / region. The role of Open Space Green is inseparable from the various functions that encompass it, namely ecological, social, economic, and aesthetic functions. Based on the findings of research on the availability of existing public green open space in Pematangsiantar City is only 2.621,93 Ha (32,78 %) of the total Pematangsiantar City reaching 79,971 Km²

Keywords : green open space, role function, and urban land use.

PENDAHULUAN

Secara fundamental ruang terbuka hijau pada dasarnya memiliki nilai sosial dan ekonomis yang sangat tinggi bagi kehidupan masyarakat khususnya di daerah perkotaan. Diantaranya dengan tersedianya ruang terbuka hijau maka fungsi ekologi akan berjalan dengan baik karena kadar karbondioksida dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada disekitar lingkungan, disamping itu meningkatkan jumlah oksigen serta dapat menjadi area resapan air. Bahkan dalam nilai sosial dimana dapat menjadikan pertemuan warga dalam menjalankan silaturahmi dengan keluarga masing-masing, sedangkan dalam aspek ekonomis dengan adanya ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai varitas buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan untuk dikonsumsi atau dijual.

Dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 dikemukakan bahwa sebagai salah satu dasar yang mengayomi upaya untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas melalui pengelolaan ruang terbuka hijau kota sesuai dengan kebutuhan kota. Maka ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas wilayah kota sedangkan ruang terbuka privat 10 % (sepuluh persen).

Pematangsiantar merupakan salah satu kota penunjang pariwisata yang menyediakan berbagai aktivitas perdagangan dan jasa. Kota ini telah menjadi daerah strategis sebagai perlintasan menuju tempat wisata Danau Toba. Sebagai daerah perkotaan, keberadaan dan ketersediaan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi skala prioritas dalam meningkatkan kualitas dan kondisi lingkungan yang asri, nyaman dan bersih. Disamping itu manfaat ekonomi dan sosial dari ketersediaan ruang terbuka hijau tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kota Pematangsiantar.

Pada saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting di Kota Pematangsiantar mencapai $\pm 2.621,93$ Ha atau sekitar 32,78 % dari luas keseluruhan wilayah Kota Pematangsiantar. Bila dibandingkan dengan jumlah luas ruang terbuka hijau eksisting dengan kebutuhan ruang terbuka hijau

berdasarkan luas wilayah mencapai $\pm 2.399,2$ Ha, dengan jumlah penduduk seluas 125,2 Ha, dan kebutuhan pemenuhan oksigen penduduk seluas 693,041 Ha, maka secara umum luas kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Pematangsiantar masih terpenuhi. Namun bila dibandingkan dengan luas ruang terbuka hijau yang dialokasikan sejak tahun 2009 oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memiliki luas keseluruhan ruang terbuka hijau seluas 25,5 Ha (Badan Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar, 2009), maka jumlah ini masih sangat jauh dari luas kecukupan akan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan ketiga pendekatan tersebut.

Berdasarkan berbagai permasalahan mengenai ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar, maka penulis hanya membatasi masalah kajian dengan melakukan penelitian pada permasalahan mengenai ketersediaan, kebutuhan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) bagi Publik (masyarakat) di Kota Pematangsiantar. Bagaimanakah pengelolaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Pematangsiantar?

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kota Pematangsiantar. Penetapan lokasi ini sebagai objek penelitian disebabkan perkembangan Kota Pematangsiantar tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas pembangunan disegala bidang. Disamping itu peningkatan jumlah penduduk juga menjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi ini karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan yang dapat mengurangi ruang terbuka hijau di wilayah Kota Pematangsiantar.

METODE

Untuk menjawab rumusan masalah serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan metode analisis berupa:

a. Metode Analisis Deskriptif

Dengan pendekatan deskriptif (uraian–uraian, pengertian-pengertian, serta penjelasan terhadap objek penelitian) analisis ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan wilayah studi dan eksisting penggunaan lahan, sesuai dengan data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan kedalam bentuk tabel uraian dan peta.

b. Metode Analisis Kuantitatif

Metode analisis yang digunakan ini adalah analisis bunga berganda untuk menjawab arahan pengembangan ruang

terbuka hijau di Kota Pematangsiantar dengan mengetahui perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang, yaitu dengan rumus:

$$Pt = Po (1 + r)^n$$

Keterangan

Pt = Jumlah penduduk tahun akhir

Po = Jumlah penduduk tahun awal

r = Rata-rata pertumbuhan penduduk yang diselidiki berdasarkan data masa lampau.

l = Ketetapan rumus

n = Tahun proyeksi (Warpani;1984)

c. Analisis Perkiraan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota

Model yang digunakan dalam menentukan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) ini berdasarkan standar/pedoman yang berlaku bahwa 30% ketersediaan RTH dari luas wilayah Kota sehingga pemenuhan 30% menjadi

pertimbangan lokasi-lokasi RTH tersebut. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pengelolaan dan sistem yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting

Luas daratan Kota Pematangsiantar adalah 79,971 Km², yang secara Administratif terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Siantar Marihat, Kecamatan Siantar Marimbun, Kecamatan Siantar Selatan, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Martoba, dan Kecamatan Siantar Sitalasari.

Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Pematangsiantar dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Pematangsiantar Berdasarkan Jumlah Kecamatan

No	Kecamatan/District	Luas (Km ²)	Persentase Luas Kecamatan(%)	Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Siantar Marihat	7,825	9,78	7
2	Siantar Marimbun	18,006	22,52	6
3	Siantar Selatan	2,020	2,53	6
4	Siantar Barat	3,205	4,01	8
5	Siantar Utara	3,650	4,56	7
6	Siantar Timur	4,520	5,65	7
7	Siantar Martoba	18,022	22,54	7
8	Siantar Sitalasari	22,723	28,41	5
		79,971	100,00	53

Sumber : BPS, Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dikemukakan bahwa kecamatan yang terluas di Kota Pematangsiantar adalah Kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah mencapai 22,723 Km² (28,41%), selanjutnya disusul Kecamatan Martoba dengan luas 18,022 Km² (22,54%), Kecamatan Marimbun dengan luas 18,006 Km² (22,52%), Kecamatan Marihat dengan luas 7,825 Km² (9,78%), Kecamatan Siantar Timur dengan luas 4,520 Km² (5,65%), Kecamatan Siantar Utara dengan luas 3,650 Km² (4,56%), Kecamatan Siantar Barat dengan luas 3,205 Km² (4,01%) dan ukuran wilayah yang paling kecil adalah terletak di Kecamatan Siantar Selatan yaitu dengan luas 2,020 Km² (2,53%).

Dalam menyusun suatu Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kota

Pematangsiantar tentu tidak terlepas dari kondisi mikro dan makro wilayah yang akan disusun. Maka harus dipahami secara fundamental mengenai kondisi fisik Kota Pematangsiantar baik itu dalam aspek letak administrasi dan geografis, demografi, kondisi tanah dan iklim serta pola pemanfaatan lahan yang akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung yaitu dengan mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan serta meningkatkan kualitas kawasan lindung melalui pelaksanaan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis yang berlaku. Kebijakan pemerintah Kota Pematangsiantar yang dijabarkan dalam program penataan

wilayah melalui program-program pembangunan. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Pematangsiantar.

Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH Publik dalam kota tersebut yaitu, keamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Dari hasil observasi lapangan di Kota Pematangsiantar, terdapat beberapa kawasan RTH yang dapat diidentifikasi, diantaranya adalah hutan kota, taman kota, taman bermain olahraga, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau tepi jalan dan median jalan,

dan serta ruang terbuka pemakaman. Berdasarkan analisis penutupan lahan, maka luas Ruang Terbuka Hijau eksisting yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah seluas 2.621,93 Ha dari keseluruhan luas wilayah Kota Pematangsiantar yang berada pada 19 lokasi dengan penyebarannya di 8 (delapan) kecamatan.

Data mikro mencakup hasil survey lapangan dengan melihat sebaran dan melakukan identifikasi/overlay Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar serta alternatif-alternatif lahan yang dapat dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Adapun klasifikasi ruang terbuka hijau di Pematangsiantar dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Identifikasi Luasan RTH Kota Pematangsiantar

No	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Kota	376	4,7
2.	Taman Kota	28,50	0,35
3.	Taman Lingkungan	48,45	0,60
4.	Tempat Pemakaman Umum	86,41	1,08
5.	Jalur Hijau Jalan	42,3	0,52
6.	Jalur Sempadan Rel Kereta Api	14,9	0,18
7.	Sempadan Sungai	933	11,66
8.	Sempadan Mata Air	75,36	0,94
9.	Lap. Olah Raga	37,78	0,47
10.	Perkarangan Perumahan	767,02	9,59
11.	Kawasan Perkantoran	16,98	0,21
12.	Kawasan Perdagangan	46,84	0,58
13.	Kawasan Pendidikan	37,06	0,46
14.	Kawasan Kesehatan	18,25	0,22
15.	Kawasan Industri	67,74	0,84
16.	Pelatihan Militer	2,98	0,03
17.	Kawasan Pariwisata	15,84	0,19
18.	Kawasan Perikanan	1,0	0,01
19.	Kawasan Fasilitas Lainnya	5,52	0,06
Jumlah Luasan Eksisting RTH		2.621,93	32,78

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil penelitian, berdasarkan luas wilayah Kota Pematangsiantar yang dianalisis dari standar yang ditetapkan yaitu 30% dari luas wilayah, maka dapat diketahui bahwa luasan minimum kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Pematangsiantar dari luasan 2.621,93 Ha atau 32,78 %. Luas kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan luas wilayah dapat diketahui dari hasil pengalihan antara

luas wilayah administrasi Kota Pematangsiantar dengan standar kebutuhan yang telah ditetapkan. Maka untuk tahun 2018 dan beberapa tahun kedepan kemungkinan luasan kebutuhan ruang terbuka hijau ini tidak akan berubah terkecuali terdapat perubahan luasan wilayah administrasi Kota Pematangsiantar. Karena luas kebutuhan ruang terbuka hijau yang ditetapkan sebesar

30% dihitung dari luas wilayah administrasi kota telah terpenuhi.

2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Pematangsiantar

Kondisi eksisting dan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada dasarnya merupakan suatu bagian yang mutlak diperhatikan pada suatu daerah perkotaan secara berkesinambungan. Dalam melihat lingkup mikro Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pematangsiantar, didasarkan pada beberapa penilaian, diantaranya adalah:

a. Analisis Kependudukan

Pengembangan sosial dan kependudukan diarahkan untuk menghimpun informasi yang terkait dengan penilaian apakah sumberdaya manusia yang ada di Kota Pematangsiantar mampu untuk mengelolah dan memanfaatkan berbagai potensi alam yang dimiliki. Analisis kependudukan, dapat dikaji dalam beberapa aspek, diantaranya adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Diharapkan dengan alat analisis tersebut dapat memberikan gambaran umum tentang potensi sumberdaya manusia Kota Pematangsiantar sebagai petunjuk dalam pengembangan perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Salah satu metode analisis yang dapat diterapkan adalah metode ekstrapolasi, yaitu dengan melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk dimasa lalu dan melanjutkan kecenderungan pertumbuhan tersebut pada masa yang akan datang dalam bentuk proyeksi. Adapun proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Pematangsiantar dalam rentang 2010 – 2035 dengan melihat rata-rata pertumbuhan sebesar 0,9412 % (Sumber: BPS Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2016) dapat dikemukakan pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2010-2035

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk
2010	234.698
2015	245.104
2020	256.858
2025	269.175
2030	282.083
2035	295.610

Sumber: Hasil Analisis

b. Analisis Estimasi Penyediaan RTH Kawasan Perkotaan

Dalam melakukan estimasi pemanfaatan lahan yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan fungsinya dengan mengacu pada luas wilayah Kota Pematangsiantar serta keberadaan jumlah penduduk maka penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan RTH Privat.
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% dengan pembagian, 20% Ruang Terbuka Hijau diperuntukkan bagi RTH Publik sedangkan sebesar 10% diperuntukkan bagi RTH Private.
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Dalam melakukan estimasi RTH di Kota Pematangsiantar berdasarkan luas total Kota Pematangsiantar mencapai 79,971 km². Adapun keseluruhan luas Kota Pematangsiantar wajib ditetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 %. Maka dengan demikian dapat dilakukan estimasi bahwa peruntukan RTH di Kota Pematangsiantar adalah sebesar 23,991 Km². Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: untuk RTH Publik sebesar 20 % yaitu seluas 15,994 Km², sedangkan RTH Private sebesar 10 % yaitu seluas 7,997 Km². Adapun proyeksi kebutuhan RTH di Kota Pematangsiantar dapat dikemukakan pada tabel 4. berikut ini:

Tabel 4. Proyeksi Kebutuhan RTH Publik dan Private Berdasarkan Luas Kawasan Pematangsiantar

Jenis RTH	Luas (Km ²)	Persentase (%) RTH	Luas RTH (Km ²)
RTH Publik	79,971	20	15,99
RTH Private	79,971	10	7,99
Jumlah Total RTH		30	23,99

Sumber: Hasil Analisis

c. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Dalam melakukan perbandingan RTH eksisting dengan RTH Publik di Kota Pematangsiantar serta proyeksi kekurangan

dari RTH yang diperuntukkan dalam memenuhi standar sebesar 30 % dari total wilayah dari suatu pemerintahan kota atau kabupaten dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Luas RTH Publik Eksisting dan Proyeksi RTH Publik dan Private

Luas RTH Eksisting			Luas RTH Estimasi			Luas RTH Penambahan		
Jenis RTH	Luas (Km ²)	(%)	Jenis RTH	Luas (Km ²)	(%)	Jenis RTH	Luas (Km ²)	(%)
Non RTH	53,76	67,22	Non RTH	55,98	70	Non RTH	-	-
RTH Publik	16,42	20,53	RTH Publik	15,99	20	RTH Publik	-	-
RTH Private	9,79	12,24	RTH Private	7,99	10	RTH Private	-	-

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel 5, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah RTH di Kota Pematangsiantar tidak perlu dilakukan penambahan luas lahan RTH baik itu untuk RTH Publik dan Private. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah RTH Publik yang eksisting pada saat ini sekitar 16,42 Km² (20,53%) sedangkan RTH Private pada saat ini sekitar 9,79 Km² (12,24%). Jika melalui estimasi dari ketetapan peraturan pemerintah mengenai luas RTH Kabupaten dan Kota sebesar 30 % maka RTH Kota Pematangsiantar sudah mencukupi dan memenuhi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Pematangsiantar

Dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau tentu diperlukan suatu konsep, perencanaan dan strategi yang tersusun secara komprehensif. Sehingga usaha dalam mengimplementasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dapat direalisasikan dengan tahapan-tahapan yang disusun pemerintah

daerah. Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan disebutkan bahwa wewenang dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota dibagi menjadi empat kegiatan, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Keempat kegiatan tersebut perlu diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengabaikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pertama, dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota merupakan wewenang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota Pematangsiantar yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar. Dalam proses penyusunan RTH Kota, maka Pemerintah Daerah akan dibantu instansi terkait sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

Kedua, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota

dimana peran swasta dan masyarakat juga memiliki aspek penting dalam keberhasilannya. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Pematangsiantar khususnya RTH Publik, senantiasa dilaksanakan dibawah tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup dan sesuai satuan kerja yang ditunjuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Ketiga, kegiatan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, maka pemerintah daerah hendaknya menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan berupa tenaga ahli, pusat pendidikan dan latihan pembibitan dengan dibantu dinas atau instansi yang terkait dalam menunjang keberhasilan pemanfaatan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota. Pemerintah Daerah juga harus menyediakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendorong dana dari swadaya masyarakat atau swasta untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota di Kota Pematangsiantar.

Keempat, Pemerintah Daerah mengendalikan seluruh kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota dengan tidak memberikan izin perubahan penggunaan Ruang Terbuka Hijau Kota untuk kepentingan lainnya. Pemerintah Daerah berkewajiban mengendalikan sebagai bentuk pengawasan secara ketat tentang pemberian dan pencabutan izin Ruang Terbuka Hijau Kota. Dalam pelaksanaan pengendalian tersebut, perlu mengikutsertakan instansi teknis sesuai bidang tugasnya.

Agar dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah Kota Pematangsiantar membentuk unit khusus yang disertai tugas untuk mengatur dan mengelola tata ruang wilayah, yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan memiliki tugas pokok menyelenggarakan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka kota, keindahan tata hias kota. Dalam usaha melaksanakan tugas pokok tersebut BLH melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dalam merumuskan empat misi yang hendak diwujudkan. *Pertama*, menata dan mengembangkan RTH Kota. Dalam misi ini BLH Kota Pematangsiantar berupaya meningkatkan secara kuantitas maupun kualitas ruang terbuka hijau kota dan sarana keindahan kota agar tercapai ekosistem lingkungan kota Pematangsiantar yang seimbang, sehingga akan terwujud kota yang

nyaman, rindang, teduh, sejuk, asri, sehat dan indah dalam memenuhi kebutuhan ruang kota yang ideal. *Kedua*, melaksanakan penghijauan diseluruh Ruang Terbuka Kota Pematangsiantar. Penghijauan kota merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi paru-paru kota sehingga menjadi salah satu sumber kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat diperlukan dan perlu dikelola secara maksimal. *Ketiga*, meningkatkan sarana keindahan kota. Sejalan dengan penataan dan pengembangan RTH kota, maka perlu dilaksanakan penataan dan peningkatan sarana keindahan kota sebagai unsur pembangunan bidang pertamanan. *Keempat*, meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan keindahan kota.

Implementasi dari kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar tentunya tidak terlepas dari banyaknya permasalahan yang menghambat kebijakan dalam memaksimalkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar. Dalam wawancara yang dilakukan pada salah seorang pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar, dimana permasalahan yang muncul adalah kurangnya koordinasi di antara instansi terkait serta belum adanya acuan dan kesamaan sikap dan tindakan dalam mengoptimalkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar. Permasalahan ini dimulai dari perencanaan sampai proses evaluasi, bahkan keterlibatan stakeholder sangat rendah.

4. Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Pematangsiantar

Ketersediaan RTH di Kota Pematangsiantar mencakup hutan kota, taman kota dan lapangan olahraga, jalur hijau, dan pemakaman. Keberadaan RTH ini tentu perlu diberdayakan dan dikembangkan secara optimal agar memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat Kota Pematangsiantar.

a. Hutan Kota

Pengembangan RTH menuju terwujudnya Kota Pematangsiantar sebagai Kota Berwawasan lingkungan, dapat dimulai dari pusat kota sebagai kawasan prioritas, mengingat tingginya kepadatan bangunan yang dimiliki dibandingkan dengan daerah pinggiran kota. Hutan Kota menjadi area

penyeimbang pembangunan kota, sebagai penyejuk dan pengubah iklim mikro agar menciptakan kota yang lebih nyaman bagi penduduknya.

b. Taman-taman Kota dan Lapangan Olah Raga

Taman kota dan lapangan olah raga dapat dikembangkan berdasarkan hirarki ruang adalah taman tingkat kota yang secara hirarki dapat memberikan pelayanan bagi seluruh penduduk kota, misalnya Taman Bunga di Kota Pematangsiantar. Dasar pengembangan taman kota di Kota Pematangsiantar adalah berdasarkan, *pertama*, luas areal taman relatif dapat memenuhi kebutuhan dan fungsi dari taman kota dengan skala kota; dan *kedua*, mempunyai pencapaian yang relatif mudah dari seluruh bagian wilayah kota.

c. Jalur Hijau

Adapun peranan dan kontribusi dari pola penghijauan disekitar jalur akan memberikan, *pertama*, fungsi orology, yaitu sebagai pencegah erosi lapisan atas tanah yang subur (top soil); *kedua*, fungsi hidrologi, permukaan lahan yang bebas dari perkerasan (pengaspalan) akan menyerap air sehingga dapat menjaga sirkulasi air tanah (sirkulasi hidrologi); *ketiga*, fungsi estetika, yaitu dapat membentuk perspektif dan efek visualisasi yang indah bagi lingkungan yang padat; *keempat*, fungsi klimatologi yaitu dapat menciptakan iklim mikro yang sejuk dan nyaman oleh adanya faktor alam dan vegetasi alam; *kelima*, fungsi ekologi, yaitu menciptakan keserasian hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya; *keenam*, fungsi kesehatan yaitu oleh adanya proses asimilasi tanaman yang menghasilkan O₂ dan menyerap CO₂ yang selanjutnya dapat mengurangi pencemaran udara serta mengurangi kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia; dan *ketujuh*, fungsi sosial yaitu menciptakan suasana lingkungan yang sehat dan nyaman sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan sosial.

d. Pemakaman

Ruang terbuka hijau pemakaman selain sebagai tempat pemakaman jenazah, juga dapat memiliki fungsi sebagai penunjang keindahan kota, bahkan dapat dijadikan sebagai daerah resapan air. Berdasarkan ketentuan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Pematangsiantar, maka pengembangan kebutuhan RTH Publik dapat dicapai melalui analisa maupun

ketetapan yang berdasarkan kepada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang ketentuan ruang terbuka hijau kota yang penyediaan proporsi RTH Publik minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan, adapun analisa teknik lainnya adalah analisis *bunga berganda* yang dapat memprediksi berkembangnya pertumbuhan penduduk untuk 20 tahun mendatang sehingga analisis ini dikolaborasikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/2008/M tentang kebutuhan RTH Publik sesuai tingkat pelayanan penduduk.

KESIMPULAN

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik menjadi *entry point* dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah/daerah. Peranan Ruang Terbuka Hijau tidak terlepas dari berbagai fungsi yang melingkupinya, yaitu fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetis. Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik eksisting di Kota Pematangsiantar seluas 26,21 Km² (32,78%) dari keseluruhan luas kota Pematangsiantar yang mencapai 79,97 Km².

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota Pematangsiantar harus mempertimbangkan pemenuhan ruang RTH Kota baik itu RTH Publik dan Private sebesar 30%, terdiri dari RTH Publik 20 % dan RTH Privat 10 %. RTH Publik tersebut terdiri dari jalur hijau, taman kota, hutan kota, taman olah raga dan pemakaman. Distribusi RTH Publik di Kota Pematangsiantar pada dasarnya belum merata untuk tiap kelurahan berdasarkan pada kepadatan penduduk.

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan RTH Publik dilakukan melalui penataan dan pengembangan RTH kota, melakukan penghijauan diseluruh Ruang Terbuka Kota Pematangsiantar, meningkatkan sarana keindahan kota, serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan keindahan kota.

SARAN

Dalam menunjang dan mempertahankan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pematangsiantar maka perlu optimalnya peran pemerintah setempat, masyarakat dan stakeholder dalam memperhatikan dan memahami peran dan fungsi dari RTH Publik dalam eksistensi kehidupan masyarakat. Untuk

itu diperlukan suatu perhatian yang serius untuk menyusun perencanaan yang terstruktur dan sistematis. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan hendaknya memperhatikan berbagai saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penambahan dan pemeliharaan vegetasi sebagai elemen penunjang Ruang Terbuka Hijau Publik Kota agar tercipta suasana kota yang nyaman, segar dan menarik.
2. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan dapat melakukan kolaborasi dengan pihak legislatif dan yudikatif dalam menyusun regulasi (aturan) yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar sehingga tercipta kota yang berwawasan lingkungan.
3. Diperlukan kerjasama yang komprehensif dan menyusun program dalam penambahan RTH Publik dalam jangka menengah dan panjang di Kota Pematangsiantar.
4. Perlunya perhatian serius dari pemerintah dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau kota berupa taman, jalur hijau jalan dan hijau pekarangan yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat di luar fungsi RTH. Perhatian ini dapat dilakukan dengan menyediakan bibit tanaman, penanaman dan pemeliharaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
5. Menyusun pedoman pengelolaan RTH, melalui penyusunan rencana detail, maupun rencana tindak lanjut sebagai penjabaran terperinci mengenai rencana RTH kawasan Perkotaan Kota Pematangsiantar, terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah, yang terkait dengan pengelolaan RTH Pematangsiantar.

DAFTAR PUSTAKA

Sudjana. Nana (1991). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru. Bandung.

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dirjen Penataan Ruang. Jakarta.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988. Tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah. Perkotaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2002-2011

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2013-2032

Simanjuntak, Bungaran Antonius, (2010), *Melayu Pesisir dan Batak Pegunungan (Orientasi Nilai Budaya)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Warpani, Suwardjoko. (1984), "Analisis Daerah dan Kota", Edisi Kedua, Bandung: ITB.

Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah Kebijakan

Kebijakan adalah jurnal yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang berisikan karya tulis ilmiah dalam berbagai bidang untuk memberikan referensi/input dalam pengambilan kebijakan di Kota Pematangsiantar. Kebijakan terbit enam bulan sekali dalam satu tahun yakni bulan Juni dan Desember. Kebijakan pertama kali terbit Desember 2017 dengan Nomor ISSN 2599-1744 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Nasional ISSN No. : 0005.25991744/JI.3.1/SK.ISSN/2017.12 tanggal 7 Desember 2017.

Naskah yang akan diterbitkan dalam jurnal Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar harus memenuhi ketentuan berikut :

1. naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ketempat lain.
2. naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. komponen utama naskah setidaknya-tidaknyanya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
 - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, alamat korespondensi dan e-mail.
 - c. **Abstrak**, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya, Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi masalah, tujuan penelitian, hasil dan saran/usulan.
 - d. **Pendahuluan**, isi pendahuluan di dalam karya tulis ilmiah berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, serta tujuan penelitian.
 - e. **Metode Penelitian**, berisikan disain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknisk analisis yang digunakan.

- f. **Hasil dan Pembahasan**, hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu.
- g. **Kesimpulan dan Saran**, berisikan kesimpulan penelitian merupakan informasi penting dan singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Di dalam kesimpulan penulis memberikan penjelasan apakah hasil akhir penelitian tersebut sama atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Kemudian penulis memberikan saran, seperti penelitian tersebut dapat dilanjutkan di masa depan untuk mengetahui hasil yang lebih sempurna, atau hasil penelitian dapat diaplikasikan untuk kepentingan umum.
- h. **Tabel dan Gambar**, tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas serta diberi penjelasan yang memadai, mudah dipahami dan proporsional.
- i. **Daftar Pustaka**, daftar referensi, kutipan yang dituliskan dalam karya tulis diletakkan di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka penelitian sesuai dengan acuan model Harvard (*Harvard Style*).

Contoh penulisan Daftar Pustaka :

Buku

Iwantono, S. 2010. Kiat Sukses Berwirausaha: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: PT. Grasindo

Hadi, S. 1996. Metodologi Research I. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset, hal 81-92

Artikel dari Jurnal

Lolong, Dina Bisara. 2011. Analisis Kematian Ibu dan Neonatal. *Jurnal Ekologi Kesehatan* 10 (3), hal 298-304.

Bagian di dalam Buku

Baliinger, A dan Clark, M. 2001. Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Arti fisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239.

Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global. Dalam: Lin, L.L.K dkk. editor. *Miopia Terbarukan II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal. 31-37.

Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan. Tesis Ph.D, Universitas Indonesia.

Jurnal Artikel Elektronik (yang diunduh)

Gouy, J, Kapa, J, Moka, A & Levante, T. 2010. Parting with the past: is Papua New Guinea poised to begin a new chapter towards development? *Pacific Economic Bulletin* (Online) Edisi 8. Dari: <https://www.humanrights.gov.au/news/stories/freedoms-PNG.pdf> (Diakses 17 September 2014).

Web Page (yang dibaca)

The Guardian. 2013. Bkie crackdown: gangs could be banned from security and gym jobs (Online). Dari: <http://www.theguardian.com/world/2013>

/oct/16/bkie-crackdown-we-will-crush-them-says-queensland-attorney-general-jarrold-beijie-says (Diakses: 17 September 2014).

4. Prosedur Naskah

Naskah yang masuk hendaknya diterima paling lama 1 (satu) bulan sebelum waktu penerbitan untuk di-review oleh Dewan Redaksi dan reviewer oleh Mitra Bebestari. Naskah diserahkan dalam 2 (dua) media yaitu hardcopy dan softcopy yang keduanya harus memuat isi yang sama. Nama file, judul dan nama penulis naskah dituliskan pada label CD. Pengiriman naskah ke alamat redaksi melalui surat elektronik ke: kebijakan.bappeda@gmail.com

Atau melalui pos ke:

**Dewan Redaksi KEBIJAKAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar Bidang Monitoring Penelitian dan Pengembangan
Jl. Merdeka No. 4 Pematangsiantar**